

Laporan Penelitian

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP
PROSES PEMBUATAN PERDA TENTANG APBD
DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**



Oleh:

Dr. Mukhlisin Sa'ad, M.Ag
NIP. 196109281994031001

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2016**

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI			
Nama	:	Dr. Mukhlisin Sa’ad, M.Ag	
Tempat, tanggal lahir	:	Sumenep, 28 September 1961	
Alamat rumah	:	Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Jl. Ir. H. Juanda No. 370 RT 01/RW 06 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	
Telpon	:	081336660926 & 085234414234	
RIWAYAT PENDIDIKAN			
Tahun	Jenjang	Lembaga Pendidikan	Jurusan/Program Studi
2009	Doktor (S3)	IAIN Syarif Hidayatullah	Filsafat Islam
1994	Magister (S2)	IAIN Syarif Hidayatullah	Filsafat Islam
1987	Sarjana (S1)	IAIN Syarif Hidayatullah	Aqidah Filsafat
1984	IPD (Sarjana Muda)	Pondok Modern Gontor	Filsafat Islam
1979	KMI	Pondok Modern Gontor	
1976	TMI	Pondok Prenduan Sumenep	
1973	SDN	Pragaan Laok Sumenep	
PENGALAMAN JABATAN/PEKERJAAN			
Tahun	Lembaga		Posisi
2001-2004	IAINJ Poiton Probolinggo		Purek I
1998-sekarang	Ponpes Al-Mashduqiah Kraksaan Probolinggo		Pengasuh
1994-sekarang	UIN Sunan Ampel		Dosen
1991-1994	IAINJ Poiton Probolinggo		Dosen
1988-1992	Ponpes Badridduja Kraksaan Probolinggo		Kepala
1984-1985	TMI Ponpes Gontor Ponorogo		Guru
1979-1984	KMI Ponpes Gontor Ponorogo		Guru
PENGALAMAN ORGANISASI			
Tahun	Organisasi		Posisi
199-2004	Tanfidiyah NU Cabang Kraksaan Probolinggo		Wakil Ketua
1987-1988	Lingkaran Studi Indonesia (LSI)		Wakil Ketua
1986-1988	HMI Ciputat Jakarta		Ketua I
1985-1987	IKPM Cabang Ciputat Jakarta		Ketua
1982-1983	IPD Pondok Pesantren Gontor Ponorogo		Ketua Dema

1978-1979	OPPM Gontor Ponorogo	Bagian Koperasi
1978	PBS Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo	Bagian Penerangan
PENGALAMAN KELUAR NEGERI		
Tahun	Kegiatan	Posisi
1991-Sekarang	Umrah dan haji	Mekah, Saudi Arabia
1997	Ziarah Keagamaan	Kuwait dan Maroko
1996	Zaiarah Keagamaan	Yordania, Syiria, Palestina, dan Israel
1988	Pengajian Agama	Malaysia
1988	Pengajian Agama	Singapura

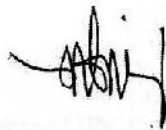
**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

Nama : Dr. Mukhlisin Sa'ad, M.Ag
NIP : 196109281994031001
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Kategori : Madya Individual
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERHADAP PROSES PEMBUATAN PERDA
TENTANG APBD DI PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan
Puslitpen LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016.

Surabaya, 30 September 2016
Pembimbing dan Penguji



Dr. Achmad Muhibbin Zubri, M.Ag
NIP 197207111996031001

ix

Prof. Dr. Abd. A'la, MA., Rektor UIN Sunan Ampel, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan penelitian ini. Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag., Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat UIN Sunan Ampel, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi salah satu penerima bantuan penelitian madya individual UIN Sunan Ampel 2016, dan Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag., Ketua Puslitpen LP2M UIN Sunan Ampel, atas

Agus Soleh, Bahrudin, Harimas Septian, dan Badrut Taman, mahasiswa Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel sebagai surveyor penelitian, atas bantuannya men-*photocopy* kuesioner dan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Rahmatul Fawaiz, sebagai pengentri data penelitian yang telah membantu pengentri data penelitian dengan tekun dan sabar.

Akhirnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pelbagai pihak yang memiliki minat terhadap studi kebijakan publik, khususnya proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dr. Mukhlisin Sa'ad, M.Ag
NIP 196109281994031001

ABSTRACT

Factors Affecting Process of Making Local Regulation on Regional Government Budget in East Java Provincial Government

Mukhlisin Sa'ad

This research aims to explain and describe the influence of national legislation, values, actors, and context/environment variables (independent variable) to the process of making Local Regulation on Regional Government Budget (dependent variable) in East Java Provincial Government. This research method uses quantitative-qualitative methods and data analysis uses multiple linier regression model and deep understanding of subjective data.

Based on this research data, the results of multiple regression F-test of these research variables, it is known that: $F_{\text{count}} (821,263) > F_{\text{table}} (2,394)$ and probability value of $\text{Sig.}_{(0,000)} < \alpha_{(0,05)}$, which means the influence independent variable to the dependent variable is significant. Based on the results on t-test, the partial influence of independent variable to the dependent variable is also significant, except in sub-variable testing national legislation had no significant effect.

This data findings—although in certain case the data shows opposite facts—generally parallel with qualitative data obtained from in-depth interviews with informants. Thus, it can be concluded the data of this research findings articulates with the conceptual-theoretical some scientists of public policy which says that the independent variable effect on the dependent variable that is described in this research.

Keywords : actors, context/environment, Local Regulation, national legislation, Regional Government Budget, and values

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
CURRICULLUM VITAE	iii
IZIN PENELITIAN	v
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	vi
PERSETUJUAN	vii
SURAT PENYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Penelitian Terdahulu	17
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN DAN KERANGKA TEORI	22
A. Landasan Teori	22
1. Perda tentang APBD	22
2. Landasan Normatif, Proses dan Pendekatan Penyusunan APBD ...	41
B. Kerangka Teori	51
1. Definisi Konseptual-Operasional	51
a. Legislasi Nasional	51
b. Aktor Pemeran Serta	52
c. Nilai-nilai	53

d. Konteks/Lingkungan	53
e. Perda tentang APBD	54
2. Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Subjek Penelitian	67
C. Lokasi Penelitian	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	71
BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN ..	82
A. Jumlah Subjek Penelitian	82
B. Profil Responden dan Informan	83
C. Validitas Instrumen Penelitian	86
D. Reliabilitas Instrumen Penelitian	88
E. Catatan Lapangan	90
F. Uji Asumsi Klasik	92
1. Uji Normalitas	92
2. Multikolinieritas	94
3. Heterokedastisitas	95
G. Analisa Data Penelitian	96
1. Analisis Regresi	97
2. Hipotesis Inti	19
3. Hipotesis Pokok	100
4. Hipotesis Khusus	110
H. Pembahasan Data Penelitian	123
BAB V PENUTUP	136
A. Temuan Penelitian	136
B. Kesimpulan	147
C. Saran-saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Legislasi Nasional terkait dengan Perda APBD	32
Tabel 2.2	Indikator dan Skala Ukuran IPM	37
Tabel 2.3	Definisi Konseptual-Operasional	54
Tabel 3.1	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data	71
Tabel 3.2	Alternatif Jawaban	73
Tabel 3.3	Tahapan Pengujian Validitas	73
Tabel 3.4	Tahapan Pengujian Reliabilitas	75
Tabel 4.1	Uji Validitas Instrumen Penelitian	87
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	89
Tabel 4.3	Sikap Responden	90
Tabel 4.4	Kehadiran Orang Ketiga	90
Tabel 4.5	Pengaruh Orang Ketiga	91
Tabel 4.6	Tingkat Kesulitan Pertanyaan	91
Tabel 4.7	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	93
Tabel 4.8	Uji Asumsi Multikolinieritas	94
Tabel 4.9	Uji Asumsi Heterokedastisitas	95
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi	97
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi: Berdasarkan Nilai Adjusted R Square	98
Tabel 4.12	Uji Keterandalan Model (Uji F/Simultan)	99
Tabel 4.13	Uji Koefisien Regresi (Uji t/Parsial): Pengaruh Variabel Legislasi Nasional, Aktor Pemeran Serta, Nilai-nilai, dan Konteks/Lingkungan terhadap Proses Pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	101
Tabel 4.14	Uji Koefisien Regresi (Uji t/Parsial): Pengaruh sub-variabel Legislasi Nasional, Aktor Pemeran Serta, Nilai-nilai, dan Konteks/Lingkungan terhadap Proses Pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	110
Tabel 5.1	Pengujian Hipotesis secara Simultan	136
Tabel 5.1	Pengujian Hipotesis secara Parsial	137

Proses pembuatan Perda tentang APBD, mengadaptasi teori kebijakan publik, merupakan tahap kedua dari lima dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni, tahap perumusan kebijakan publik (*public policy formulation*). Dalam tahap perumusan kebijakan publik ini, masalah yang masuk dibahas dan kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini, masing-masing para pembuat kebijakan publik dan masyarakat berusaha mempengaruhinya melalui pengusulan pemecahan masalah terbaik.¹ Berkaitan dengan desentralisasi politik-administratif, proses pembuatan Perda tentang APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pembuat kebijakan publik, sesuai dengan kewenangan politik yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam studi kebijakan publik, ketika proses pembuatan Perda tentang APBD diletakkan sebagai variabel terikat (*dependent variable*)—bukan sebagai variabel bebas (*independent variable*)—pemaparan dan penjelasan yang dapat membantu mengurai proses pembuatannya bukan terfokus pada dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan masyarakat (baca: sistem sosial-politik, ekonomi, dan budaya masyarakat) tetapi pada faktor-faktor aktor pemeran serta, nilai-nilai berpengaruh, dan konteks/lingkungan masyarakat yang mempengaruhi proses pembuatannya.²

Berdasarkan pada konteks tersebut, dengan demikian, identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD menjadi sangat krusial, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan pelbagai kalangan terkait, sebagai masukan

¹Joko Widodo, *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik* (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100.

²Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 25.

APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah oleh karena pemerintahan pusat menetapkan kebijakan otonomi daerah—sebagai bentuk implementasi kebijakan administrasi atau fiskal dan ekonomi pendukung kebijakan desentralisasi politik—yang secara efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui UU No. 22 Tahun 1999—yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—pemerintah pusat memberikan kewenangan politik dan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*) berdasarkan preferensi masyarakat sesuai dengan undang-undang.⁷ Sementara berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999—diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan akan diganti/dirubah lagi tinggal menunggu pengesahan RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah—pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola

⁷UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 17 dan 65; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65.

ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—yang dirubah dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 65 UU No 23 Tahun 2014 disebutkan secara eksplisit bahwa perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Perda tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU yang lebih tinggi dan memperlihatkan ciri khas daerah masing-masing, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, dan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran negara. Berkaitan dengan proses pembuatan perda, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 236-239 menyebutkan bahwa inisiatif Rancangan Perda (Raperda) bisa datang dari DPRD atau dari kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mekanisme proses pembentukannya ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 dalam Pasal 26-29 dan 40. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa Raperda dapat berasal dari DPRD (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota) dan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Raperda dapat disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi DPRD. Jika inisiasinya datang dari kepala daerah Raperda disampaikan kepada DPRD dan jika berasal dari pimpinan DPRD Raperda disampaikan kepada kepala daerah. Setelah disampaikan, kemudian Raperda dibahas bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

menggambarkan arah dan tujuan pelayanan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dengan demikian, APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Maksudnya, semua penerimaan daerah bertujuan memenuhi target yang ditetapkan APBD dan pengeluaran daerah harus sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD. Pelaksana utama APBD tersebut adalah kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Walikota. Kepala daerah ini merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan daerah. Kekuasaannya meliputi: (1) perencanaan umum, (2) penyusunan anggaran, (3) pemugutan pendapatan, (4) perbendaharaan umum, (5) penggunaan anggaran, dan (6) pengawasan dan pertanggung-jawaban. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut kepala daerah dibantu oleh para pejabat di bawahnya, seperti sekteratis daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan daerah melalui pendelegasian sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekteratis daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan. Ketentuan-ketentuan pokok APBD, sebagaimana diuraikan di atas, diatur dengan perda yang merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.¹⁴

Komponen-komponen APBD terdiri dari: (1) pendapatan daerah, (2) belanja daerah, dan (3) pembiayaan daerah (termasuk di dalamnya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)). Pendapatan daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain pendapatan yang sah. PAD diperoleh dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, dan

¹⁴Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 207-209.

kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari unsur PAD. Dana perimbangan diperoleh dari dana bagi hasil daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Belanja daerah komponen-komponennya meliputi: (1) belanja aparatur daerah, (2) belanja pelayanan publik, (3) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan (4) belanja tak terduga. Sedangkan pembiayaan daerah komponen-komponennya meliputi: (1) penerimaan daerah, dan (2) pengeluaran daerah.¹⁵

Pada dasarnya APBD mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena pentingnya APBD untuk peningkatan kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mendorong kepada pemerintah daerah dalam penyusunan APBD harus diorientasikan pada kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyusunan RAPBD/APBD berdasarkan pada Arah Kebijakan Umum APBD (AKU-APBD) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dan sebagai lembaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat sebagai konstituennya. RAPBD/APBD ini diserahkan oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE)—minimal terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah—kepada DPRD melalui Panitia Anggaran Legislatif (PAL) untuk dibahas di tingkat fraksi dan sidang paripurna DPRD. Dalam pembahasan

¹⁵Sultan Suhab, “Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah,” *Analisis* 1, No. 2, 2004: 111-112. Lihat juga Bratakusumah dan Solihin, *op. cit.*, h. 212-214.

akuntabilitas anggaran, (2) disiplin anggaran, (3) keadilan anggaran, dan (4) efisiensi dan efektivitas anggaran. Norma/prinsip pertama, transparansi dan akuntabilitas anggaran diorientasikan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung-jawab. Untuk mencapai tanggung jawab dan kinerja pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat, APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh masyarakat. Norma/prinsip kedua, disiplin anggaran diorientasikan kepada kebutuhan masyarakat dan keseimbangan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan—yang disusun berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma/prinsip ketiga, efisiensi dan efektivitas anggaran diorientasikan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan norma/prinsip keempat, keadilan anggaran diorientasikan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi penggunaan anggaran untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹⁸

Dari uraian-uraian tersebut, tampak memperlihatkan secara eksplisit bahwa pembahasan dan praktik desentralisasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau dipisahkan antara desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah yang desentralistik membutuhkan sejumlah transfer kewenangan formal untuk perencanaan, manajemen, dan peningkatan dan alokasi sumber daya serta pendanaan yang memadai. Namun demikian, praktik-praktik desentralisasi politik dan administratif/fiskal yang dilakukan secara komprehensif tidak kemudian selalu menjadi jaminan

¹⁸Ratnawati, "Gender Budget dalam APBD," Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 298.

keberhasilan ketercapaian tujuan dari pemberlakuan desentralisasi. Pemberlakuan desentralisasi yang secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat—melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan varian-varian—tetapi sebaliknya dalam banyak kasus dipelbagai daerah melahirkan kebijakan-kebijakan bias kepentingan ekonomi atau kebijakan yang lebih banyak menekankan pada kepentingan ekonomi daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah atau desentralisasi tersebut kemudian oleh pemerintah pusat dibatalkan. Menurut data empirik yang dihimpun Soekarwo (Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2014 dan 2014-2018) dari pelbagai sumber, selama tahun 2003 pemerintah pusat membatalkan 7.000 (tujuh ribu) Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan mendasar pemerintah pusat—melalui Departemen Dalam Negeri—membatalkan perda-perda tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memberatkan publik.¹⁹

Secara normatif-teoritis munculnya perda-perda tersebut di tingkat lokal—baik yang kontroversial maupun yang tidak kontroversial—tidak terlepas dari pengaruh keempat faktor yang disebutkan di atas. Dengan demikian, keempat faktor dan pelbagai sub-faktornya tersebut, secara normatif-empiris bisa menjadi “variabel bebas” yang dapat mempengaruhi “variabel proses pembuatan Perda tentang APBD dipelbagai daerah” sebagai “variabel terikat”, termasuk di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dasar argumentasinya, pertama, karena legislasi nasional merupakan aturan dasar normatif tertulis yang harus menjadi acuan pelbagai pemerintah daerah dalam proses pembuatan Perda tentang APBD.

¹⁹Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 1.

Kedua, karena aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan perumusan Perda tentang APBD merupakan variabel berpengaruh dalam proses pembuatan Perda tentang APBD, meskipun bobot determinasinya bervariasi di berbagai daerah. Pengaruh keempat variabel tersebut terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur inilah yang dipaparkan dan dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Faktor-faktor berpengaruh tersebut ditetapkan oleh peneliti terdiri dari empat faktor, yakni: (1) legislasi nasional, (2) aktor pemeran serta, (3) nilai-nilai, dan (4) konteks perumusan perda. Legislasi nasional terdiri dari: (1) UU, (2) Perpu, (3) Perpres/Kepres, dan (4) Permen/Kepmen. Pemeran serta terdiri dari: (1) Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (2) DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur, (3) kelompok penekan, (4) partai politik, dan (5) masyarakat secara individual, di Provinsi Jawa Timur. Nilai-nilai terdiri dari: (1) nilai-nilai politik, (2) nilai-nilai organisasi, (3) nilai-nilai pribadi, (4) nilai-nilai kebijakan, dan (5) ideologi, yang berkembang di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan konteks perumusan Perda tentang APBD terdiri dari: (1) kondisi budaya politik masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan (2) kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur.

- (4) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai kajian/bahan masukan kepada pelbagai kalangan (pemerintah dan non-pemerintah) di Provinsi Jawa Timur tentang nilai-nilai dan konteks sosial-budaya, politik, dan ekonomi masyarakat dalam merumuskan, membahas, dan menetapkan Perda tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan
- (5) Data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data awal oleh pelbagai kalangan untuk melakukan penelitian lanjutan dan review terhadap Perda tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur banyak dilakukan ilmuwan dan praktisi pasca pemberlakuan otonomi daerah tahun 1999. Penelitian tersebut antara lain: (1) penelitian Habib Adjie *et al.*, “Ketidakberlanjutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah”, (2) Nanda Pratama Sukoco “Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” (3) Dewie Tri Wijayanti “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan *“Fish Shale Multiscience”*”, dan (4) Kalpie Astragina “Analisis Faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur”.

Habib Adjie *et al.*, dalam penelitiannya menemukan bahwa pemberlakuan otonomi daerah di Provinsi Jawa Timur berdampak pada perda-perda Provinsi Jawa Timur tidak berlaku efektif baik di tingkat pelaksana maupun

implementasi di masyarakat. Penyebabnya adalah karena faktor normatif dan empiris. Faktor normatif karena: (1) terlalu banyak pendelegasian wewenang pengaturan baik dalam bentuk Keputusan Gubernur maupun Peraturan Gubernur, dan ditemukan dalam 5 (lima) perda yang dianalisis jumlah pendelegasian wewenang pengaturan sebanyak 37 pengaturan, dalam bentuk Keputusan Gubernur berjumlah 24 (dua puluh empat) dan dalam bentuk Peraturan Gubernur berjumlah 13 (tiga belas). Rata-rata pendelegasian tersebut berjumlah 7,4 (tujuh koma empat) peraturan di setiap perda, sehingga dengan banyaknya pendelegasian kewenangan mengatur tersebut akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yakni: (a) mempengaruhi efektifitas pelaksanaan perda karena harus menunggu ditetapkannya peraturan tersebut, dan (b) berpotensi akan menimbulkan inkonsistensi antara perda dan peraturan pelaksanaannya, (2) sanksi di perda masih terlalu ringan/rendah dan tidak memadai sehingga tidak menjamin masyarakat untuk selalu mentaati perda, dan (3) terdapat delegasi blanko baik dalam bentuk Keputusan Gubernur maupun Peraturan Gubernur. Sedangkan faktor empirisnya karena: (1) pembentukan perda kurang partisipatif sehingga kurang responsif, (2) kurang pengawasan, (3) penegakan perda kurang maksimal, dan (4) kurangnya penyuluhan dan sosialisasi perda ke masyarakat.²⁰

Nanda Pratama Sukoco pada penelitiannya menemukan bahwa peran Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam perumusan perda di DPRD sangat besar. Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam melakukan perannya bekerjasama dengan mitra kerjanya, yaitu: (1) gubernur Provinsi Jawa Timur, (2) Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, (3) masyarakat/LSM, (4)

²⁰Habib Adjie *et al.*, *Ketidakterlaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 50-59.

instansi terkait di daerah Provinsi Jawa Timur rujukan pembahasan Raperda/Perda, dan (5) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. Peran Badan Legislasi DPRD Jawa Timur dalam pembuatan Raperda/Perda Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan baik. Indikatornya adalah: (1) waktu persiapan pembuatan perda cukup lama, (2) ada jumlah dan target waktu penyelesaian pembahasan, (3) transparan, dan (4) partisipatif. Namun, pada kasus tertentu peran Badan Legislasi DPRD Jawa Timur berjalan tidak baik. Indikatornya: (1) dalam pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan Raperda/Perda Jawa Timur secara khusus ditugaskan kepada Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, dan (2) peran serta masyarakat dalam pembuatan perda Provinsi Jawa Timur tidak diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.²¹

Dewie Tri Wijayanti menemukan dalam penelitiannya bahwa kekuasaan organisasi yang berlaku di Provinsi Jawa Timur adalah kekuasaan birokratik sentralistik. Kekuasaan ini berakibat pada: manajemen strategik tidak berhasil dan kepemimpinan direktif tidak berfungsi. Secara keseluruhan ditemukan bahwa manajemen strategik yang dijalankan birokrasi Jawa Timur kurang maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi kurang serius mengimplementasikan aturan, rencana, dan kebijakan yang ada. Hal ini terjadi karena birokrasi terlalu sibuk dengan evaluasi dan perencanaan dan profesionalisme pegawai tidak meningkat karena terhambat komunikasi dengan atasannya. Berdasarkan dalam penelitian ini: perda yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berlaku efektif, kepemimpinan birokratik sentralistik pemerintah Provinsi Jawa Timur berakibat pada manajemen strategik tidak

²¹Nanda Pratama Sukoco, "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur," *Jejaring Administrasi Publik II*, No. 8 (2012): 99-102.

berhasil dan kepemimpinan direktif tidak berfungsi, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi akuntabilitas karena keberhasilan program, kerjasama, dukungan masyarakat, peningkatan informasi, dan ketaatan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur.²²

Kalpie Astragina memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi akuntabilitas, diantaranya: (1) opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2009, dan (2) piala dan trofi Citra Bhakti Abdi Negara 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *reward* atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama SKPD yang mendapatkan penilaian sangat akuntabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi meraih prestasi dan penghargaan tersebut adalah: (1) keberhasilan program utama dan unggulan yang ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo sehingga perekonomian di Jawa Timur berkembang, (2) kerjasama, koordinasi yang harmonis antara semua jajaran Pemda, Dewan Legislatif Daerah, dan BPK dalam menjalankan roda pemerintahan, (3) dukungan dan kepercayaan masyarakat Jawa Timur, (4) peningkatan kualitas informasi dan teknologi, dan (5) ketaatan terhadap regulasi yang ada.²³

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini fokus pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, artinya pembahasan perda dalam penelitian ini diletakkan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, dengan menggunakan proses berpikir deduktif-induktif.

²²Dewie Tri Wijayanti, "Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan *"Fish Shale Multiscience"*," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7, No. 4, 2009.

²³Kalpie Astragina, *Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur*, tersedia di <http://www.unesa.ac.id> (diakses pada 16 Nopember 2015).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari tujuh bab. Dari ketujuh bab tersebut, masing-masing berisi atau terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk memperjelas secara komprehensif sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang topik penelitian. Pembahasannya meliputi lima sub-bab. Kelima sub-bab tersebut ialah meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang memaparkan tentang landasan dan kerangka teori penelitian. Uraian-uraian meliputi dua sub-bab. Kedua sub-bab tersebut ialah meliputi: landasan teori dan kerangka teori.

BAB III merupakan bab yang memaparkan tentang metode penelitian yang dipergunakan penelitian. Uraian-urainya meliputi lima sub-bab. Kelima sub-bab tersebut ialah meliputi: jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisa data.

BAB IV merupakan bab inti penelitian yang menguraikan tentang analisa dan pembahasan data penelitian. Uraian-uraian meliputi delapan sub-bab. Delapan sub-bab tersebut ialah meliputi: jumlah subjek penelitian, profil responden dan informan, validitas instrumen penelitian, reliabilitas instrumen penelitian, catatan lapangan, uji asumsi klasik, analisa data penelitian, dan pembahasan data penelitian.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi tentang deskripsi hasil temuan penelitian, kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN DAN KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Peraturan Daerah tentang APBD

Peraturan daerah (Perda) adalah instrumen aturan sah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri di tingkat lokal. Peraturan daerah tentang APBD atau dapat disebut dengan Perda tentang APBD, secara normatif merupakan “peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengatur tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD”. Merumuskan kembali dari pendapatnya Akmal Boedianto, Perda tentang APBD adalah “dasar landasan pengaturan hukum di tingkat lokal untuk menjamin terciptanya ketertiban tata kelola keuangan yang terdapat pada APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah”. Pengaturan hukum APBD yang dimaksud, mengikuti pendapatnya Soekarwo, adalah “pengaturan hukum yang dibangun dalam suatu rangkaian sistem hukum keuangan (negara) yang memberikan regulasi mengenai aspek kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat”.¹

Menurut tata hukum Indonesia, seperti halnya perda-perda lainnya, Perda tentang APBD berdasarkan segi sumber hukumnya merupakan UU

¹Akmal Boerdianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 29-32; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 (17).

dalam arti materiil dan tidak mempunyai arti formil karena isinya mengikat umum dan bukan merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan persetujuan DPR RI. Dengan demikian, artinya Perda tentang APBD tingkatannya dalam tata hukum Indonesia lebih rendah daripada UU formil atau UU (termasuk peraturan dan ketetapan) yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR RI yang diundangkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan segi fungsinya, Perda tentang APBD merupakan hukum materiil (*substantive law*) yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintah, dan melarang pelbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan isinya, Perda tentang APBD merupakan hukum publik (*public law*) yang mengatur kepentingan umum, atau dapat dikatakan sebagai peraturan yang mengatur hubungan hukum antara negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan perorangan atau hubungan antara pemerintah daerah dengan alat perlengkapannya.²

Dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Perda, termasuk Perda tentang APBD, ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas perbantuan. Dalam penyusunannya, terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi: (1) kesesuaian dengan legislasi nasional, (2) kesesuaian dengan asas legislasi nasional, (3) peran serta masyarakat, dan (4) tempat pengundangan resmi. Kesesuaian dengan legislasi nasional yang dimaksud, artinya Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dan

²Hartono Hadisoeparto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 3 (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 9-11 dan 36.

tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kesesuaian sesuai dengan asas legislasi nasional yang dimaksud, adalah pembentukan Perda harus meliputi: (1) kejelasan tujuan, (2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (4) dapat dilaksanakan, (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6) kejelasan umum, dan (7) keterbukaan. Muatan materi-materinya harus mengandung asas: (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan dan kekeluargaan, (4) kenusantaraan, (5) bhineka tunggal ika, (6) keadilan, (7) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (8) ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau (9) keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan. Peran serta masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda ini dapat berasal atau inisiatif dari DPRD (*legislative heavy*) ataupun Gubernur atau Bupati/Walikota (*executive heavy*). Sedangkan tempat pengundangan resmi yang dimaksud ialah Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk mempunyai kekuatan berlaku mengikat.³

Dalam konteks pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam membuat Perda tentang APBD merupakan bagian terpenting, selain pemilihan pejabat publik dan pembangunan, dari pemberian kewenangan politik/pemerintahan dan administratif kepada pemerintah daerah, melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diganti dengan UU No. 32

³UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2).

Tahun 2004, dirubah UU No. 12 Tahun 2008, diganti UU No. 23 Tahun 2014, dan dirubah UU No. 9 Tahun 2015) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (diganti UU No. 33 Tahun 2004). Secara teoritis melalui regulasi tersebut, desentralisasi politik dan administrasi dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Dari sudut pandang desentralisasi politik dan administrasi, melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan formal, baik yang bersifat politik maupun teknis-administratif, yang diberikan pemerintah pusat secara akuntabel, responsif dan representatif untuk mengurus pemerintahan sendiri. Terdapat dua pandangan yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam membuat keputusan di tingkat lokal. Pandangan tersebut ialah pandangan politik dan administratif. Dalam perspektif politik, otoritas daerah dalam pembuatan keputusan untuk tujuan pemberdayaan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terwakili atau termajinalkan serta memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada masyarakat atau perwakilannya di DPRD di dalam proses pembuatan keputusan publik.⁴ Konseptualisasinya tampak terlihat pada konseptualisasi pelbagai ilmu sebagai berikut:

Menurut Philip Mawhood desentralisasi adalah:

“the creation of bodies separates by law from the national center, in which local representatives are given formal power to decide on a range of public matters. Their political base is locality and not . . . the nation. Their area of authority is limited, but within that area their right to make decision is entrenched by law and can only be altered by new legislation.

⁴Muhammad Asfar, “Otonomi Daerah: Lingkup Kajian dan Ancangan Teori,” dalam Muhammad Asfar (ed.). *Implementasi Otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim* (Surabaya: Center for Public Policy Studies, Civil Society Support and Strengthening Program, dan Pusdeham, 2001), h. 17-18.

They have resource which, subject to the stated limits, are spent and invested at their own discretion.”⁵

[penciptaan pembagian lembaga pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku di tingkat nasional, dimana pemerintah lokal diberikan kekuasaan formal untuk memutuskan batasan dan muatan kebijakan publik. Basis politik pemerintah lokal adalah lokalitas bukan . . . bangsa. Meskipun area otoritasnya terbatas, tetapi dari area terbatas tersebut hak-hak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berdasarkan pada hukum hanya dapat dirubah oleh legislasi baru. Daerah memiliki sumber-sumber kewenangan, dimana, subjeknya terbatas, dalam hal membelanjakan dan menginvestasikan berdasarkan kebutuhan riil].

Berdasarkan perspektif administratif, melalui desentralisasi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab fomal mengenai perencanaan dan manajemen serta meningkatkan alokasi pelbagai sumber daya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat atau melalui usahanya sendiri. Secara komprehensif dipaparkan oleh Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis dan G. Shabbir Cheema, sebagai berikut:

“the transfer of responsibility for planning, management and resource rising and allocation from the central government and its agencies to: (a) field units of central government ministries or agencies; (b) subordinate units or level government; (c) semi-autonomous public authorities or corporation; d) area wide, regional or functional authorities; or (e) non-government, private, or voluntary organization.”⁶

[transfer sejumlah tanggung-jawab fomal mengenai perencanaan, manajemen dan peningkatan serta alokasi berbagai sumber daya dari pemerintah pusat dan berbagai agen yang dimilikinya kepada: (a) berbagai unit lembaga atau agen-agen pemerintah pusat; (b) unit-unit yang lebih rendah atau peringkat-peringkat pemerintahan; (c) berbagai otoritas publik atau korporasi-korporasi semi otonom; (d) badan-badan yang memiliki otoritas fungsional di daerah. Atau (e)

organisasi-organisasi non-pemerintah, swasta atau yang bersifat lokal].

Sedangkan berdasarkan sudut pandang politik-administratif, UNDP memaparkan bahwa:

“decentralization of the public sector, in itself, will not be effective unless support is also provided to strengthen local governance, involving the public, private in civil sector. And, in turn, the achievement of good governance at the local level is also not possible without the transfer of responsibilities and capacities through decentralization. The term “decentralization governance” defines the systematic and harmonious interrelationship resulting from the balancing of power and responsibilities between central governments and other levels of government and non-governmental actors, and the capacity of local bodies to carry out their decentralized responsibilities using participatory mechanisms.”⁷

dilakukan secara sentralistik, dan jika itu dilakukan akan melahirkan dampak negatif, yaitu, pemerintahan tidak efisien dan tidak mampu melakukan tugas-tugasnya secara baik. Oleh karena itu, pembagian tugas dan kewenangan sangat esensial yang diperlukan dalam negara modern. Alasan kedua berkaitan dengan pemberian media kepada masyarakat daerah untuk terlibat dalam proses-proses politik di tingkat lokal karena terlibat secara langsung di tingkat nasional tidak memungkinkan. Dengan desentralisasi masyarakat daerah terlibat langsung pada proses-proses politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan pejabat publik dan pembuatan kebijakan publik. Sedangkan alasan ketiga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat yang selama ini termarginalkan dalam proses-proses politik di tingkat nasional. Dengan desentralisasi kesetaraan akan lahir, sebab masyarakat daerah diberikan media untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik. Jika partisipasi masyarakat meluas di seluruh tingkat nasional—maka kesetaraan politik akan berkembang pada suatu negara-bangsa. Alasan keenam berkaitan dengan demokrasi di tingkat lokal—yakni pelibatan secara aktif masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan desentralisasi masyarakat akan terlibat dalam proses-proses politik di tingkat lokal dan pada gilirannya semua proses-proses politik yang terjadi di pemerintahan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, partisipasi pada proses pembuatan peraturan daerah sejak dari perumusan, implementasi sampai pada proses evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah.⁸

⁸Syaukani HR., *et al.*, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan, 2002), h. 20-36.

Ditinjau dari pespektif kebijakan publik, pembuatan Perda tentang APBD merupakan salah satu bagian dari proses pembuatan kebijakan publik tahap kedua, yakni tahap perumusan kebijakan publik. Pada tahap perumusan kebijakan publik, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut, kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap inilah masing-masing aktor akan berusaha mempengaruhinya melalui pengusulan pemecahan masalah terbaik.⁹

Proses pembuatan Perda tentang APBD, berdasarkan perspektif otonomi daerah, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni eksekutif dan legislatif sebagai aktor utama pembuat kebijakan publik, sesuai dengan kewenangan politik yang diberikan oleh pemerintah pusat. Proses pembuatannya merupakan bagian krusial dari pengelolaan keuangan daerah yang disusun sejalan atau tidak bertentangan dengan legislasi atau peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku di tingkat nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, mengikuti pendapatnya Soekarwo, pembuatan Perda tentang APBD harus mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melaksanakan hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Tujuannya, agar APBD mampu membentuk tatanan pengelolaan keuangan daerah yang mampu

⁹Joko Widodo, *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik* (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100; Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 33.

Dalam pelaksanaannya hukum yang diacu dalam proses pembuatan Perda tentang APBD adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah—yang diganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, dan dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah—yang diganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah—UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU tersebut mengatur tentang proses dan mekanisme pembuatan Perda dan lembaga pengisiasi pembuatan Perda.

kadang kala. Kelompok institusional bersifat formal dan memiliki fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Sedangkan kelompok asosiasional merupakan kelompok yang terorganisir, memiliki aturan yang jelas, dan kegiatannya dilakukan berdasarkan kepentingan anggota-anggotanya dan aturan yang ditetapkan.¹⁴

Partai politik adalah organisasi dengan mana orang-orang atau golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan. Partai politik ini memiliki fungsi: (1) menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, (2) menyebarluaskan gagasan yang tersimpul dalam rencana kebijakan pemerintah, (3) mendidik masyarakat menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial, (4) menumbuhkan dan memupuk kesadaran loyalitas nasional kepada masyarakat, (5) rekrutmen politik, dan (6) mengatur konflik¹⁵. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan orang-orang atau suatu asosiasi sukarela individu-individu yang hidup dan memiliki tujuan yang sama, berintraksi dan bergantung satu sama lain untuk mempertahankan kehidupan anggota-anggotanya¹⁶.

Nilai-nilai merupakan konsep umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil. Dalam lingkup lebih spesifik lagi, nilai-nilai terwujud dalam seperangkat aturan yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan diwujudkan. Nilai-nilai sebagai faktor pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik meliputi: nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Nilai-nilai politik adalah seperangkat kriteria atau aturan partai dan kelompok. Nilai-nilai

¹⁴Gabriel A. Almond, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik," dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (ed.). *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), h. 53-56.

¹⁵Soelityati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 114.

¹⁶Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 43.

organisasi adalah kriteria atau aturan-aturan dalam suatu organisasi. Nilai-nilai pribadi merupakan kepentingan politik personal pembuat kebijakan. Nilai-nilai kebijakan adalah nilai-nilai moralitas. Sedangkan ideologi adalah seperangkat keyakinan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan.¹⁷

pertimbangan-pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik.²⁰ Dengan demikian budaya politik dapat didefinisikan adalah “kenyataan setiap sisi kehidupan politik masyarakat, yang berupa persepsi, sikap, dukungan, tindakan, dan keyakinan masyarakat dan berpola kognitif, afektif, dan evaluatif”.²¹

Sedangkan kondisi sosial-ekonomi merupakan posisi tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, misalnya negara-bangsa dan daerah. Dalam pembangunan, kondisi sosial-ekonomi ini dijadikan ukuran oleh UNDP terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dan negara dalam memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat secara individual dan kelompok (*human life*). Ukuran tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi ini dirumuskan dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*).²² Indikator IPM yang dipergunakan UNDP ialah usia angka harapan hidup (*life expectancy at age*), angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*), dan standar hidup layak. Dimensi ukuran indikator usia harapan hidup ialah angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*), indikator tingkat melek huruf dewasa ialah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan indikator standar layak hidup ialah kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity: income and Gross Domestic Product*). Angka harapan hidup waktu lahir dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah dipergunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat,

²⁰*Ibid.*, h. 21.

²¹Russell J. Dalton, “Citizen Attitudes and Political Behavior,” in *Comparative Political Studies* 33, No. 6-7, 2000, h. 915; Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation*. Tim IRE (terj.). Yogyakarta: IRE, 2003), h. 205213.

²²Sudhir Anand and Amartya Sen, “The Income of the Human Development Index,” in *Journal of Human Development* 1, No. 1, 2000, h. 83-85.

alternatif tindakan Perda tentang APBD. Selain itu kelompok kepentingan juga memberikan informasi kepada para pembuat Perda tentang APBD berkaitan dengan teknis mengenai sifat dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari usul Raperda tentang APBD yang diajukan. Organisasi kemasyarakatan lain, yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan tersebut ialah partai politik. Melalui fungsi agregasi kepentingan, partai politik dapat mengubah tuntutan dari pelbagai kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan. Dengan demikian artinya partai politik berperan sebagai organisasi politik yang memiliki keharusan, perantara tuntutan kepentingan pelbagai kelompok, dan penentu dalam pembuatan Perda tentang APBD. Sedangkan masyarakat secara personal berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD melalui kegiatan partisipasi dalam: (1) pemilu, dan (2) proses pembuatan kebijakan publik. Di dalam pemilu perannya menentukan pejabat publik yang akan membuat dan menetapkan Perda tentang APBD. Dalam proses Perda tentang APBD, masyarakat melalui mekanisme suara dan tindakan bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam penyusunan anggaran kinerja pemerintah daerah, kepala dan daerah dapat mempengaruhinya pada tahap: (1) proses penyusunan anggaran yang berupa penyiapan: instruksi anggaran (formulir dan kertas kerja) dan kalender anggaran, (2) pasca anggaran disetujui, yakni melaksanakan dan memantau serta melaksanakan anggaran kinerja. Tim Anggaran/Bagian Keuangan dapat mempengaruhi pada tahap: (1) koordinasi, (2) pembimbingan yang meliputi: instruksi dan format dan lembar kerja, dan (3) dalam melakukan pengawasan. DPRD dapat mempengaruhi pada tahap: (1) penetapan kebijakan anggaran, (2) pengesahan anggaran, yang meliputi: penetapan kebijakan, penentuan arah, dan penetapan prioritas pelayanan, dan (3) memantau dan mengevaluasi anggaran. Sementara masyarakat—baik itu berupa kelompok

penekan, partai politik maupun masyarakat secara individual—dapat mempengaruhi penyusunan anggaran kinerja pemerintah pada tahap: (1) pelibatan terhadap *stakeholders*, dan 2) curah gagasan tentang anggaran dengan masyarakat.

Para pembuat kebijakan publik atau pemeran serta resmi, dalam proses pembuatan Perda tentang APBD banyak dipengaruhi oleh pelbagai nilai. Nilai-nilai yang dimaksud ialah nilai-nilai politik, organisasi, kebijakan, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Nilai-nilai politik sering menjadi dasar dalam proses pembuatan Perda tentang APBD para pembuat Perda di dasari sebagai sarana untuk memperoleh kepentingan politik bagi partai politik dan kelompok kepentingannya, sehingga partai politiknya dapat mempertahankan kekuasaan di pemerintahan. Nilai-nilai organisasi berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik oleh karena di lembaga eksekutif, birokrat banyak dipengaruhi oleh tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai organisasi. Tujuannya agar lembaga birokrasi tetap eksis, memperbesar dan memperluas program-program dan kegiatan-kegiatan atau mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewanya. Selain itu, kriteria nilai kepentingan pribadi, kebijakan, dan ideologi memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD, seperti memasukkan unsur kepentingan pribadi, moralitas, dan ideologi yang dipercayai dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Perda tentang APBD tersebut, dalam proses pembuatannya oleh pembuat Perda tentang APBD tidak terlepas dari lingkungannya yang menjadi konteks perumusan kebijakan. Di dalam lingkungan tersebut yang menjadi faktor penentu berpengaruh terhadap proses pembuatannya adalah budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Budaya politik yang dimaksud ialah menyangkut nilai-nilai, kepercayaan, dan tingkah laku yang dijadikan pegangan secara luas mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana

melakukannya oleh para pembuat kebijakan. Selain itu budaya politik merupakan hubungan antara masyarakat dan pemerintahannya. Sementara kondisi sosial-ekonomi ialah ukuran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dikur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Variabel budaya politik dikatakan dapat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD, karena para pembuat Perda tentang APBD dan masyarakat yang berpartisipasi dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang tersosialisasi sejak dini di lingkungan keluarga, pola orientasi budaya politiknya, nilai utama masyarakat (kebebasan, kesamaan, kemajuan, efisiensi, dan kepraktisan), dan pola penentuan kebijakan (paternalistik dan demokrasi). Sedangkan kondisi variabel sosial-ekonomi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik oleh para pembuat kebijakan publik tidak mungkin terlepas begitu saja dengan kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Misalnya masalah minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan masyarakat, dan pengangguran. Kondisi sosial-ekonomi inilah yang menjadi pemicu munculnya konflik (perbedaan dan persaingan) pelbagai kalangan masyarakat dan karena konflik tersebut pemerintah membuat sebuah aturan untuk melindungi kepentingan sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi berada pada posisi marginal, melalui legislasi nasional, peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya.²⁴

²⁴Wolter G. Held, "Decision Making in the Federal Government: The Wallace S. Sayre Model," in J. Steven Ott *et al.* (eds.). *Public Management: the Essential Readings* (Chicago: Lyceum Books/Nelson-Hal Publisher, 1991), h. 217-235. Lihat juga, Winarno, *op. cit.*, h. 124-142; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Landasan Normatif, Proses, dan Pendekatan Penyusunan APBD

APBD menurut peraturan perundang-undangan secara konseptual adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah/wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Perda.²⁵ Dengan demikian, APBD secara normatif merupakan perangkat ekonomis yang ditetapkan dalam tahun anggaran tertentu yang menggambarkan arah dan tujuan pelayanan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dalam Perda. Pembuatan Perda tentang APBD menjadi suatu hal yang sangat krusial guna memberikan wadah hukum bagi pengembangan dana-dana publik.²⁶ Penggunaan dana publik yang terdapat dalam wadah APBD mutlak dituangkan dalam suatu kerangka hukum peraturan daerah yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat/DPRD dan sebagai pelaksana anggaran adalah kepala daerah. Pembuatan Perda tentang APBD yang dapat dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk riil implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah—yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, dirubah UU No. 12 Tahun 2008, diganti UU No. 23 Tahun 2014, dan dirubah UU No. 9 Tahun 2015—dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan demikian, artinya penyusunan APBD harus didasarkan pada kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah

²⁵UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1.

²⁶UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

sesuai dengan regulasi otonomi daerah yang berlaku—yang mana di dalamnya juga mengatur tentang APBD sebagai bagian dari materi muatan utama.²⁷

Perangkat hukum terkait—pasca pemberlakuan otonomi daerah—yang dapat menjadi landasan normatif dalam penyusunan APBD di pemerintahan daerah, menurut Akmal Boedianto, terdapat puluhan legislasi nasional. Legislasi tersebut diantaranya meliputi: (1) UU No. 17 Tahun 2003, (2) UU No. 1 Tahun 2004, (3) UU No. 15 Tahun 2004; (4) UU No. 32 Tahun 2004; (5) UU No. 33 Tahun 2004; (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005; (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005, (8) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, (9) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, (10) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005, (11) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, (12) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2005, (13) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005, (14) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, (15) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, (16) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, (17) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, (18) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, (19) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, (20) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, (21) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, (22) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, (23) Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997, (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006, (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, (27) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007, (29) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001,

²⁷Attamimi, Akmal Boedianto, “Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 33.

(30) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001, (31) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2002, dan (32) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2003.²⁸

Pejabat berwenang menyusun APBD, menurut UU No. 32 Tahun 2004 (diganti UU No. 23 Tahun 2014) adalah kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Walikota, berserta perangkat pemerintah daerah yang tergaung dalam TAPD. Kepala daerah tersebut merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan daerah—dimana kekuasaannya meliputi: (1) perencanaan umum, (2) penyusunan anggaran, (3) pemugutan pendapatan, (4) perbendaharaan umum, (5) penggunaan anggaran, dan (6) pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut kepala daerah dibantu oleh para pejabat di bawahnya—seperti sekteratis daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan daerah yang tergabung dalam TAPD—yang dilakukan melalui pendelegasian sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekteratis daerah dan para pejabat perangkat pengelola keuangan. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai teknis pelaksanaan APBD diatur di dalam Perda tentang APBD sebagai dasar acuan normatif pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.²⁹

APBD memiliki tiga struktur dan komponen yang merupakan satu kesatuan. Struktur tersebut terdiri dari (1) pendapatan daerah, (2) belanja daerah, dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) dana perimbangan, (3) lain-lain

²⁸*Ibid.*, h. 37-39.

²⁹Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 207-209.

pendapatan yang sah.³⁰ Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan struktur APBD yang mana dalam dokumen APBD merangkum seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi: PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan jenis pendapatan, seperti, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK.

PAD diperoleh dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, dan kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari unsur PAD. Dana perimbangan diperoleh dari dana bagi hasil daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA).

³⁰UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pasal 16 (2); UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285-306.

DPRD dan sekretariat DPRD, kepala dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja, misalnya, pendidikan, kesehatan, dan fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan, dan modal serta pembangunan. Sedangkan pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah seperti sisa anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan penjualan aset daerah yang sahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembiayaan pokok.³¹

Dalam proses penyusunan RAPBD/APBD, menurut UU No. 17 Tahun 2003, dan UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah menetapkan prioritas dan platfon anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Landasan penyusunan RAPBD dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan kepada DPRD maksimal pertengahan bulan Juni. Berdasarkan prioritas dan platfon anggaran tersebut Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD tahun berikutnya. Raperda tentang APBD penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD pada bulan Oktober (minggu pertama) tahun sebelumnya untuk memperoleh persetujuan bersama. Raperda tentang APBD tersebut kemudian dibahas bersama DPRD dan

³¹Sultan Suhab, "Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah." *Analisis* 1, No. 2, 2004: 111-112; Bratakusumah dan Solihin, *op. cit.*, h. 212-214.

pemerintah daerah berdasarkan KUA serta prioritas dan platfon anggaran. Pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda tentang APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah maksimal dilakukan pada bulan November, yakni satu bulan dari pengusulan atau sebelum 1 bulan sebelum anggaran dilaksanakan. Atas dasar persetujuan DPRD, kepala daerah kemudian menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DASK).

Namun karena usul DPRD yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD, seperti asumsi kebijakan APBD tidak sesuai dengan perkembangan, keadaan sehingga harus terjadi pergeseran anggaran dan menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah harus mengajukan Raperda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. Batas waktu DPRD dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahap anggaran bersangkutan berakhir.³²

³²UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 18 dan 20; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310-319.

dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. SAB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Sedangkan SB adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.³³

Indikator-indikator tersebut, yakni indikator masukan dapat dipergunakan untuk mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Indikator keluaran dapat dipergunakan untuk mengukur hasil langsung yang dicapai dari keluaran suatu kegiatan. Indikator hasil dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan yang sangat ditentukan oleh efektif dan tidak efektifnya keluaran yang dicapai. Indikator manfaat dapat dipergunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator hasil. Sedangkan indikator dampak dapat dipergunakan untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator ini dapat terlihat dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.³⁴

Sedangkan prinsip dan norma anggaran yang dimaksud ialah penyusunannya harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang ditetapkan pemerintah. Prinsip dan norma pertama, yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tanggung jawab dan kinerja pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat, APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh masyarakat. Prinsip dan norma kedua, disiplin anggaran. Prinsip ini ditujukan

³³Suhab, *op. cit.*, h. 112; Bratakusumah dan Solihin, *op. cit.*, h. 214-215.

³⁴ Dadul Munir, *Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Samawa Center, 2003).

untuk kebutuhan masyarakat dan keseimbangan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan—yang disusun berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dan norma ketiga, yakni keadilan anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prinsip dan norma keempat, yakni efisiensi dan efektivitas anggaran. Prinsip ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi penggunaan anggaran untuk kepentingan seluruh masyarakat.³⁵

Dari uraian-uraian tersebut, dalam penyusunan APBD, pendekatan yang digunakan saat ini tampak mempergunakan anggaran publik pendekatan “new public management (NPM)”. Pendekatan NPM merupakan anti tesis dari sistem anggaran tradisional. Dikatakan demikian karena pendekatan ini lebih lebih berorientasi pada kinerja sementara anggaran tradisional tidak berorientasi pada kinerja. Terdapat tiga jenis pendekatan NPM, yakni: (1) anggaran kinerja (AK), (2) Zero Based Budgeting (ZBB), dan (3) Planning, Programming and Budgeting System (PPBS). AK ialah anggaran dengan pendekatan kinerja yang menekankan pada konsep nilai uang (*value for money*) dan pengawasan atas kinerja keluaran. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program. ZBB ialah anggaran untuk saat tahun penyusunan anggaran (tahun ini) tidak berpatokan pada anggaran tahun berlalu (satu tahun sebelumnya) namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Sedangkan PPBS

³⁵Ratnawati, “Gender Budget dalam APBD.” Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 298.

sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan formil ialah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Sedangkan peraturan perundang-undangan materiil ialah setiap peraturan dan ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan formil berbentuk Undang-Undang, sedangkan materiil berbentuk, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Dengan demikian, definisi operasional legislasi nasional ialah peraturan perundang-undangan formil dan materiil yang diundangkan oleh perlengkapan Negara Republik Indonesia, yakni presiden dan jajarannya, dan diundangkan sebagaimana mestinya yang berbentuk Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.

b. Aktor Pemeran Serta

Aktor pemeran serta (*actors*) adalah individu-individu atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Aktor-aktor ialah kepala daerah, Tim Anggaran dan DPRD-Komisi Legislasi, partai politik, kelompok penekan, dan masyarakat secara individual. Dengan demikian definisi operasional aktor pemeran serta ialah kepala daerah, Tim Anggaran dan DPRD-Komisi Legislasi, partai politik, kelompok penekan, dan masyarakat secara individual yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

c. Nilai-nilai

Nilai-nilai (*values*) adalah konsep umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil, dan dalam lingkup lebih spesifik, terwujud dalam seperangkat aturan yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan diwujudkan. Nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik ialah nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Dengan demikian, definisi operasional nilai-nilai ialah nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi yang diinginkan dan yang akan diwujudkan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

d. Konteks/Lingkungan

Konteks atau lingkungan (*context or environment*) ialah sistem politik (lingkungan) yang terdiri dari sub-sistem di dalamnya yang melatarbelakangi atau menjadi tempat beroperasinya proses pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem ini terdapat interaksi antarsub-sistem yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan publik. Sub-sistem-sub-sistem tersebut yang terpenting memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan adalah budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, definisi operasional konteks/lingkungan ialah sistem politik (lingkungan) yang meliputi budaya dan sosial-ekonomi yang melatarbelakangi atau menjadi tempat beroperasinya proses pembuatan kebijakan publik.

hipotesis pokok, dan (3) hipotesis khusus. Hipotesis inti merupakan jawaban sementara terhadap inti masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dari hipotesis ini kemudian diturunkan kepada sejumlah hipotesis pokok, dan hipotesis ini selanjutnya diturunkan kepada sejumlah hipotesis khusus.

Berkaitan dengan dengan pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka hipotesis inti yang diajukan dalam penelitian ini ialah: “diduga legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.”

Untuk tujuan penelitian hipotesis tersebut—sesuai dengan kaidah perumusan hipotesis dalam penelitian sosial—dapat diuraikan sebagai berikut:

H_o = diduga legislasi nasional, aktor pemeran : $H_o: \beta_k = 0$
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan
tidak mempengaruhi terhadap proses
pembuatan Perda tentang APBD di
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = diduga legislasi nasional, aktor pemeran : $H_a: \beta_k \neq 0$,
serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan untuk $k = 1, 2, \dots$,
mempengaruhi terhadap proses pembuatan $p-1$
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, hipotesis ini diterima pada tingkat kesalahan 5 persen (0,05), jika faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis ini tersebut dibutuhkan pengujian hipotesis pokok yang diturunkan dari proposisi teoritis yang telah dipaparkan dalam kerangka teori di atas. Dari kerangka teori tersebut, ada empat hipotesis pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Keempat hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:

(1) H_0 = legislasi nasional tidak mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = legislasi nasional mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(2) H_0 = aktor pemeran serta tidak mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = aktor pemeran serta mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(3) H_0 = nilai-nilai tidak mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = nilai-nilai mempengaruhi terhadap proses pembuatan

Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(4) H_o = konteks/lingkungan tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = konteks/lingkungan mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari hipotesis pokok pertama, diturunkan empat hipotesis khusus. Keempat hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:

(1) H_o = UU yang mengatur/berkaitan dengan APBD tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = UU yang mengatur/berkaitan dengan APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(2) H_o = Perpu yang mengatur tentang APBD tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = Perpu yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = Perpes/Kepres yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

(1) H₀ = gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

[illegible]

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(2) H_0 = DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(3) H_0 = kelompok penekan tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = kelompok penekan mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(4) H_0 = partai politik tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = partai politik mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

(5) H_0 = masyarakat tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur

H_a = nilai-nilai kebijakan mempengaruhi terhadap proses
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur

(5) H_o = ideologi tidak mempengaruhi terhadap proses
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur

H_a = ideologi mempengaruhi terhadap proses pembentukan
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur

Sedangkan dari hipotesis pokok keempat diturunkan dua hipotesis khusus. Kedua hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:

(1) H_o = budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi
Jawa Timur tidak mempengaruhi terhadap proses
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur

H_a = budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi
Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses
pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur

(2) H_o = kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur
tidak mempengaruhi terhadap proses pembentukan
Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

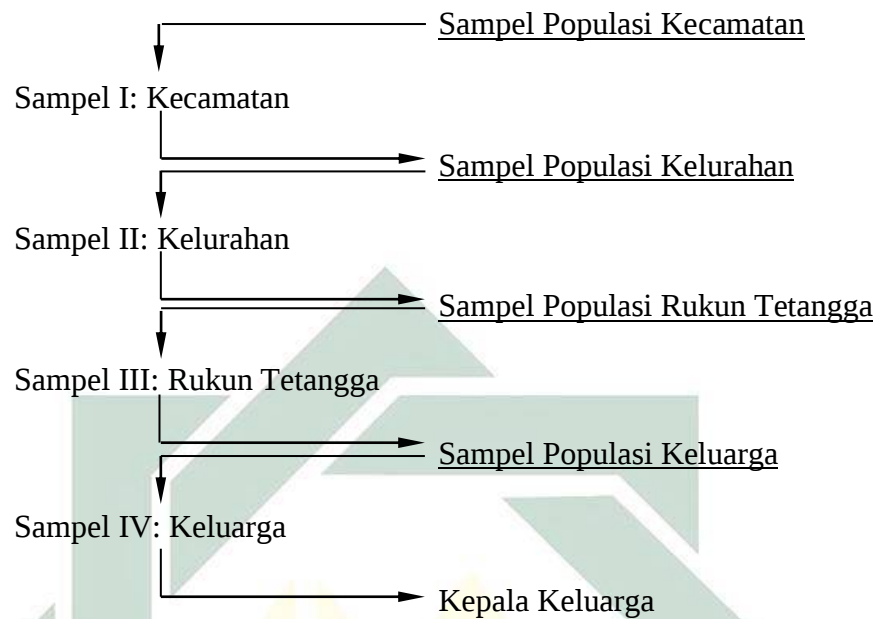
Penelitian ini berdasarkan dari segi pengumpulan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan di sini adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala sosial yang diteliti, berusaha memahami gejala-gejala yang tidak diramalkan sebelumnya, dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum bersifat sementara yang berguna untuk mendorong pengamatan lebih lanjut.¹ Berdasarkan dari segi tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi-kuantitatif (*explanative quantitative*) yang dikombinasi dengan deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative*). Penelitian eksplanasi atau uji yang dimaksudkan pada penelitian ini, adalah penelitian dalam rangka menguji satu atau dua variabel yang telah dirumuskan secara tepat dalam masalah penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif yang dimaksudkan pada penelitian ini, adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan realitas sosial se-lengkap mungkin, baik itu situasi, setting sosial maupun hubungan sosial.²

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ialah Perda tentang APBD, legislasi nasional (aturan perundang-undangan), aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan. Posisi variabel-variabel tersebut, Perda tentang APBD ditetapkan sebagai variabel terikat (Y), legislasi nasional sebagai

¹ Earl R. Babbie, *The Practices of Social Research*, second edition (Belmont, California: Wardsworth Publishing Company, 1979), h. 205-206.

²Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods*, Fourth Edition (Boston: Allyn and Bacon, 2000), h. 22; Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 34.

Gambar 3.1
Tahapan Penarikan Sampel



Sumber: diadaptasi dari Mantra dan Kasto, dikutip dalam Ida Bagoes Mantra dan Kasto, “Penentuan Sampel,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 166-167.

Penarikan sampel penelitian dari setiap populasi mengikuti rumus Slovin.⁵

Rumusnya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N_{\theta}^2}$$

Keterangan: n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = nilai kritis yang diinginkan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur—yakni di kantor Pemerintahan Daerah (Pemprov dan DPRD) dan semua Rukun Tetangga

⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65.

(RT) Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini, dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan daerah yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, pemilihan terhadap kantor Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur serta semua RT Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: pertama kantor Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur memberikan gambaran representatif tentang peranan pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kedua, RT-RT tersebut memberikan gambaran representatif tentang keterlibatan masyarakat terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, lingkungan Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan RT-RT merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh atau konteks lahirnya Perda tentang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan penelitian ini berdasarkan sumbernya ada dua, yakni: data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digali adalah tentang dokumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pembuatan Perda tentang APBD. Data ini digali dari dokumen Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, koran harian lokal dan nasional, buku/literatur yang mengulas dan membahas tentang tema tersebut dan naskah penelitian sebelumnya dimana fokus penelitiannya berkaitan dengan tema penelitian ini.

dipergunakan untuk memahami secara lebih holistik tentang struktur kesadaran subjek penelitian terhadap objek penelitian. Tujuan yang diharapkan peneliti dari wawancara mendalam ini adalah untuk memahami data baik ekstrintik dan intrinsik tentang objek penelitian.⁸

kuantitatif⁹ dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS Statistics for Windows versi 17.0. Langkah-langkah teknis pengolahan data penelitian ini, yakni sebagai berikut: editing, coding, dan tabulating. Editing dipergunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari responden guna menjaga kemungkinan adanya kesalahan dalam memasukkan data.¹⁰ Coding dipergunakan untuk memberikan kode atau tanda tertentu dari data yang diperoleh dengan cara memberikan skor pada setiap jawaban responden.¹¹ Pemberian skor jawaban responden tersebut menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala komulatif—yang dapat dipergunakan untuk mengukur kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, atau sering disebut dengan istilah “atribut universal”. Langkah-langkah teknisnya: variabel yang diukur dijabarkan menjadi sub-variabel, sub-variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut menjadi titik-tolak untuk memberi item instrumen berupa pertanyaan atas pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk-bentuk pertanyaan, yang diungkapkan dengan kata-kata: (a) tidak berperan/dilibatkan (nilai 1), (b) kurang berperan/dilibatkan (nilai 2), (c) kadang-kadang berperan/terlibat (nilai 3), (d) berperan/terlibat (nilai 4), dan (e) sangat berperan/terlibat (nilai 5). Tabulating dipergunakan dalam rangka memasukkan data yang telah diberi kode atau tanda

⁹Sofian Effendi dan Chris Manning, “Prinsip-Prinsip Analisa Data,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 272-276.

¹⁰Tadjuddin N. Effendi *et al.*, “Pengolahan Data,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 254.

¹¹Neuman, *op. cit.*, h. 314.

Teknik Penelitian Masyarakat, Cetakan Kedua (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 18.

Secara umum ada enam alasan kedua pengujian tersebut dipergunakan dalam penelitian ini. Keenam alasan tersebut, yakni: (1) agar data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, (2) agar data yang diperoleh dapat dipercaya, (3) agar data yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, (4) agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, (5) agar data yang diperoleh dapat menjadi bahan informasi untuk mendeskripsikan fokus penelitian, dan (6) penggalan data yang dilakukan efektif dan efisien.

Setelah data-data diolah, kemudian data skala ordinal yang diperoleh dari distribusi jawaban responden pada kuesioner ditransformasikan (dirubah) peneliti ke dalam skala interval menggunakan metode suksesif interval (*method successive interval*) dengan menggunakan komputer program XLSTAT (Win) versi 2015.1. Tujuannya agar analisis penelitian regresi linier berganda yang dipergunakan penelitian sesuai dengan persyaratan prosedur operasional model regresi ganda yang mengharuskan datanya berskala interval dan rasio.¹⁹

Setelah data ditransformasikan, kemudian dianalisis dengan model regresi linier berganda (disingkat regresi ganda) menggunakan komputer program SPSS. Model regresi ganda ini dipergunakan untuk menganalisa pengaruh aturan perundang-undangan, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya untuk memperkuat kesimpulan tentang hubungan

¹⁹Asdar and Badrullah, "Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematics Education Studies)," *International Journal of Social Science and Humanities Research* 4, Issue. 2 (April-June, 2016): 358-361.

antarvariabel penelitian, peneliti menggunakan tes statistik asumsi klasik, tes regresi ganda, uji F, dan uji t^{20} dengan menggunakan komputer program SPSS.

Pengujian asumsi klasik (*classical assumption test*) menggunakan model persamaan regresi ganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares: OLS*) untuk mengestimasi parameter/kesalahan asumsi model regresi ganda tersebut. Model regresi ganda (*multiple regression model*) diestimasi baik menjelaskan hubungan fungsional antarvariabel penelitian jika memenuhi uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang dilihat adalah asumsi kesalahan penelitian menggunakan uji: (1) asumsi distribusi normal (normalitas), (2) asumsi bebas kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas.

Pengujian normalitas (*normality test*) residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan uji *goodness of fit test* tipe Kolmogorov-Smirnov dan regresi linier ganda model analisis *plot*. Uji asumsi multikolinieritas (*multicollinearity assumption test*) dilakukan untuk mengetahui penaksir *OLS* tidak bias, linier, dan terbaik (*best linier unbiased estimator: BLUE*) menjelaskan korelasi—bisa sempurna (*perfect*) dan kurang sempurna (*imperfect*)—variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mendeteksi multikolinieritas menggunakan analisis regresi ganda *OLS* pada nilai *variance inflation factor (VIF)* dan *tolerance (TOL)* dengan ketentuan nilai $VIF > 5/10$ dan $Tol = 1$. Sedangkan uji asumsi heteroskedastisitas (*heteroscedasticity assumption test*) dilakukan untuk mengetahui penaksir *OLS* yang *BLUE* menghasilkan penjelasan yang *BLUE* korelasi antarvariabel penelitian atau

²⁰Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi* (Yogyakarta: BPFE. 2000), h. 57 dan 128.

mengetahui indikasi varians residual tidak homogen yang menghasilkan nilai taksiran penelitian tidak berdayaguna (*efisien*). Uji asumsi heterokedastisitas penelitian menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan regresi linier ganda metode *scatter-plot* (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi variabel terikat yang telah distandarisasi.

Regresi ganda dipergunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Rumus model regresi ganda ini adalah sebagai berikut:

$$y_t = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y_t	=	variabel bebas
$X_1, X_2, X_3, \dots X_n$	=	variabel terikat
e	=	kesalahan (<i>error term</i>)
b_0	=	Konstanta
$b_1, b_2, b_3, \dots b_n$	=	koefisien variabel bebas

Uji F (F_{-test}) dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh simultan/serentak variabel aturan perundang-undangan (legislasi nasional), aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumus uji F ini adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2(n - k - 1))}$$

Keterangan: R^2 = koefisien regresi
 n = jumlah sampel
 k = jumlah variabel bebas

Uji t (*t-test*) dipergunakan untuk melihat pengaruh parsial/individual variabel aturan perundang-undangan (legislasi nasional), aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumus uji t ini adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai kredibilitas (*credibility*) data dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan analisa dan interpretasi terdapat data, peneliti mempergunakan strategi triangulasi (*triangulation strategy*). Strategi triangulasi ini merupakan strategi multi-metode (*multi-method*), multi-model (*multi-trait*), dan multi referensi (*multi-reference*) untuk melihat ketepatan posisi objek penelitian, dan multi-persepsi (*multi-perceive*) untuk mengklasifikasikan maksud data dan untuk melakukan deskripsi dan interpretasi data.²⁴ Strategi triangulasi tersebut yang digunakan ialah: (1) triangulasi pengukuran dan sumber, (2) triangulasi pengamat, (3) triangulasi teori, dan (4) triangulasi metode.²⁵

Triangulasi pengukuran (*triangulation of measures*) dan sumber digunakan untuk membandingkan dan memeriksa kembali data-data penelitian dengan menggunakan instrumen waktu yang berbeda. Langkah-langkah teknisnya: (1) membandingkan pendapat nara sumber dari sumber data yang satu dengan yang lain, (2) membandingkan pendapat nara sumber antara waktu tertentu dengan waktu yang lain, dan (3) membandingkan antarpendapat dari nara sumber yang berbeda. Triangulasi pengamat (*triangulation of observers*) digunakan untuk mengatur pengamatan terhadap pelbagai sumber data dari pelbagai perspektif. Triangulasi teori (*triangulation of theory*) digunakan dalam menginterpretasi data dengan menggunakan perspektif teoritis tertentu. Triangulasi metode (*triangulation of method*) digunakan untuk memeriksa sumber-sumber data dengan metode yang sama.²⁶

²⁴Isadora Newman and Caroly R. Benz, *Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum* (Southern Illinois University Press, 1998), h. 83; Robert E. Stake, "Case Studies," in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: Sage, 1994), h. 241; Neuman, *op. cit.*, h. 124.

²⁵*Ibid.*, h. 124-125.

²⁶*Ibid.*; dan Moleong, *op. cit.*, h. 178.

Untuk menjamin keteralihan (*transferability*) data, penelitian ini mempergunakan teknik uraian rinci (*thick deskription*). Tujuannya agar penelitian ini dapat melaporkan hasil penelitian secermat mungkin antara konteks data penelitian dengan fokus penelitian. Sedangkan untuk menjamin keberantungan dan kepastian (*dependability*) data penelitian menggunakan teknik pemeriksaan (*auditing*) keabsahan data. Dengan teknik ini, penelitian ini diharapkan mencapai derajat kehandalan, baik dari proses penelitian hingga data penelitian yang diperoleh. Langkah-langkah teknisnya: (1) pra-entri data atau tahap penetapan pemeriksaan data, (2) penetapan data-data yang diperiksa, dan (3) penentuan keabsahan data.²⁷

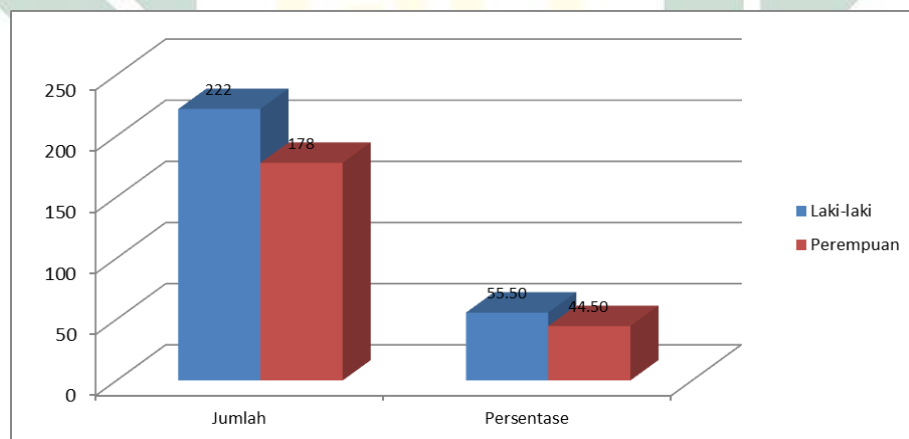
²⁷*Ibid.*, h. 183-184.

pertimbangan tersebut, peneliti menetapkan sebagai informan penelitian dengan tujuan untuk menggali atau mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam tentang proses pembuatan Perda APBD di Provinsi Jawa Timur.

B. Profil Responden dan Informan

Profil responden penelitian, berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar atau mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Responden laki-laki mencapai sebanyak 222 (55,50%) orang dan sisanya responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 178 (44,50%) orang.

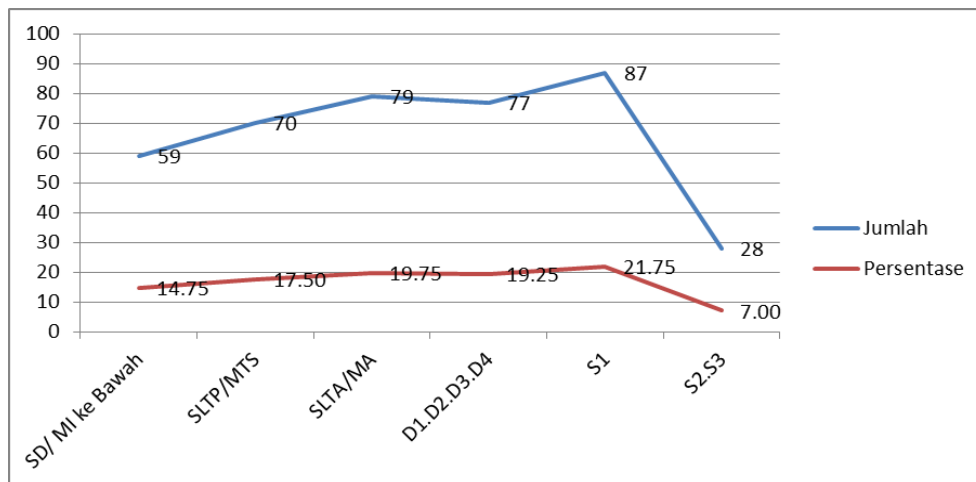
Gambar 4.1
Responden Menurut Jenis Kelamin



Sumber: diolah dari data primer

Menurut tingkat pendidikannya, responden penelitian paling banyak berpendidikan sarjana (S-1) yang mencapai 87 (21,25%) orang dan sisanya berpendidikan lain. Responden berpendidikan SD/MI ke bawah mencapai 59 (14,75%) orang, SLTP/MTs sebanyak 70 (17,50%) orang, SLTA/MA sebanyak 79 (19,75%) orang, D1/D2/D3/D4 sebanyak 77 (19,25%) orang, dan S-2/S-3 sebanyak 28 (7,00%) orang.

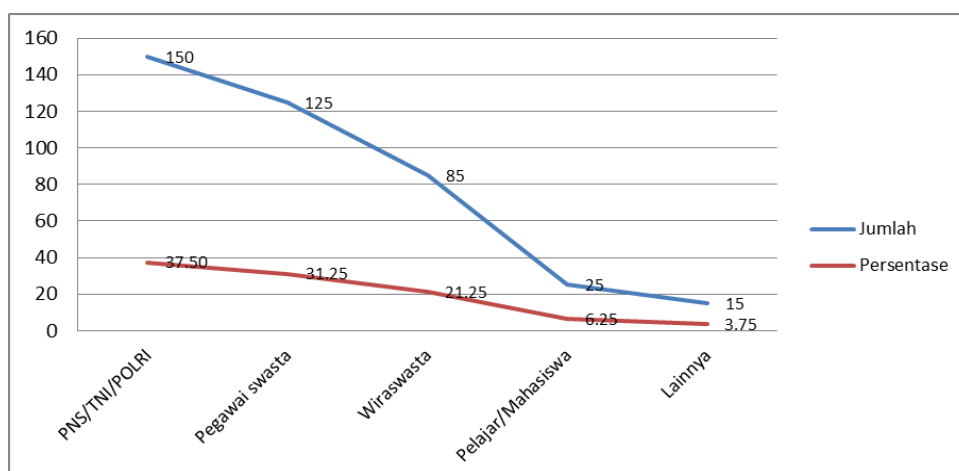
Gambar 4.2
Responden Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: diolah dari data primer

Berdasarkan pekerjaannya, responden sebagian besar bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, yakni mencapai 150 (37,50%) orang dan sisanya bekerja di sector/lembaga lain. Responden sebagai yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 125 (31,25%) orang, bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 85 (21,25%) orang, statusnya mahasiswa/pelajar sebanyak 25 (6,25%) orang, dan bekerja lainnya sebanyak 15 (3,75%) orang.

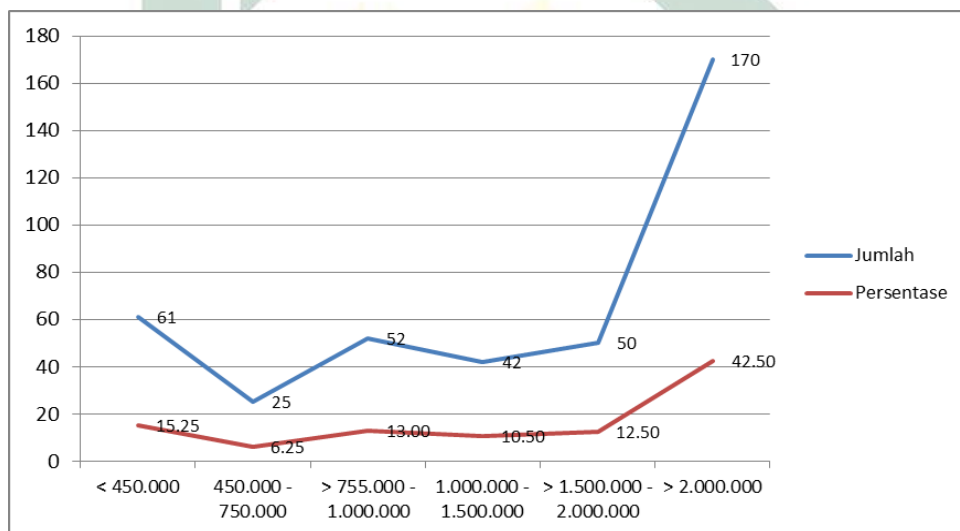
Gambar 4.3
Responden Menurut Jenis Pekerjaan



Sumber: diolah dari data primer

Menurut pendapatannya, responden sebagian besar memiliki pendapatan Rp2.000.000 per bulan, yang mencapai 170 (17,50%) orang dan sisanya responden dengan pendapatannya lebih rendah. Responden pendapatan per bulan > Rp400.000 sebanyak 61 (15,25%) orang, pendapatan Rp450.000-Rp750.000 per bulan sebanyak 25 (6,25%) orang, pendapatan Rp755.000-Rp1.000.000 per bulan sebanyak 52 (13,00%) orang, pendapatan Rp1.000.000-Rp1.500.000 per bulan sebanyak 42 (10,50%) orang, dan pendapatan Rp1.500.000-Rp2.000.000 per bulan sebanyak 50 (12,50%) orang.

Gambar 4.4
Responden Menurut Pendapatan Per Bulan



Sumber: diolah dari data primer

Sedangkan profil informan penelitian berdasarkan pekerjaannya: 1 (satu) orang bekerja sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan masing-masing 1 (satu) orang pengurus DPW partai politik Provinsi Jawa Timur, akademisi Provinsi Jawa Timur, dan aktivis LSM Provinsi Jawa Timur.

uji validitasnya menunjukkan: (1) pertanyaan 1 sebesar 0,659, (2) pertanyaan 2 sebesar 0,684, (3) pertanyaan 3 sebesar 0,710, (4) pertanyaan 4 sebesar 0,765, (5) pertanyaan 5 sebesar 0,807, (6) pertanyaan 6 sebesar 0,803, (7) pertanyaan 7 sebesar 0,752, (8) pertanyaan 8 sebesar 0,617, (9) pertanyaan 9 sebesar 0,639, (10) pertanyaan 10 sebesar 0,634, (11) pertanyaan 11 sebesar 0,721, (12) pertanyaan 12 sebesar 0,784, (13) pertanyaan 13 sebesar 0,612, (14) pertanyaan 14 sebesar 0,712, (15) pertanyaan 15 sebesar 0,896, (16) pertanyaan 16 sebesar 0,908, (17) pertanyaan 17 sebesar 0,670, (18) pertanyaan 18 sebesar 0,685, (19) pertanyaan 19 sebesar 0,543, (20) pertanyaan 20 sebesar 0,639, (21) pertanyaan 21 sebesar 0,851, dan (22) pertanyaan 22 sebesar 0,778.

Hasil uji validitas pada pertanyaan 1-22 nilai $r_{hitung} > r_{tabel} (0,320)$ sehingga semua item pertanyaan tersebut adalah valid. Hal ini karena nilai korelasinya semua pertanyaan kuesioner berada di atas nilai batas suatu pertanyaan kuesioner yang ditetapkan diterima atau dapat digunakan penelitian ini. Dengan kata lain, artinya semua pertanyaan kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

D. Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan menggunakan rumus *alpha cronbach*. Pengambilan keputusan hasil uji tersebut berdasarkan pada: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,320 untuk $df = 40 - 2 = 38$; $\alpha = 0,05$ maka instrumen penelitian reliabel, dan jika sebaliknya maka instrumen penelitian tidak reliabel.

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Reliabilitas	Cronbach's α	Reliabilitas
			r _{hitung} > r _{tabel}		Cronbach's α > r _{tabel}
1	0,908	0,320	Reliabel	0,909	Reliabel
2	0,908	0,320			
3	0,907	0,320			
4	0,908	0,320			
5	0,903	0,320			
6	0,903	0,320			
7	0,906	0,320			
8	0,909	0,320			
9	0,906	0,320			
10	0,908	0,320			
11	0,904	0,320			
12	0,905	0,320			
13	0,908	0,320			
14	0,903	0,320			
15	0,900	0,320			
16	0,903	0,320			
17	0,904	0,320			
18	0,905	0,320			
19	0,908	0,320			
20	0,905	0,320			
21	0,900	0,320			
22	0,902	0,320			

Sumber: diolah kembali dari data primer

Berdasarkan data hasil penghitungan uji reliabilitas (*reliability test*) yang disajikan dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai *cronbach's α* (*alpha*) sebesar $0,909 > r_{\text{tabel } (0,320)}$ memperlihatkan bahwa instrumen penelitian (semua item pertanyaan kuesioner) yang digunakan penelitian ini adalah reliabel. Berdasarkan nilai *cronbach's α*, mengikuti kategorisasi Sutrisno Hadi seperti yang dijelaskan pada Bab III, tingkat reliabilitas instrumen penelitian ini masuk kategori sangat tinggi, yakni berada di nilai 0,800-1,000.¹ Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai $r_{\text{hitung-nya}} > r_{\text{tabel } (0,320)}$ yang mana artinya instrumen penelitian ini

¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 216.

adalah reliabel atau handal dalam pengumpulan data penelitian dan pengujian hipotesis penelitian ini.

E. Catatan Lapangan

Berdasarkan observasi/pengamatan surveyor sebagai catatan lapangan (*field note*) pada saat uji coba instrumen penelitian pada 40 responden tersebut—yang ditujukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian—mayoritas memperlihatkan sikap yang ramah dan terbuka dan kehadiran serta pengaruh orang ketiga tidak ada. Selengkapnya data pengamatan/catatan lapangan surveyor uji coba instrumen penelitian ialah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sikap Responden

Kriteria	Jumlah	Persentase
Ramah dan terbuka	34	85,00
Kurang ramah dan terbuka	5	12,50
Tidak ramah dan terbuka	1	2,50
Jumlah	40	100

Sumber: diolah kembali dari data primer

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor (pengumpul data lapangan) sikap responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang diajukan surveyor secara umum adalah ramah. Datanya sebanyak 34 (85,00%) responden bersikap ramah dan terbuka, 5 (12,50%) responden bersikap kurang ramah dan terbuka, dan sisanya 1 (2,50%) responden bersikap tidak ramah dan terbuka.

Tabel 4.4
Kehadiran Orang Ketiga

Kriteria	Jumlah	Persentase
Ada	39	97,50

Kriteria	Jumlah	Persentase
Tidak ada	1	2,50
Jumlah	40	100

Sumber: diolah kembali dari data primer

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor kehadiran orang ketiga pada saat responden menjawab pertanyaan kuesioner, sebanyak 39 (97,50%) responden tidak ada pihak ketiga dan sisanya 1 (2,50%) responden ada pihak ketiga.

Tabel 4.5
Pengaruh Orang Ketiga

Kriteria	Jumlah	Persentase
Ada	40	100,00
Tidak ada	1	0,00
Jumlah	40	100,00

Sumber: diolah kembali dari data primer

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor pengaruh orang ketiga kepada responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner tidak ada. Artinya, semuanya jawaban responden sesuai dengan apa yang dialami/diketahui oleh responden.

Tabel 4.6
Tingkat Kesulitan Pertanyaan

Kriteria	Pertanyaan	Jumlah	Persentase
Sulit	1, 2, 3, 4, dan 5	5	22,73
Sedang	11 dan 16	2	9,09
Mudah	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, dan 22	15	68,18
Jumlah		22	100

Sumber: diolah kembali dari data primer

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menurut pengamatan surveyor pertanyaan yang sulit dijawab responden sebanyak 5 (22,73%) pertanyaan,

pertanyaan yang sedang/cukup sulit dijawab responden sebanyak 2 (9,09%) pertanyaan, dan pertanyaan yang mudah dijawab responden sebanyak 15 (68,18%) pertanyaan. Dengan demikian, artinya semua pertanyaan di dalam kuesioner penelitian mudah dijawab oleh sebagian besar responden, kecuali pertanyaan terkait dengan filosofi dan nilai budaya dan sosial-ekonomi.

F. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dipergunakan penelitian untuk mengestimasi kesalahan asumsi/parameter model persamaan regresi linier ganda metode *OLS* (metode kuadrat terkecil). Model regresi ganda ini dapat dikatakan baik menjelaskan hubungan fungsional (baik simultan dan parsial) variabel legislasi nasional (aturan perundang-undangan) (X_1), aktor pemeran serta (X_2), nilai-nilai (X_3), dan konteks/lingkungan (X_4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD (Y) di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (disingkat Perda APBD), jika memenuhi uji asumsi klasik: (1) uji distribusi normal, (2) asumsi bebas kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Hasil penghitungan uji normalitas menggunakan uji *goodness of fit test* tipe Kolmogorov-Smirnov dan regresi model analisis *plot* menunjukkan data penelitian berdistribusi normal. Data hasil pengujiannya uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

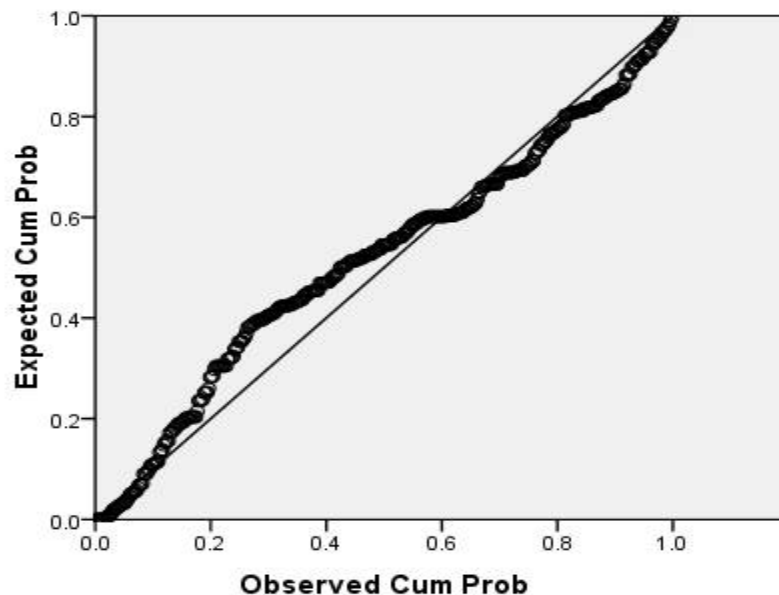
Tabel 4.7
Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel	Statistik	df	Sig
Legislasi Nasional (X1)	0,101	400	0,069
Aktor Pemeran Serta (X2)	0,069		0,073
Nilai-nilai (X3)	0,090		0,067
Konteks/Lingkungan (X3)	0,156		0,066
Perda APBD (Y)	0,103		0,065

Berdasarkan data hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa X_1 : $D = D_{hitung} 0,101$ dan nilai P sebesar $0,069$ ($p < 0,05$), X_2 : $D = D_{hitung} 0,069$ dan nilai P sebesar $0,073$ ($p < 0,05$), X_3 : $D = D_{hitung} 0,090$ dan nilai P sebesar $0,067$ ($p < 0,05$), X_4 : $D = D_{hitung} 0,156$ dan nilai P sebesar $0,066$ ($p < 0,05$), dan Y : $D = D_{hitung} 0,103$ dan nilai P sebesar $0,065$ ($p < 0,05$). Data nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 4.7 Uji Normalitas

Dependent Variable: P_APBD_Y



Hasil uji normalitas pada data nilai residual dengan model signifikansi (p) $0,000 < (berada\ di\ bawah)\ 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Pengujian data dilakukan juga dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik di atas. Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel Perda APBD (Y) berdasarkan masukan variabel legislasi nasional/aturan perundang-undangan (X_1), aktor pemeran serta (X_2), nilai-nilai (X_3), dan konteks/lingkungan (X_4).

2. Multikolinieritas

Hasil uji asumsi multikolinieritas diperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Asumsi Multikolinieritas^a

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Legislasi Nasional (X_1)	0,391	2,557
Aktor Pemeran Serta (X_2)	0,351	2,852
Nilai-nilai (X_3)	0,519	1,928
Konteks/Lingkungan (X_4)	0.480	2,082

Keterangan: a = koefisien: Perda APBD (Y)

Dari hasil uji asumsi multikolinieritas tersebut, seperti yang ada dalam tabel di atas, memperlihatkan bahwa nilai *VIF* variabel legislasi nasional 2,557, aktor pemeran serta 2,852, nilai-nilai 1,928, dan konteks/lingkungan 2,082 dan nilai *TOL* variabel legislasi nasional 0,391, aktor pemeran serta 0,351, nilai-nilai 0,519, dan konteks/lingkungan 0,480. Berdasarkan data tersebut dapat

disimpulkan bahwa nilai *VIF* semua variabel < 10 atau 5 dan nilai *TOL* $\neq 1$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini bebas dari multikolinieritas.

3. Heteroskedastisitas

Moment diperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Asumsi Heterokedastisitas^a

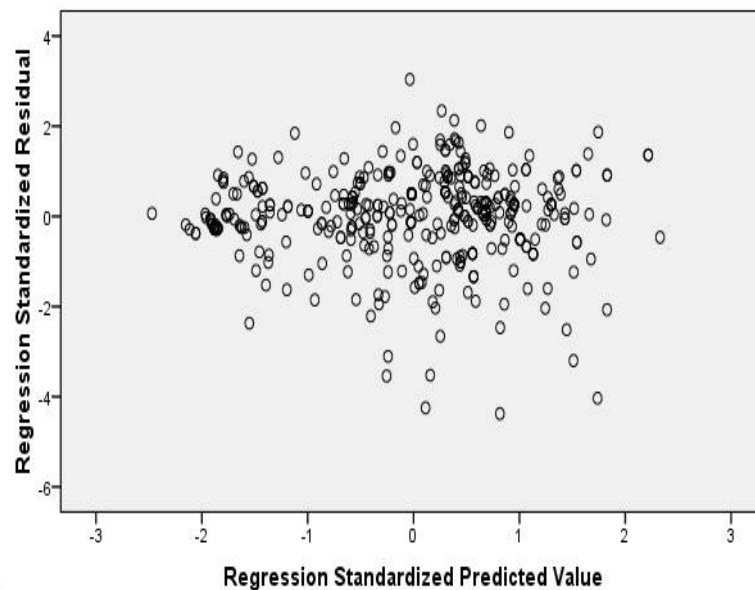
Variabel	Korelasi Pearson	Sig. (2 Tailed)	N
Legislasi Nasional (X_1)	0,676	0,000	400
Aktor Pemeran Serta (X_2)	0,768	0,000	400
Nilai-nilai (X_3)	0,894	0,000	400
Konteks/Lingkungan (X_4)	0,715	0,000	400

Keterangan: a = koefisien: Perda APBD (Y)

Berdasarkan hasil penghitungan korelasi Pearson Product Moment diperoleh data bahwa variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap proses pembentukan Perda APBD sebagai variabel terikat. Koefisien korelasinya terhadap variabel terikat Perda APBD: variabel legislasi nasional 0,676, aktor pemeran serta 0,768, nilai-nilai 0,894, dan konteks/lingkungan 0,715. Artinya, dengan demikian, pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa varian dari residual homogen atau tidak terdapat heterokedastisitas.

Sedangkan berdasarkan uji heterokedastisitas dengan model regresi linier ganda dengan menggunakan analisis gambar grafik *scatter-plot* diperoleh data penelitian sebagai berikut:

Gambar 4.8
Uji Heterokedastisitas
Dependent Variable: P_APB_D_Y



Berdasarkan dari gambar grafik *scatter-plot* tersebut menunjukkan bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Jadi, artinya asumsi klasik tentang heterokedastisitas dalam model regresi ini terpenuhi, yakni terbebas dari heterokedastisitas.

G. Analisa Data Penelitian

Analisa data penelitian menggunakan uji regresi ganda dengan nilai kritis/tingkat kesalahan pada level 0,05 (derajat kepercayaan 95%), N (sampel) = 400, dan df (*degree of freedom*) = 339 (df = k-1 = 400-1 = 339). Uji statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis inti, pokok, dan khusus yang diajukan penelitian. Hasil uji pada hipotesis-hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Jawa Timur bernilai positif/signifikan yang sangat tinggi. Datanya ditunjukkan nilai koefisien regresi (R) sebesar 0,936,

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi
(Berdasarkan Nilai Adjusted R Square)

Koefisein Determinasi	Keterangan
0,800-1,000	Sangat tinggi
0,600-0,799	Tinggi
0,400-0,599	Cukup
0,200-0,399	Rendah
0,000-0,199	Sangat Rendah

- (3) Variasi/proporsi pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi. Datanya ditunjukkan nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,875 atau 87,5% dan sisanya sebesar 12,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini,
- (4) Persamaan model regresi yang menjelaskan pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:
- $$Y = 0,068 + 0,026 X_1 + 0,235 X_2 + 0,733 X_3 + 0,448 X_4.$$
- Nilai konstanta 0,068 menunjukkan besarnya pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, jika

variabel-variabel bebas tersebut sama dengan 0, maka dapat diprediksi variabel terikat sebesar 0,068, dan

(5) Pengaruh secara parsial (individual) variabel legislasi nasional (X_1), aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, kecuali variabel legislasi nasional yang tidak signifikan.

Secara komprehensif deskripsi data penelitian analisis model regresi ganda pengaruh simultan dan parsial variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

2. Hipotesis Inti

Berdasarkan uji keterhandalan model (uji F) atau uji simultan pengaruh variabel legislasi nasional (X_1), aktor pemeran serta (X_2), nilai-nilai (X_3), dan konteks/lingkungan (X_4) terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Keterandalan Model (Uji F/Simultan)

Variabel	Koefisien Regresi	Koefisien Determinasi	F_{hitung}	F_{tabel}	Nilai P
Variabel legislasi nasional (X ₁), aktor pemeran serta (X ₂), nilai-nilai (X ₃), dan konteks/linkungan (X ₄)	0,936	0,875	699,431	2,394	0,000

Keterangan: variabel terikat: Perda APBD (Y), df = 339 dan nilai kritis $\alpha = 5\%$ (0,05)

Hasil uji F (F_{-test}) nilai (perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) $F_{hitung} (699,431) > F_{tabel} (2,394)$ dan nilai probabilitasnya $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$. Dengan demikian, hipotesis inti penelitian ini: H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah positif/signifikan.

Rentang pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi. Datanya ditunjukkan nilai R (*correlation coefficient*) sebesar 0,936. Hal ini diketahui dari nilai R^2 -nya (*coefficient of determination*) sebesar 0,875, yang memperlihatkan variasi/proporsi (tingkat) pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 87,5% dan sisanya 12,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam model regresi ganda penelitian ini.

3. Hipotesis Pokok

Berdasarkan uji koefisien regresi (uji t) atau uji parsial variasi/proporsi pengaruh masing-masing variabel legislasi nasional (X_1), aktor pemeran serta (X_2), nilai-nilai (X_3), dan konteks/lingkungan (X_4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diperoleh data sebagai berikut:

Menurut Andi²,

“proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dasarnya berdasarkan pada UU, PP, Perpres, dan Permen terkait pembentukan Perda APBD. Oleh karena itu, mungkin, disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur, LHP atas LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari BPK, dan menurut gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, persetujuan Perda APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.”³

Sinergis dengan Andi, Suhandoyo dan Rofik juga mengatakan demikian. Suhandoyo⁴ mengatakan,

“proses pembuatan di Jawa Timur dilakukan secara wajar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga dalam pembahasan dan peseretuannya lancar mayoritas lancar di rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.”⁵

²Pejabat senior di salah satu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang namanya diminta tidak dipublikasikan/disamarkan.

³Wawancara pada hari Minggu pada 7 Agustus 2016 di Surabaya.

⁴Ir. H. Suhandoyo, S.P (dalam penelitian ini disebut Suhandoyo tanpa gelar) adalah anggota Komisi C (Komisi Keuangan) dan anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jatim X (Kabupaten Gresik dan Lamongan) DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019.

⁵Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya.

“seringkali dalam proses sampai dengan pengesahan/diundangkannya Perda APBD Jawa Timur menurut pandangan sebagian masyarakat ada isinya tidak sesuai/selaras dengan semangat legislasi nasional yang menjadi asas pembentukannya.”¹³

¹³Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Surabaya.

“pemerintah (daerah), anggota DPRD, partai, ormas, dan LSM dapat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD. Peran pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai penyusun dan pengabsah Perda APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran masyarakat adalah ikut terlibat dalam proses pembuatannya yang juga diatur dalam aturan perundang-undangan. Mekanismenya dapat dilakukan melalui kegiatan audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa reses pada bulan April, Agustus, dan November, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi Jawa Timur.”¹⁵

Sedangkan menurut Rofik,

“semua kalangan terkait dapat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Jawa Timur. Hal ini karena sudah ada ketentuan hukumnya. Kami sendiri (DPRD) bisa sebagai penyusun dan pengabsah Perda APBD, namun untuk Perda ini kami tidak pernah/mungkin melakukan inisiatif pengusulan Perda APBD. Nah, pada proses pembuatan ini masyarakat bisa ikut terlibat, yakni melalui kegiatan audiensi, berkirim surat, rekomendasi penelitian, atau kunjungan anggota DPRD langsung kepada masyarakat pada masa reses dan kunjungan kerja ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan masalah masyarakat.”¹⁶

Namun, berbeda dengan pendapat Agus Miftahussurur, yang mengatakan,

“masyarakat pengaruhnya kecil dalam proses pembuatan Perda APBD. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat rendah dan jika ada itupun dimobilisasi.¹⁷

Mathur Khusairi mengatakan,

“masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD Jawa Timur sulit berpartisipasi. Hal ini karena masalah keterbatasan sumberdaya. Namun begitu, masih ada LSM yang mau terlibat aktif dalam proses tersebut, tapi seringkali direspon negatif oleh pejabat berwenang.”¹⁸

¹⁵Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya.

¹⁶Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya.

¹⁷Wawancara pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Sidoarjo.

¹⁸Wawancara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan.

Suhandoyo mengatakan,

“dalam proses pembentukannya (Perda APBD) tidak dapat dipungkiri terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah daerah dan DPRD. Namun itu semua tetap mengacu pada koridor peraturan-perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.”²¹

Sedangkan menurut Rofik,

“proses pembentukan Perda APBD Jawa Timur memang ada persaingan kepentingan pemerintah daerah dan DPRD, tapi itu kecil dan itu dilakukan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.”²²

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi semua dimensi pandangan pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya terlihat menurut Agus Miftahussurur dan Mathur Khusairi bahwa pada saat pembahasan perda tersebut ada isu yang berkembang di masyarakat ada negosiasi kepentingan. Tujuannya untuk pencapaian kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun, untuk membuktikannya secara empirik sulit, tetapi aroma ketidakberesan hubungan antarpejabat berwenang kedua lembaga tersebut terasa oleh sebagian besar masyarakat.²³

²⁰Wawancara pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Surabaya.

²¹Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

²²Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

²³Wawancara mendalam pada Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khususairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

4. Hipotesis pokok ke-4: pengaruh variabel konteks/lingkungan (X_4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y)

Hasil uji t pada hipotesis pokok ke-4 memperlihatkan: nilai t_{hitung} (7,487) > t_{tabel} (1,965) dan nilai probabilitas Sig_{hitung} (0,000) < $Sig_{penelitian}$ (0,05).

Artinya hipotesis pokok ke-4: H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,448, menunjukkan rentang pengaruh variabel konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

Menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik kondisi budaya-politik dan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Faktanya terlihat pada setiap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, pandangan politik saling berkompetisi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Silang pendapat ini biasanya disertakan dengan argumentasi teoritis dan norma hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Andi,

Suhandoyo mengatakan,

Sedangkan menurut Rofik,

Paralel dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur,

²⁴Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

²⁵Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

²⁶Wawancara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

²⁷Wawancara mendalam pada Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

Berdasarkan uji koefisien regresi (uji t) untuk mengetahui variasi/proporsi pengaruh masing-masing sub-variabel dari variabel legislasi nasional (X_1), aktor pemeran serta (X_2), nilai-nilai (X_3), dan konteks/lingkungan (X_4) terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diperoleh data sebagai berikut:

Pengaruh sub-Variabel Legislasi Nasional, Aktor Pemeran Serta, Nilai-nilai, dan Konteks/Lingkungan terhadap Proses Pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	t _{tabel}	Nilai P
Legislasi Nasional (X₁)				
UU (X _{1.1})	-0,089	-0,759	1,965	0,448
Perpu (X _{1.2})	0,146	1,248		0,213
Perpres/Kerpres (X _{1.3})	0,117	0,956		0,340
Permen/Kepmen (X _{1.4})	0,127	1,057		0,291
Aktor Pemeran Serta (X₂)				
Gubernur/TAPD (X _{2.1})	-0,079	-0,622	1,965	0,534
DPRD (X _{2.2})	0,495	4,210		0,000
Kelompok penekan (X _{2.3})	0,155	1,420		0,156
Partai politik (X _{2.4})	0,531	5,193		0,000
Masyarakat (X _{2.5})	0,116	1,134		0,258
Nilai-nilai (X₃)				
Nilai-nilai politik (X _{3.1})	1,031	10,355	1,965	0,000
Nilai-nilai organisasi (X _{3.2})	0,518	4,750		0,000
Nilai-nilai pribadi (X _{3.3})	0,664	6,338		0,000
Nilai-nilai kebijakan (X _{3.4})	0,731	7,595		0,000
Ideologi (X _{3.5})	0,589	4,946		0,000
Konteks/Lingkungan (X₄)				
Budaya politik (X _{4.1})	0,596	4,904	1,965	0,000
Kondisi sosial-ekonomi (X _{4.2})	0,290	2,343		0,020

[illegible]

1. Hipotesis khusus ke-1: pengaruh undang-undang yang mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-1: nilai $t_{hitung} (-0,759) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitasnya $Sig_{hitung} (0,448) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_o diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel undang-undang yang mengatur/berkaitan dengan APBD ($X_{1.1}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar -0,089, menunjukkan rentang pengaruh variabel undang-undang terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bernilai negatif.

2. Perpu yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-2: nilai $t_{hitung} (1,248) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,213) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_o diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel Perpu yang mengatur tentang APBD ($X_{1.2}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,146, menunjukkan rentang pengaruh variabel

Perpu terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah.

3. Perpes/Kepres yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-3: nilai $t_{hitung} (0,956) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,340) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel Perpres/Kepres yang mengatur tentang APBD ($X_{1,3}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,117, menunjukkan rentang pengaruh variabel Perpres/Kepres terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah.

4. Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-4: nilai $t_{hitung} (1,057) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,291) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel Permen/Kepmen yang mengatur tentang APBD ($X_{1,4}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,127, menunjukkan rentang pengaruh variabel

Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian—terkait hipotesis khusus ke-1 sampai dengan ke-4—sebagian besar informan dari kalangan pemerintah—Andi, Suhandoyo, dan Rofik—menyakini proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen. Fakta yang diajukan adalah dokumen dan naskah Perda APBD Provinsi Jawa Timur, seperti Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015. Selain itu, alasannya: Perda APBD Jawa Timur disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur, LHP atas LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari BPK, dan Perda APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.”²⁸

Berbeda dengan pendapat informan dari kalangan pemerintah, informan dari kalangan masyarakat dan partai politik—Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi—menyakini bahwa proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur secara umum disusun berdasarkan asas normativitas/filosofi UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen. Bukti otentiknya adalah peraturan perundang-undangan nasional yang tertera dalam naskah Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, aspek

²⁸Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu pada 7 Agustus 2016 di Surabaya.

5. Gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

6. DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

[illegible]

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-6: nilai $t_{hitung} (4,210) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel DPRD-Komisi Legislasi Provinsi Jawa Timur ($X_{2.2}$) yang mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,495, menunjukkan rentang pengaruh variabel DPRD-Komisi Legislasi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

7. Kelompok penekan mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-7: nilai $t_{hitung} (1,420) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,156) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel kelompok penekan ($X_{2.3}$) yang mengatur/berkaitan dengan APBD terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,155, menunjukkan rentang pengaruh variabel kelompok penekan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah.

8. Partai politik mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-8: nilai $t_{hitung} (5,193) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel partai politik ($X_{2.4}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,531, menunjukkan rentang pengaruh variabel partai politik terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

9. Masyarakat mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-9: nilai $t_{hitung} (1,134) < t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,258) > Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yakni pengaruh variabel masyarakat ($X_{2.5}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah tidak signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,116, menunjukkan rentang pengaruh variabel masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat rendah.

Pada pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur gubernur/TAPD, anggota DPRD, kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur, menurut pandangan—terkait hipotesis khusus ke-5 sampai dengan ke-9—Andi, Suhandoyo, dan Rofik sangat

Sedangkan menurut informan dari kalangan non-pemerintah—Agus Miftahussurur, Mathur Khusasiri, dan Norman Zein Nahdi—berpendapat bahwa aktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur adalah pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kalangan masyarakat pengaruhnya sebaliknya, kecil sekali. Hal ini karena kewenangan besar pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur dalam proses pembuatan Perda APBD, sedangkan kalangan masyarakat hanya bisa mempengaruhi dan itupun terkendali informasi dan sumberdaya, bahkan terkadang partisipasinya dimobilisasi kelompok kepentingan tertentu di Provinsi Jawa Timur.³¹

Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

³¹Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khususiri dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-10: nilai $t_{hitung} (10,355) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai politik ($X_{3.1}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 1,031, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai politik terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat tinggi.

11. Nilai-nilai organisasi mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-11: nilai $t_{hitung} (4,760) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai organisasi ($X_{3.2}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,518, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai organisasi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

12. Nilai-nilai pribadi mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-12: nilai $t_{hitung} (6,388) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas

$\text{Sig.}_{\text{hitung}} (0,000) < \text{Sig.}_{\text{penelitian}} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai pribadi ($X_{3.3}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,664, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai pribadi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tinggi.

13. Nilai-nilai kebijakan mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-13: nilai $t_{\text{hitung}} (7,595) > t_{\text{tabel}} (1,965)$ dan nilai probabilitas $\text{Sig.}_{\text{hitung}} (0,000) < \text{Sig.}_{\text{penelitian}} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel nilai-nilai kebijakan ($X_{3.4}$) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,731, menunjukkan rentang pengaruh variabel nilai-nilai kebijakan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tinggi.

14. Ideologi mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-14: nilai $t_{\text{hitung}} (4,946) > t_{\text{tabel}} (1,965)$ dan nilai probabilitas $\text{Sig.}_{\text{hitung}} (0,000) < \text{Sig.}_{\text{penelitian}} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel ideologi ($X_{3.5}$) terhadap variabel

proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,589, menunjukkan rentang pengaruh variabel ideologi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

Pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur berpengaruh sekali dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, menurut pandangan—terkait hipotesis khusus ke-10 sampai dengan ke-14—informan kalangan pemerintah, yakni Andi, Suhandoyo, dan Rofik. Pandangan ini tampak pada perbedaan atau perdebatan argumentatif personal-personal terkait pada saat pembahasan Perda APBD di DPRD. Namun, perdebatan tersebut tetap dalam koridor hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Provinsi Jawa Timur.³²

Berbeda dengan pendapat informan dari pemerintah, menurut Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi pandangan pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Faktanya, tampak pada sinyalemen masyarakat yang menengarai ada motif praktik negosiasi kepentingan, baik kepentingan pribadi dan kelompok, pada saat pembahasan Perda APBD Jawa Timur. Namun

³²Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

15. Budaya politik yang berkembang di masyarakat Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

16. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur mempengaruhi terhadap proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis khusus ke-16: nilai $t_{hitung} (2,343) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$ yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni pengaruh variabel kondisi sosial-ekonomi masyarakat

³³Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

Provinsi Jawa Timur (X_{4.2}) terhadap variabel proses pembentukan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Y) adalah signifikan. Nilai R-nya sebesar 0,290, menunjukkan rentang pengaruh variabel kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur rendah.

Budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi menurut pendapat—terkait hipotesis khusus ke-15 sampai dengan ke-16—informan dari kalangan pemerintah—Andi, Suhandoyo, dan Rofik—mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Kenyataannya tampak pada silang pandangan politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada saat pembahasan dan proses pengesahan Perda APBD Jawa Timur. Perdebatan ini biasanya menggunakan dasar teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan tujuan memperkuat dasar hukum dan politik, dan sosial-ekonomi pelaksanaan program pemerintah yang ada dalam APBD, melalui pengesahan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur.³⁴

Sinergis dengan pendapat tersebut—Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi—berpendapat pada setiap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, budaya-politik

³⁴Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

H. Pembahasan Data Penelitian

(1) Pengaruh legislasi nasional, peran aktor pemeran serta, nilai-nilai politik, konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

³⁵Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

(2) Pengaruh legislasi nasional terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Fakta persepsi masyarakat ini berbeda secara diametral dengan pendapat informan penelitian dari kalangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurut sebagian besar informan penelitian ini—seperti Andi, Suhandoyo, dan Rofik—berpendapat bahwa proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur secara normatif sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat

pada proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dimana faktanya tampak terlihat pada: (1) landasan peraturan perundang-undangnya, (2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, dan (3) pandangan gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.³⁶

Pada proses pembuatan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 asas yang digunakan sudah sesuai dengan legislasi nasional, dimana UU, PP, Perpres, dan Permen terkait dengan pembentukan Perda APBD Pemerintah Daerah menjadi dasar atau landasan pembentukkan perda tersebut.³⁷ Artikulatif dengan hal ini, LHP atas LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari BPK.³⁸ Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur perda tersebut wajar dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, persetujuan ini sesuai dengan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur bahwa laporan pertanggungjawaban

³⁶Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya.

³⁷Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

³⁸Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2015*, tersedia di <http://www.bpk.go.id> (diakses pada 28 Agustus 2016). Lihat juga, Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), "Sambutan Anggota V BPK pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015," naskah sambutan BPK disampaikan di Surabaya pada 13 Juni 2016.

pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.³⁹

Paralel dengan fakta hasil uji statistik penelitian dan berbeda dengan pendapat ke-3 informan dari kalangan pemerintah, Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi mengatakan secara substantif pada kasus tertentu proses pembuatan Perda APBD Jawa Timur tidak sesuai dengan legislasi nasional. Menurutnya, seringkali dalam proses hingga sampai dengan pengesahan/diundangkannya di daerah ada isi Perda APBD Provinsi Jawa Timur tidak sesuai/selaras dengan semangat legislasi nasional—meskipun tidak signifikan—yang menjadi asas pembentukannya. Hal ini disebabkan oleh pelbagai hal, diantaranya karena kepentingan kalangan terkait dan tekanan dari pihak tidak terkait.⁴⁰ Dengan demikian, secara teoritis, pembuatan Perda APBD Jawa Timur secara umum sesuai dengan legislasi dan secara parsial ada sebagian kecil yang tidak sesuai dengan legislasi nasional. Jadi, dapat disimpulkan pembuatan Perda tentang APBD secara umum sudah sesuai dengan legislasi nasional sehingga proses legislasi ini mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik dan berdasarkan hukum, yang tentu saja dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai keberlanjutan keuangan.⁴¹ Namun pada kasus tertentu,

³⁹Berita Lima, “Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015”, *Beritalima*, tersedia di <http://www.beritalima.com> (diakses pada 28 Agustus 2016).

⁴⁰Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

⁴¹Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 49-50.

secara substantif kesesuaian proses pembuatannya dengan legislasi nasional masih perlu dipertanyakan.

Fakta atau data penelitian tersebut, secara empirik menjadi bukti⁴² artikulatif dengan penelitian Habib Adjie *et al.*, dan tidak artikulatif dengan penelitian Kalpie Astragina dan desain normatifitas regulasi negara Indonesia. Menurut penelitian Habib Adjie *et al.*, pembentukan perda yang kurang sesuai dengan aspek normatifitasnya. Diantara faktor penyebabnya adalah karena dalam pembentukan perda kurang berpegang teguh pada asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga pada level implementasinya juga bermasalah.⁴³ Menurut penelitian Kalpie Astragina Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi akuntabilitas yang disebabkan salah satunya karena ketaatan terhadap regulasi yang ada.⁴⁴ Sedangkan secara normatif, menurut regulasi Negara Indonesia pembuatan APBD seharusnya didasarkan pada kerangka hukum, baik formil dan materiil, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan regulasi otonomi daerah yang berlaku—yang mana di dalamnya juga mengatur tentang APBD sebagai bagian dari materi muatan utama. Perangkat hukum terkait dengan proses pembuatan Perda APBD tersebut adalah UU, Perpu, PP, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen yang

⁴²Bukti yang dimaksudkan penelitian ini—mengadaptasi pendapat Jujun S. Suriasumantri—adalah hasil uji kebenaran data/kesimpulan dengan menggunakan teori kebenaran ilmiah: (1) korespondensi untuk data kuantitatif dan (2) koherensi/konsistensi untuk data kualitatif. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 55 dan 57.

⁴³Habib Adjie *et al.*, *Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 52-62.

⁴⁴Kalpie Astragina, *Analisis Faktor-faktor dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur*, tersedia di <http://www.unesa.ac.id> (diakses pada 16 Nopember 2015).

(3) Pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah (gubernur/TAPD), anggota DPRD, kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur menurut

[illegible]

Andi, Suhandoyo, dan Rofik sangat berperan/berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, baik mulai dari proses penyusunan draf hingga pengesahannya. Kelima aktor tersebut, yang paling berperan dan berpengaruh adalah anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, seperti gubernur dan TAPD Provinsi Jawa Timur. Peran kedua lembaga ini sangat besar karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan⁴⁶ sehingga dalam proses pembuatannya terjalin hubungan antara DPRD yang diwakili Komisi Legislasi dan Badan Anggaran, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Biro Hukum/Bappeda, dan masyarakat yang diwakili LSM Provinsi Jawa Timur yang sangat baik. Peran pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai penyusun dan pengabsah Perda APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran kedua lembaga ini bisa mungkin terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat adalah ikut terlibat dalam proses pembuatannya yang juga diatur dalam aturan perundang-undangan, dimana hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa reses pada bulan April, Agustus, dan November, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi

⁴⁶Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010* tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur.⁴⁷ Pendapat tersebut tampak kurang artikulatif dengan konsep dan teori pelbagai ilmu kebijakan publik. Hal ini karena kategorisasi partisipasi masyarakat hanya pada bentuk normal, sedangkan realitas dan teorinya menunjukkan hal sebaliknya. Yakni, partisipasi masyarakat dapat dilakukan mekanisme non formal/tidak normal, seperti demonstrasi dan keluar dari pelayanan pemerintah ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik.⁴⁸

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi masyarakat Provinsi Jawa Timur tidak memiliki pengaruh kecil sekali dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya antara lain: (1) partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat rendah, dan (2) jika-pun ada yang berpartisipasi pada proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur kemungkinan besar karena dimobilisasi oleh kalangan/kelompok elite tertentu di Jawa Timur.⁴⁹ Pendapat ketiga informan tersebut, tampak artikulatif dengan aspek regulasi-normativitasnya yang sangat masih lemah/rapuh, dimana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda APBD Provinsi Jawa Timur hingga kini oleh DPRD belum diatur secara eksplisit dan jelas mekanismenya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.

⁴⁷Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Surabaya.

⁴⁸Ilham Cendikia, *et al.*, *Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: PATTIRO dan ACCESS, 2007), h. 14; Albert O. Hirschman, *Strategi Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970), h. 39.

⁴⁹Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

Padahal keterlibatan masyarakat ini diamanahkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 53.⁵⁰

Fakta atau data penelitian tersebut, menjadi bukti empirik artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan konseptual-teoritis pelbagai illmuan kebijakan publik—Budi Winarno, Suharno, dan Joko Widodo—yang mendeskripsikan bahwa aktor pemeran serta—baik resmi dan tidak resmi—seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat secara individual sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik.⁵¹ Namun pada kasus tertentu—pendapat/persepsi informan dari kalangan non-pemerintah—terdapat data penelitian yang menunjukkan sebaliknya, yang secara empirik artikulatif dengan penelitian: (1) Habib Adjie *et al.*,⁵² yang menyebutkan bahwa pembentukan perda di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kurang partisipatif sehingga kurang responsif, dan (2) Dewie Tri Wijayanti menjelaskan birokrasi pemerintah Jawa Timur kurang mampu menegakkan aturan karena kekuasaan birokratik sentralistik.⁵³ Dengan demikian, secara umum dan empirik data penelitian ini artikulatif dan koheren secara internal dengan

⁵⁰Nanda Pratama Sukoco, “Peran Badan Legislati dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” *Jejaring Administrasi Publik* II, No. 8 (2012): 101. Lihat juga UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵¹Sukoco, *ibid.* Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 123. Lihat juga, Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 16-17; Joko Widodo, *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Strategik Kontemporer Administrasi Publik* (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100.

⁵²Habib Adjie *et al.*, *op. cit.*, h. 62.

⁵³Dewie Tri Wijayanti, “Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan “Fish Shale Multiscience”,” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7, No. 4, 2009.

konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Joko Widodo.

(4) Pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Hasil uji t pengaruh parsial nilai-nilai (X_3) (nilai politik [$X_{3.1}$], nilai organisasi [$X_{3.2}$], nilai pribadi [$X_{3.3}$], nilai kebijakan [$X_{3.4}$], dan ideologi [$X_{3.5}$]) terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (25,595) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$. Rentang pengaruhnya tinggi yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,733. Jadi, jika nilai-nilai pengaruhnya positif/meningkat, maka proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan.

Pengaruh pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur, menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik disesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik di level nasional dan daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam proses pembentukannya tidak dapat dipungkiri terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan (partai politik dan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur) antara pemerintah dan DPRD, namun

persaingan kepentingan ini tetap dalam koridor peraturan-perundang-undangan.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi semua dimensi pandangan pelaku pembuat Perda APBD Provinsi Jawa Timur sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Buktinya terlihat pada saat pembahasan perda tersebut, tampak ramai dan penuh dengan negosiasi kepentingan. Tujuannya untuk pencapaian kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun, untuk membuktikannya sulit secara empirik, tetapi aroma ketidakberesan hubungan antarpejabat berwenang kedua lembaga tersebut terasa di kalangan masyarakat Jawa Timur.⁵⁵

Data penelitian tersebut, menjadi bukti empirik artikultif konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik—Budi Winarno dan Norman Flynn—yang mendeskripsikan bahwa nilai-nilai yang berkembang di masyarakat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik. Namun, pada kasus tertentu—berdasarkan pandangan subjektif informan dari kalangan non-pemerintah—data penelitian memaparkan fakta kontradiksi dengan konseptual-teoritisnya pelbagai ilmuwan kebijakan publik, sehingga data penelitian kasus tersebut tidak koheren dengan konseptual-teoritis tersebut.⁵⁶

⁵⁴Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

⁵⁵Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

⁵⁶Winarno, *op. cit.*, h. 123-124. Lihat juga, Norman Flynn, "Explaining the New Public Management: the Importance of Context," in Kate McLaughlin *et al.* (eds.), *New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, pp. 57-76. New York: Roudledge, 2002), p. 67-71.

(5) Pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Hasil uji t pengaruh parsial konteks/lingkungan (X_4) (budaya politik [$X_{4.1}$] dan sosial-ekonomi [$X_{4.2}$]) terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (7,487) > t_{tabel} (1,965)$ dan nilai probabilitas $Sig_{hitung} (0,000) < Sig_{penelitian} (0,05)$. Rentang pengaruhnya cukup tinggi yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,448. Jadi, jika konteks/lingkungan pengaruhnya positif/meningkat, maka proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan.

Menurut Andi, Suhandoyo, dan Rofik budaya-politik dan sosial-ekonomi sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada setiap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur terdapat pandangan politik yang saling berkompetisi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Timur atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Silang pendapat ini biasanya disertakan dengan argumentasi teoritis dan norma hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini karena pembuatan kebijakan ini sebagai landasan hukum pelaksanaan program pemerintah daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁵⁷

⁵⁷Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

Paralel dengan pendapat tersebut, menurut Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi juga berpendapat bahwa budaya-politik dan kondisi sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Budaya-politik yang paling mempengaruhi proses pembuatan perda tersebut adalah pandangan para birokrasi senior (TAPD) dan gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dimana pandangan ini bisa bias subjektif, kelompok, dan faktor lain. Sedangkan pandangan masyarakat hanya berpengaruh pada tingkat sangat minimal sekali, yakni hanya diserap jika tidak ada benturan dengan kepentingannya, yang diserap melalui mekanisme audiensi, reses, dengar pendapat, penelitian, dan pertemuan langsung dengan masyarakat.⁵⁸

Fakta (data) penelitian tersebut menjadi bukti empirik artikulatif konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik—Budi Winarno dan Charles F. Andrain—yang mendeskripsikan bahwa konteks perumusan (kondisi budaya politik dan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat) pembuatan kebijakan publik berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam hal ini pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, data penelitian ini berkorespondensi dan koheren secara internal dengan konseptual-teoritis tersebut.⁵⁹

⁵⁸Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

⁵⁹Winarno, *op. cit.*, h. 123. Lihat juga, Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 76-77 dan 110.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian, mayoritas variabel yang ditetapkan sebagai prediktor variabel proses pembuatan Perda di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berpengaruh signifikan sesuai yang dihipotesiskan penelitian, kecuali variabel legislasi nasional dan semua sub-variabelnya dan sub-variabel aktor pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat. Selengkapnya pemaparan dan penjelasan temuan data penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel Bebas	R (R ²)	F _{hitung}	F _{tabel} $\alpha - 0.05$	Sig	Keterangan
Legislasi nasional (X ₁), Aktor pemeran serta (X ₂), Nilai-nilai (X ₃), dan Konteks (X ₄)	0,936 (0,875)	699,431	2,394	0,000	H _a : $\beta_k \neq 0$, untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$

Hasil uji F (simultan) pada hipotesis inti memperlihatkan bahwa pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur signifikan. Rentang pengaruhnya sangat tinggi dengan proporsi pengaruhnya sebesar 87,5% dan sisanya 12,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Besarnya pengaruh variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan

konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD sebesar 0,068.

Tabel 5.2
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t _{hitung}	t _{tabel} α – 0.05	Sig	Keterangan
Legislasi nasional (X ₁)	0,026	0,726	1,965	0,468	H ₀ : β _k = 0
UU (X _{1.1})	-0,089	-0,759		0,448	H ₀ : β _k = 0
Perpu (X _{1.2})	0,146	1,248		0,213	H ₀ : β _k = 0
Perpres/Kepres (X _{1.3})	0,117	0,956		0,340	H ₀ : β _k = 0
Permen/Kepmen (X _{1.4})	0,127	1,057		0,291	H ₀ : β _k = 0
Aktor pemeran serta (X ₂)	0,235	7,137		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Gubernur/TAPD (X _{2.1})	-0,079	-0,622		0,534	H ₀ : β _k = 0
DPRD (X _{2.2})	0,495	4,210		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Kelompok penekan (X _{2.3})	0,155	1,420		0,156	H ₀ : β _k = 0
Parpol (X _{2.4})	0,531	5,193		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Masyarakat (X _{2.5})	0,116	1,134		0,258	H ₀ : β _k = 0
Nilai-nilai (X ₃)	0,733	25,595		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Nilai politik (X _{3.1})	1,031	10,355		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Nilai organisasi (X _{3.2})	0,518	4,750		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Nilai pribadi (X _{3.3})	0,664	6,338		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Nilai kebijakan (X _{3.4})	0,731	7,595		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Ideologi (X _{3.5})	0,589	4,946		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Konteks (X ₄)	0,448	7,487		0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1
Budaya politik (X _{4.1})	0,596	4,904	0,000	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1	
Sosial-ekonomi (X _{4.2})	0,290	2,343	0,020	H _a : β _k ≠ 0, untuk k = 1, 2,..., p-1	

Keterangan: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{p-1} = 0$ = H_0 diterima, H_a ditolak
 $H_a: \beta_k \neq 0$, untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$ = H_a diterima, H_0 ditolak

Hasil uji t (uji parsial) pada hipotesis pokok ke-1 menunjukkan bahwa pengaruh parsial variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah, yakni nilai R-nya hanya sebesar 0,026. Sedangkan pada hipotesis pokok ke-2 sampai dengan ke-4: pengaruh parsial masing-masing variabel aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD adalah signifikan. Rentang pengaruhnya aktor pemeran serta rendah, nilai-nilai

tinggi, dan konteks/lingkungan cukup tinggi, yakni nilai R-nya masing-masing sebesar 0,235, 0,733, dan 0448.

Pada hipotesis khusus ke-1 sampai dengan ke-5, ke-7, dan ke-9: pengaruh parsial/individual variabel UU, Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak signifikan. Rentang pengaruhnya variabel UU dan gubernur dan TAPD negatif yakni masing-masing sebesar -0,089 dan -0,079 dan Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, kelompok penekan, dan masyarakat sangat rendah yakni masing-masing sebesar 0,146, 0,117, dan 0,127. Sedangkan pada hipotesis khusus ke-6, ke-8, dan ke-10 sampai dengan ke-16: pengaruh individual variabel DPRD, partai politik, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, ideologi, budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan. Rentang pengaruhnya variabel DPRD, partai politik, nilai-nilai organisasi, ideologi, dan budaya politik cukup tinggi yakni masing-masing sebesar 0,495, 0,531, 0,518, 0,589, dan 0,596, nilai-nilai pribadi dan kebijakan tinggi yakni masing-masing sebesar 0,664 dan 0,731, dan kondisi sosial-ekonomi rendah yakni hanya sebesar 0,290.

Data temuan hipotesis pokok ke-1 tersebut, kontradiksi dengan pandangan informan penelitian kalangan pemerintah. Menurut informan ini, proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur secara normatif sesuai dengan legislasi nasional. Contohnya, pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 terlihat: (1) landasan peraturan perundang-undangannya, yakni landasan hukum yang

digunakan UU, PP, Perpres, dan Permen, (2) LHP atas LK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan penilaian WTP dari BPK, dan (3) pandangan gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, perda tersebut wajar dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur dan persetujuan ini sesuai dengan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.¹ Sedangkan menurut pendapat informan non-pemerintah, seringkali dalam proses sampai dengan pengesahan/diundangkannya di daerah ada saja isi/materi Perda APBD yang tidak sesuai/selaras dengan semangat legislasi nasional. Faktor penyebabnya diantaranya kepentingan kalangan terkait dan tekanan dari pihak lain. Namun demikian, secara umum proses pembuatan Perda tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional sehingga proses legislasi seperti ini mencerminkan karakteristik pemerintahan yang baik dan berdasarkan hukum, yang tentu saja dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai keberlanjutan keuangan.²

Proses pembuatan perda tersebut, menurut informan dari kalangan pemerintah berpendapat bahwa pemerintah, DPRD, kelompok penekan, partai

¹Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015*, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2015*, tersedia di <http://www.bpk.go.id> (diakses pada 28 Agustus 2016); dan Berita Lima, "Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015", *Beritalima*, tersedia di <http://www.beritalima.com> (diakses pada 28 Agustus 2016).

²Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 49-50.

politik, dan masyarakat sangat berperan/berpengaruh, baik mulai dari proses penyusunan draf sampai dengan pengesahannya. Namun dari ke-5 aktor tersebut yang paling berperan dan berpengaruh adalah DPRD dan pemerintah daerah karena dijamin peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuatannya terjalin hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sangat baik. Peran pemerintah dan DPRD sebagai penyusun dan pengabsah perda sangat dominan dan memungkinkan terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat partisipan dalam proses pembuatannya dapat dilakukan melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa reses pada bulan April, Agustus, dan November, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi Jawa Timur.³ Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut informan dari kalangan non-pemerintah masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Buktinya antara lain: (1) partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD sangat rendah, dan (2) partisipasi masyarakat kemungkinan besar dimobilisasi oleh kalangan/kelompok elite tertentu di Jawa Timur. Pendapat ketiga informan tersebut, tampak artikulatif dengan aspek regulasi-normativitasnya yang sangat masih lemah/rapuh, dimana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda

³Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010* tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

APBD oleh DPRD belum diatur secara eksplisit dan jelas mekanismenya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.⁴

Menurut pendapat informan dari kalangan pemerintah proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dipengaruhi pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi. Dalam proses pembentukannya tidak dapat dipungkiri terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan DPRD, namun persaingan kepentingan ini tetap dalam koridor peraturan-perundang-undangan.⁵ Sedangkan menurut pendapat informan non-pemerintah pandangan pelaku pembuat perda sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD. Buktinya terlihat pada saat pembahasan perda seringkali terjadi negosiasi kepentingan untuk tujuan kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, untuk membuktikannya secara empirik sulit, tetapi gejala-gejalanya terasa di kalangan masyarakat Jawa Timur.⁶

Pada proses pembuatan perda tersebut, posisi budaya-politik dan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat, menurut pendapat informan dari kalangan pemerintah sangat vital dan mempengaruhinya. Buktinya, dalam setiap prosesnya terdapat pandangan politik yang saling berkompetisi antara pemerintah daerah dan DPRD atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD. Namun, silang pendapat ini didasarkan pada argumentasi teoritis, norma hukum, dan kondisi

⁴Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Nanda Pratama Sukoco, "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur," *Jejaring Administrasi Publik* II, No. 8 (2012): 101.

⁵Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Surabaya.

⁶Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya.

Data temuan penelitian tersebut—berdasarkan data uji simultan dan pendapat sebagian besar informan—secara empirik menjadi bukti empirik artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco¹⁰ dan Kalpie Astragina¹¹, desain normativitas¹², dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik¹³.

¹³Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 123-124; Joko Widodo, *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Strategik Kontemporer Administrasi Publik* (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-

Namun, pada data temuan hasil uji parsial dan pendapat sebagian informan, data empirik penelitian menjadi bukti empirik artikulatif dengan penelitian Habib Adjie *et al.*,¹⁴ dan Dewie Tri Wijayanti,¹⁵ dan artikulasinya dengan desain normativitas regulasi Indonesia dan konseptual-teoritis pelbagai ilmu kebijakan publik tersebut bervariasi. Temuan hipotesis pokok ke-1 dan pendapat sebagian informan non-pemerintah menunjukkan bahwa data penelitian tidak terbukti secara empirik artikulatif dengan penelitian Kalpie Astragina dan desain normatifitas regulasi negara Indonesia—yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur taat terhadap regulasi yang ada, yakni perangkat hukum terkait proses pembuatan Perda tentang APBD, seperti UU, Perpu, PP, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen—menjadi dasar dan asas pembentukan kebijakan tersebut. Sedangkan temuan hipotesis pokok ke-2 sampai dengan ke-4 dan pendapat sebagian informan kalangan pemerintah menunjukkan bahwa secara empirik data penelitian terbukti artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina dan konseptual-teoritis pelbagai ilmu kebijakan publik, yang mendeskripsikan bahwa aktor pemeran serta resmi dan tidak resmi, nilai-nilai di masyarakat, dan konteks perumusan pembuatan kebijakan publik (budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat) berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan publik di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100; Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 16-17; Norman Flynn, "Explaining the New Public Management: the Importance of Context," in Kate McLaughlin *et al.* (eds.), *New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, pp. 57-76. New York: Roudledge, 2002), p. 67-71; Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 76-77 dan 110.

¹⁴Habib Adjie *et al.*, *Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2012, h. 52-62.

¹⁵Dewie Tri Wijayanti, "Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan *"Fish Schale Multiscience"*," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7, No. 4, 2009.

Dengan demikian, secara spesifik berkaitan dengan pembahasan faktor prediktor proses pembuatan pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur konseptual-teoritis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur pada kasus tertentu—khususnya materi/muatan dan persepsi/pandangan masyarakat tentang materi Perda tentang APBD—tidak sesuai dengan legislasi nasional yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempengaruhinya adalah kepentingan dan pandangan (pandangan dunia/paradigma) para aktor pemeran serta resmi kebijakan publik dari kalangan partai politik. Faktor-faktor ini semakin berpengaruh riil (nyata/positif) karena terdukung persepsi politik apatis (kategori budaya politik parokial) dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika faktanya tidak mendukung hal tersebut, pengaruhnya kemungkinan besar tidak begitu berarti karena dibatasi oleh partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan para aktor yang berpengaruh pada proses pembuatan perda tersebut adalah kepentingan pribadi dan kelompok para aktor pembuat kebijakan tersebut. Sedangkan pandangan para aktor pembuat kebijakan yang berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan adalah pandangan berdimensi politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi.

Kedua, peranan dominan aktor pemeran serta dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah aktor pemeran serta resmi yang berasal dari kalangan partai politik, bahkan peranannya mempengaruhi peranan kepala daerah dan pejabat senior pemerintahan daerah dalam proses pembuatan perda tersebut, khususnya pada tahap pembahasan dan pengesahannya. Dominasi peranan aktor pemeran serta tersebut semakin dominan

karena peranan aktor pemeran serta lain (khususnya kelompok penekan dan masyarakat) kecil atau peranannya besar tetapi bersinergis dengan peranan yang diharapkan aktor pemeran serta tersebut. Jika fenomenanya tidak demikian, maka dominasi peranan aktor pemeran serta dari kalangan partai politik mengalami kendala. Jadi, dapat dikatakan bahwa proses pembuatan Perda tentang APBD tersebut merepresentasikan proses kebijakan publik bersifat individual kepala/pejabat senior (eksekutif) pemerintahan daerah sebagai perancang perda tersebut, tetapi dalam pembahasan dan pengesahannya perannya dipengaruhi/dikalahkan oleh aktor pemeran serta dari kalangan partai politik.

Ketiga, pandangan berdimensi politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi aktor pemeran serta dari kalangan partai politik teragregasi dominan dalam pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur karena dipengaruhi persepsi politik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan pandangan dari aktor pemeran serta lain—seperti pejabat pemerintah, kelompok penekan, dan masyarakat—sangat kecil terakomodir dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian dapat dipersepsikan (1) semakin persepsi politik masyarakat apatis pada pembuatan perda, maka semakin dominan pandangan aktor pemeran serta dari kalangan partai politik dalam proses pembuatan perda tersebut, dan (2) semakin rendah indeks kondisi sosial-ekonomi masyarakat, semakin rendah dalam mempengaruhi proses pembuatan perda.

Keempat, budaya politik masyarakat berpengaruh pada proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur karena partisipasi masyarakat melalui mekanisme suara (budaya politik) terakomodir dalam mekanisme dengar pendapat, reses, dan kunjungan kerja DPRD. Padahal

secara substantif, partisipasinya dapat dikategorikan partisipasi-mobilisasi untuk tujuan pencapaian agenda politik tertentu dan partisipasinya juga tidak diatur tata tertib DPRD. Sedangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpengaruh pada proses pembuatan perda kemungkinan besar karena dipersepsikan masyarakat indeks kesejahteraan-kemakmuran masyarakat pada level menengah dan tinggi berpengaruh positif pada proses pembuatan perda. Namun, persepsi ini kontradiktif dengan peranan aktor pemeran serta tidak resmi pembuatan kebijakan publik dari kalangan kelompok penekan dan masyarakat dalam proses pembuatan perda tidak begitu berarti/signifikan.

B. Kesimpulan

Temuan data penelitian tersebut dapat disimpulkan: pertama, pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat tinggi. Kedua, pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel legislasi nasional: UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya UU negatif dan Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen sangat rendah.

Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan non-pemerintah, yang berpendapat bahwa pada kasus tertentu terdapat isi/muatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai/selaras dengan semangat

legislasi nasional. Faktor penyebabnya kepentingan kalangan terkait dan tekanan dari pihak tidak terkait. Namun, menurut informan kalangan pemerintah secara normatif proses pembuatan Perda tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional. Bukti empiriknya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dasar hukum pembentukannya adalah UU, PP, Perpres, dan Permen. Bukti ini juga diperkuat dengan pelaksanaan LHP atas LK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan WTP dari BPK dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.

Ketiga, pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, tetapi dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel aktor pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya gubernur dan TAPD negatif dan kelompok penekan dan masyarakat sangat rendah. Sedangkan pengaruh sub-variabel aktor pemeran serta: DPRD dan partai politik terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi.

Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah, yang berpendapat bahwa pemerintah, DPRD, kelompok penekan, partai politik, dan masyarakat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya peran DPRD dan pemerintah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuatannya secara umum terjalin hubungan antara DPRD,

pemerintah daerah, dan masyarakat sangat baik. Peran pemerintah dan DPRD sebagai penyusun dan pengabsah perda sehingga memungkinkan terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatannya yang dapat dilakukan melalui audiensi, berkirim surat, penelitian, dengar pendapat, kunjungan langsung anggota DPRD pada masa reses, dan kunjungan kerja anggota DPRD ke lokasi masyarakat untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Provinsi Jawa Timur, serta demonstrasi dan keluar dari pelayanan pemerintah ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik. Berbeda dengan pendapat tersebut, informan dari kalangan non-pemerintah berpendapat bahwa masyarakat tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam proses pembuatan Perda tentang APBD. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda APBD sangat rendah dan bahkan partisipasinya dimobilisasi kelompok elite tertentu di Jawa Timur. Pendapat ini artikulatif dengan aspek regulasi-normativitasnya yang sangat masih lemah/rapuh, yang mana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD oleh DPRD belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.

Keempat, pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, sesuai dengan hipotesis penelitian dengan rentang pengaruhnya tinggi. Pengaruh sub-variabel nilai-nilai: politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD adalah signifikan dengan rentang pengaruh nilai-nilai politik sangat tinggi, nilai-nilai pribadi dan kebijakan tinggi, dan nilai-nilai organisasi dan ideologi cukup tinggi.

Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah, yang berpendapat bahwa pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, dan ideologi sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Buktinya, proses pembentukannya terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan DPRD. Namun, persaingan ini masih dalam koridor peraturan-perundang-undangan. Berbeda dengan pendapat tersebut, informan non-pemerintah berpendapat bahwa pelaku pembuat perda (aktor pemeran serta resmi) sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD. Buktinya, disinyalir oleh pelbagai kalangan terjadi negosiasi kepentingan dalam pembahasan perda, tetapi pembuktiannya secara empirik sulit.

Kelima, pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. Pengaruh sub-variabel konteks/lingkungan: budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan Perda tentang APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya budaya politik cukup tinggi dan kondisi sosial-ekonomi rendah.

Data hasil uji statistik ini sesuai dengan pendapat informan baik kalangan pemerintah dan non-pemerintah. Informan kalangan pemerintah berpendapat bahwa budaya-politik dan sosial-ekonomi sangat mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang dapat dibuktikan dengan pandangan politik yang saling berkompetisi antara pemerintah daerah dan DPRD atau antarpejabat TAPD dan anggota DPRD dalam

pembahasan Perda tentang APBD. Silang pendapat ini berdasarkan pada argumentasi teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sinergis dengan pendapat tersebut, informan non-pemerintah berpendapat bahwa budaya-politik dan kondisi sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD. Budaya-politik yang paling mempengaruhi proses pembuatan perda tersebut adalah pandangan para birokrasi senior, gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan pandangan masyarakat hanya diakomodir melalui mekanisme audiensi, reses, dengar pendapat, dan kunjungan kerja di lokasi masyarakat.

Data temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan secara empiris: (1) pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi signifikan, artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina, desain normativitas regulasi Indonesia, dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik, (2) pengaruh parsial variabel legislasi nasional terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi tidak signifikan, artikulatif dengan penelitian Habib Adjie *et al.*, dan Dewie Tri Wijayanti dan tidak artikulatif dengan penelitian Kalpie Astragina dan desain normatifitas regulasi Indonesia, dan (3) pengaruh variabel aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi signifikan, artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik.

C. Saran-saran

Berdasarkan deskripsi temuan dan kesimpulan penelitian di atas, kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tampak secara empiris pendekatan kuantitatif-kualitatif cukup handal dan dapat dipercaya menjelaskan dan mendeskripsikan realitas permasalahan tersebut. Temuan penelitian, faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembuatan perda tersebut adalah: (1) aktor pemeran serta resmi dari kalangan partai politik, (2) nilai-nilai, dan (3) budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Fakta temuan penelitian berkorespondensi dengan fakta empirik (persepsi masyarakat/responden: data kuantitatif) dan konsisten/koheren dengan teori dan pendapat masyarakat (pandangan informan: data kualitatif). Meskipun temuan penelitian memiliki variasi perbedaan dengan teori dan penelitian kebijakan publik sebelumnya, tetapi data temuan penelitian ini menurut perspektif argumentasi ilmiah kebijakan publik posisi dan sifatnya memperbaiki konteks permasalahan ilmiah kebijakan publik sehingga dapat dikatakan akumulatif dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Namun demikian, untuk lebih mempertajam kajian/studi ini, peneliti menyarankan: pertama, faktor-faktor prediktor, sub-faktor-faktor prediktor, dan lokasi penelitiannya perlu diperluas dan diperdalam lagi, sehingga data penelitian yang diperoleh dapat memperbaiki dan melengkapi konteks penelitian ini dan data/informasinya bersifat akumulatif. Dengan teknik ini kemungkinan besar—menurut asumsi peneliti—dapat memberikan eksplanasi lebih luas dan deskripsi lebih mendalam tentang faktor-faktor prediktor proses pembuatan Perda tentang

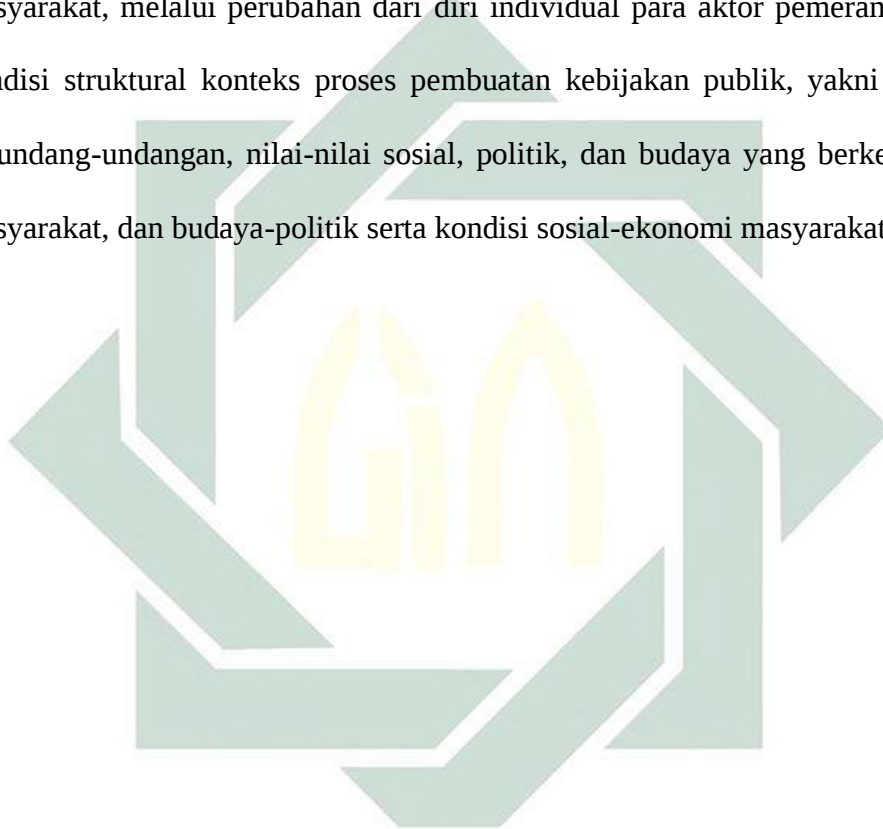
APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur—dimana dalam penelitian ini belum dijelaskan dan dipaparkan.

Kedua, untuk tujuan memperkuat proses pembuatan perda yang demokratis yang berguna pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dalam proses perumusan/pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur sangat perlu dan krusial mempertimbangkan aspek-aspek penguatan: (1) proses kebijakan publik yang partisipatif, dan (2) proses kebijakan publik yang inovatif.

Penguatan proses kebijakan publik yang partisipatif yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dalam proses pembuatan perda—meskipun fenomenanya sebagai proses internal pemerintahan lokal—perlu merumuskan mekanisme hubungan demokratis pemerintah dan masyarakat. Syarat implementasinya harus ada: (a) tata aturan normatif yang didukung oleh legitimasi masyarakat, (b) tata aturan normatif-inovatif yang mampu menyediakan peluang dan tuntutan partisipasi masyarakat, dan (c) mekanisme prosedural yang didukung oleh perangkat yang mampu mengatasi dinamika sosial di masyarakat. Proses implementasinya dilakukan melalui proses: (a) ilmiah, (b) profesional, dan (c) politik. Pada proses ilmiah, para perancang kebijakan publik (aktor pemeran serta resmi) harus mampu membuat naskah akademik (bisa menjalin kerjasama dengan lembaga professional dan perguruan tinggi) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada proses profesional, para perancang kebijakan publik harus mampu memaparkan dan menganalisis masalah sosial yang dapat diukur secara teoritis dan aspek peraturan perundang-undangannya. Pada proses politik, para

perancang kebijakan publik harus mampu membuat kebijakan publik yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan tujuan implementasinya.

Sedangkan proses kebijakan publik yang inovatif dimaksudkan agar para aktor pemeran serta dari kalangan pemerintah dan masyarakat bekerjasama merumuskan kebijakan publik yang dapat mendorong perubahan sosial-ekonomi masyarakat, melalui perubahan dari diri individual para aktor pemeran serta dan kondisi struktural konteks proses pembuatan kebijakan publik, yakni peraturan perundang-undangan, nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat, dan budaya-politik serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib *et al.* 2012. *Ketidakterlaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya.
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Almond, Gabriel A. 1997. "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik." Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (ed.). *Perbandingan Sistem Politik*, h. 52-75. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anand, Sudhir, and Amartya Sen. 2000. "The Income of the Human Development Index." *Journal of Human Development* 1, No. 1: 83-106.
- Ancok, Djameludin. 1989. "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, h. 122-146, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asdar and Badrullah. 2016. "Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematics Education Studies)." *International Journal of Social Science and Humanities Research* 4, Issue. 2 (April-June): 356-363.
- Asfar, Muhammad. 2001. "Otonomi Daerah: Lingkup Kajian dan Ancangan Teori." Muhammad Asfar (ed.). *Implementasi Otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim*, h. 1-51. Surabaya: Center for Public Policy Studies, Civil Society Support and Strengthening Program, dan Pusdeham.
- Astragina, Kalpie. 2012. *Analisis Faktor-faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur*, tersedia di <http://www.unesa.ac.id> (diakses pada 16 Nopember 2015).
- Babbie, Earl R. 1979. *The Practices of Social Research*, second edition. Belmont, California: Wardsworth Publishing Company.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2015. *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan*

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2015, tersedia di <http://www.bpk.go.id> (diakses pada 28 Agustus 2016).

- Boedianto, Akmal. 2008. "Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Cendikia, Ilham, *et al.* 2007. *Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: PATTIRO dan ACCESS.
- Colongan Jr. Arellano A. 2003. "What is Happening of the Ground? The Progress of Decentralisation." Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, pp. 87-101. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dalton, Russell J. 2000. "Citizen Attitudes and Political Behavior." *Comparative Political Studies* 33, No. 6-7: 912-940.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy toward Consolidation*. Tim IRE (terj.). Yogyakarta: IRE.
- Djanegara, Moermahadi Soerja (Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). 2016. "Sambutan Anggota V BPK pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015." Naskah sambutan BPK disampaikan di Surabaya pada 13 Juni 2016.
- Effendi, Sofian dan Chris Manning. 1989. "Prinsip-Prinsip Analisa Data." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, h. 263-264, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Tadjuddin N., *et al.* 1989. "Pengolahan Data." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, h. 241-262, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Fielding, Nigel. 1996. "Qualitative Interviewing." Nigel Gilbert (ed.). *Researching Social Life*, pp. 135-153. London: Sage Publications.

- Flynn, Norman. 2002. "Explaining the New Public Management: the Importance of Context." Kate McLaughlin *et al.* (eds.), *New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, pp. 57-76. New York: Roudledge.
- Gani, Soelityati Ismail. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadisoeparto, Hartono. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 3. Yogyakarta: Liberty.
- Held, Wolter G. 1991. "Decision Making in the Federal Government: The Wallace S. Sayre Model." J. Steven Ott *et al.* (eds.), *Public Management: the Essential Readings*, pp. 217-235. Chicago: Lyceum Books/Nelson-Hal Publisher.
- Hirschman, Albert O. 1970. *Strategi Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970.
- Lima, Berita. 2016. "Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015", *Beritalima*, tersedia di <http://www.beritalima.com> (diakses pada 28 Agusturs 2016).
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto. 1989. "Penentuan Sampel." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, h. 149-174, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi pertama. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Samawa Center.
- Neuman, Lawrence W. 2000. *Social Research Methods*. Fourth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Newman, Isadora and Caroly R. Benz. 1998. *Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum*. Southern Illinois University Press.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja*

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Ratnawati. 2003. "Gender Budget dalam APBD." Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, h. 295-309. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Republik Indonesia. 2003. *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Sekretariat Negara Jakarta.

_____. 2004. *UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Sekretariat Negara Jakarta.

_____. 2004. *UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Sekretariat Negara Jakarta.

_____. 2011. *UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Sekretariat Negara Jakarta.

_____. 2014. *UU No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Sekretariat Negara Jakarta.

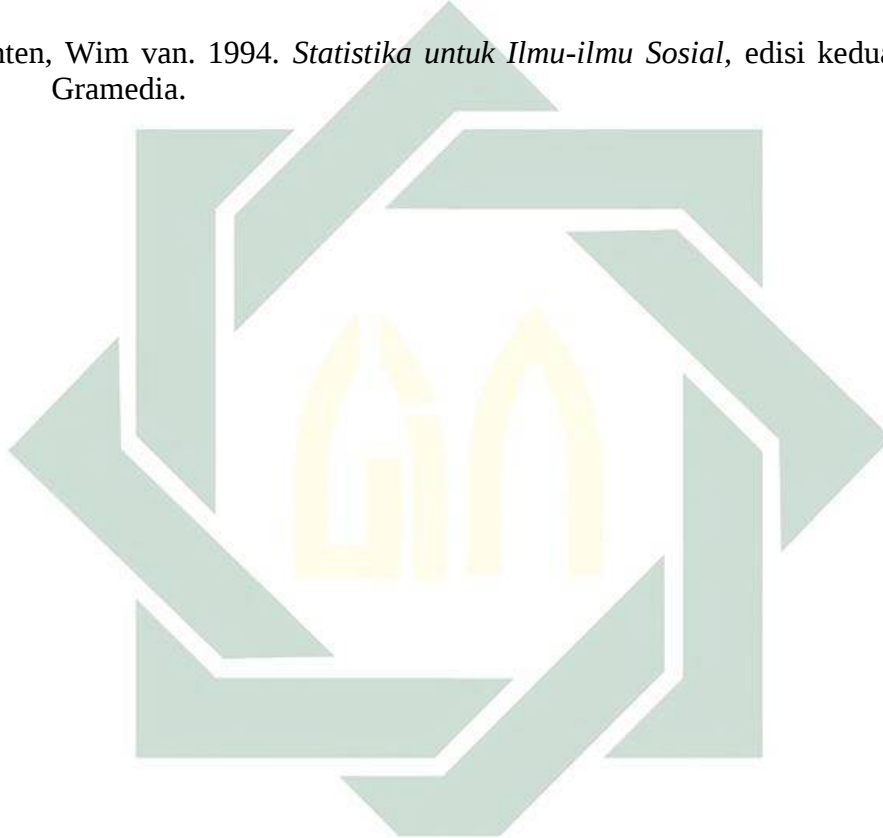
_____. 2014. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sekretariat Negara Jakarta.

_____. 2015. *UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Sekretariat Negara Jakarta.

Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.

- _____. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, cetakan kelima. Bandung: Alfabeta.
- Salam, Alfitra. 2007. "Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah." Syamsuddin Haris (ed.). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, h. 277-300. Jakarta: LIPI Press.
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Saratankos, Sotirios. 1998. *Social Research*. South Yanna: Macmillan Publishers Australia PTY LTD.
- Soekarwo, 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stake, Robert E. 1994. "Case Studies." Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, pp. 236-247. Thousand Oaks, California: Sage.
- Suhab, Sultan. 2004. "Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah." *Analisis* 1, No. 2: 106-116.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukoco, Nanda Pratama. 2012. "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur," *Jejaring Administrasi Publik* II, No. 8: 91-103.
- Suriasumantri, Jujun S. 2010. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syaukani HR., et al. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2007. *Human Development Report 2007-2008*. New York: UNDP.
- Vredenburg, J. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Widodo, Joko. 2003. *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Stratejik Kontemporer Administrasi Publik*. Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag.

- Wijayanti, Dewie Tri. 2009. "Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan *"Fish Schale Multiscience"*," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7, No. 4: 803-811.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainie, Abdullah. 2007. "Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah." Syamsuddin Haris (ed.). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, h. 265-276. Jakarta: LIPI Press.
- Zanten, Wim van. 1994. *Statistika untuk Ilmu-ilmu Sosial*, edisi kedua. Jakarta: Gramedia.



Tabel Lampiran 1.

LEMBAR KUESIONER**I. IDENTITAS RESPONDEN**

Data Responden (Lingkari kode angka sesuai jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama masyarakat/responden)		Diisi Surveyor
Nomor Responden	_____	
Umur	_____ Tahun	
Jenis Kelamin	1. Laki – laki 2. Perempuan	☐ ☐
Pendidikan Terakhir	1. SD/MI Ke bawah 4. D1, D2, D3 & D4 2. SLTP/MTs 5. S1 3. SLTA/MA 6. S2 dan S3	☐
Pekerjaan Utama	1. PNS/TNI/POLRI 4. Pelajar/Mahasiswa 2. Pegawai Swasta 5. Lainnya 3. Wiraswasta	☐
Pendapatan	1. < Rp450.000 4. > Rp1.000.000- 2. Rp450.000- Rp1.500.000 Rp750.000 5. > Rp1.500.000- 3. > Rp755.000- Rp2.000.000 Rp1.000.000 6. > Rp2.000.000	☐
Alamat	Dusun: _____ Kecamatan : _____ _____ Desa : _____ Kabupaten/Kota: _____ _____ _____	

II. IDENTITAS SURVEYOR

Data Surveyor (Pencacah)	
(Tulis nama, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama)	
Nama	
Umur	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan Utama	

III. DAFTAR PERTANYAAN

No	PERTANYAAN	Diisi Surveyor
1	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah pusat 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	1 2 3 4 5
2	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Peraturan Pemerintah 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	1 2 3 4 5
3	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Peraturan Presiden/Keputusan Presiden 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	1 2 3 4 5
4	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Peraturan Menteri/Keputusan Menteri 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai	1

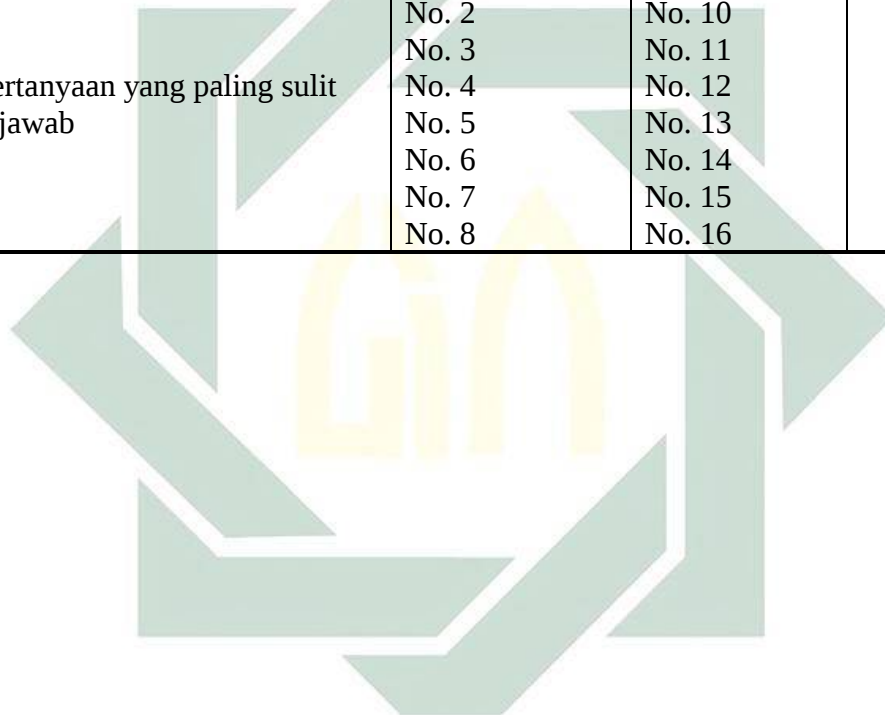
	3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	2 3 4 5
5	Gubernur berperan dalam Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat filosofi dan Juklak/Juknis Peraturan Menteri/Keputusan Menteri 1. Sangat tidak berperan 2. Kurang berperan 3. Kadang-kadang berperan 4. Berperan 5. Sangat berperan	1 2 3 4 5
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propvinsi Jawa Timur berperan dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak berperan 2. Kurang berperan 3. Kadang-kadang berperan 4. Berperan 5. Sangat berperan	1 2 3 4 5
7	DPRD Jawa Timur berperan dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak berperan 2. Kurang berperan 3. Kadang-kadang berperan 4. Berperan 5. Sangat berperan	1 2 3 4 5
8	Aktifis partai politik terlibat/dilibatkan dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Tidak pernah terlibat/dilibatkan 2. Kurang terlibat/dilibatkan 3. Kadang-kadang terlibat/dilibatkan 4. Terlibat/dilibatkan 5. Selalu terlibat/dilibatkan	1 2 3 4 5
9	Masyarakat terlibat/dilibatkan dalam proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Tidak pernah sama sekali terlibat/dilibatkan 2. Kurang terlibat/dilibatkan 3. Kadang-kadang terlibat/dilibatkan 4. Terlibat/dilibatkan 5. Selalu terlibat/dilibatkan	1 2 3 4 5
10	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan politik gubernur, Tim Anggaran Pemerintah, dan DPRD Daerah Propvinsi Jawa Timur	

	1. Sangat tidak bisa 2. Tidak bisa 3. Tidak mengetahui 4. Bisa saja 5. Sangat bias	1 2 3 4 5
11	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai semangat filosofi dan petunjuk pelaksanaan/teknis legislasi nasional 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	1 2 3 4 5
12	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan pribadi gubernur, Tim Anggaran Pemerintah, dan DPRD Daerah Propvinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak bisa 2. Tidak bisa 3. Tidak mengetahui 4. Bisa saja 5. Sangat bias	1 2 3 4 5
13	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sarat kepentingan organisasi birokrasi Pemerintah Daerah Propvinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak bisa 2. Tidak bisa 3. Tidak mengetahui 4. Bisa saja 5. Sangat bias	1 2 3 4 5
14	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan semangat Negara kesatuan “UU Otonomi Daerah” 1. Sangat tidak sesuai 2. Tidak sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Sesuai 5. Sangat sesuai	1 2 3 4 5
15	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan perspektif, pandangan, dan orientasi Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak bisa 2. Tidak bisa 3. Tidak mengetahui 4. Bisa saja 5. Sangat bias	1 2 3 4 5
16	Proses pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintah	

	Daerah Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan kondisi kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan) dan pendapatan masyarakat Jatim Propvinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak bisa 2. Tidak bisa 3. Tidak mengetahui 4. Bisa saja 5. Sangat bias	1 2 3 4 5
17	Proses penyiapan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur usulan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak baik 2. Tidak baik 3. Tidak mengetahui 4. Baik 5. Sangat baik	1 2 3 4 5
18	Proses penyiapan draf inisiatif Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak baik 2. Tidak baik 3. Tidak mengetahui 4. Baik 5. Sangat baik	1 2 3 4 5
19	Proses penyiapan naskah Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak baik 2. Tidak baik 3. Tidak mengetahui 4. Baik 5. Sangat baik	1 2 3 4 5
20	Ketaatan asas Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak taat 2. Tidak taat 3. Tidak mengetahui 4. Taat 5. Sangat taat	1 2 3 4 5
21	Proses pembahasan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak baik 2. Tidak baik 3. Tidak mengetahui 4. Baik 5. Sangat baik	1 2 3 4 5
22	Proses pengesahan dan pengundangan Perda APBD oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Sangat tidak baik/sesuai 2. Tidak baik/sesuai 3. Tidak mengetahui 4. Baik/sesuai 5. Sangat baik/sesuai	1 2 3 4 5

IV. CATATAN LAPANGAN

Pengamatan Surveyor terhadap Responden (Tulis di kotak pada lajur kanan)		
Sikap responden	1. Tidak ramah dan terbuka 2. Kurang ramah dan terbuka 3. Ramah dan terbuka	☐
Orang ketiga yang hadir	1. Ada 2. Tidak Ada	☐
Pengaruh orang ketiga	1. Ada 2. Tidak ada	☐
Pertanyaan yang paling sulit dijawab	No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15 No. 16	☐



Tabel Lampiran 2.

Responden Penelitian

1. Jenis Kelamin Responden		
Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	222	55,50
Perempuan	178	44,50
Jumlah	400	100,00
2. Tingkat Pendidikan Responden		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD/MI dan sekolah SD/MI	59	14,75
SMP/MTs	70	17,50
SLTA/MA/SMK/MAK dan yang Sederajat	79	19,75
D1 s.d D4	77	19,25
S1	87	21,75
S2 dan S3	28	7,00
Jumlah	400	100,00
3. Pekerjaan Responden		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS/TNI/Polri	150	37,50
Pegawai Swasta	125	31,25
Wiraswasta	85	21,25
Pelajar/Mahasiswa	25	6,26
Lainnya	15	3,75
Jumlah	400	100,00
4. Pendapatan Per Bulan Responden		
< Rp400.000	61	15,25
Rp450 s.d Rp750.000	25	6,25
Rp755.000 s.d Rp1.000.000	52	13,00
Rp1.000.000 s.d Rp1.500.000	42	10,50
>Rp1.500.000 s.d Rp2.000.000	50	12,50
>Rp2.000.000	170	42,50
Jumlah	400	100,00

Tabel Lampiran 3.

Distribusi Jawaban Responden

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	4	4	4	4	3	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	4	4	3	3	4	5	4	5	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	5	3	3	3	3	4	5
4	2	4	2	4	4	4	4	1	4	2	2	4	4	2	5	5	2	4	4	2	5	5
5	3	3	3	3	4	4	4	4	1	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3
6	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	3	3	4	2	3	2	3	3	4	2	3
7	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
8	3	3	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
10	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	5	5
11	4	4	4	4	5	5	4	3	2	2	4	2	2	4	4	4	4	2	2	4	4	4
12	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	4	4	5	4	2	2	4	4	5
13	1	2	4	3	3	3	1	1	3	4	3	5	3	1	2	4	3	5	3	1	2	4
14	4	4	2	3	5	4	3	1	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4
15	3	4	1	5	3	2	3	4	2	1	3	3	2	2	1	3	3	3	1	1	1	3
16	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	3	2	3	4	4	5	3	2	3	4
17	5	3	2	3	1	1	1	1	1	4	1	2	3	2	3	4	1	2	3	2	3	4
18	2	2	5	5	3	2	3	4	3	3	1	1	3	1	2	1	1	1	3	1	2	1
19	4	4	4	4	5	5	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
20	3	2	2	1	1	1	5	5	2	3	2	2	3	2	5	5	2	2	3	2	5	5
21	2	1	3	2	3	1	3	5	1	3	3	5	5	3	1	1	3	5	1	1	1	1
22	4	2	3	1	3	5	2	2	3	4	2	1	5	3	2	1	2	1	5	3	2	1
23	2	3	1	5	5	5	3	3	2	1	1	4	4	2	3	5	1	4	4	2	3	5
24	4	2	4	5	1	2	2	3	2	3	5	4	4	2	3	5	5	4	4	2	3	5
25	5	1	2	2	3	1	3	3	1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	1	4	1	3
26	1	5	1	3	3	1	2	3	2	3	5	1	3	3	5	1	5	1	3	3	5	1
27	2	5	1	2	3	3	3	1	1	5	1	2	3	1	1	5	1	2	3	1	1	5
28	3	1	2	2	5	2	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	5	5
29	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	3	4	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4
30	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
31	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1
32	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2
33	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
34	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
35	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
36	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	2	3	4	2	1	2	2	3	4	2	1
37	3	4	4	3	2	3	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	4	3	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3
39	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	4	3	4	3	2	3
40	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
41	2	3	3	3	4	3	5	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
42	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4
43	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
44	4	4	4	3	3	5	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	5	3
45	3	3	3	3	2	2	3	2	1	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2	3
46	2	1	1	2	2	3	3	2	4	4	2	1	4	1	1	5	1	1	2	2	3	3
47	4	4	2	4	2	1	2	2	2	1	2	2	4	4	3	3	4	2	4	2	1	2
48	4	4	2	4	2	1	2	2	2	1	3	2	4	3	5	5	4	2	4	2	1	2
49	3	3	3	3	1	1	3	2	2	2	2	5	5	5	5	5	3	3	3	1	1	3
50	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	1	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	1	4
52	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	2	2
53	1	1	1	1	1	1	5	1	1	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	5
54	2	1	5	4	5	2	5	5	1	3	2	5	4	3	2	3	1	5	4	5	2	5
55	4	3	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	3
56	4	3	4	5	3	4	5	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	5	3	4	5
57	4	3	2	4	4	4	3	3	4	4	2	4	4	2	2	2	3	2	4	4	4	3
58	2	3	3	2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	4
59	3	3	2	4	4	1	3	3	3	4	4	5	1	3	4	4	3	2	4	4	1	3
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	4	4	4	3	5	4	5	4	3	5	4	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4	5
62	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	2	4	2	2	4	4	2	2	2	3	3	3
63	1	4	3	3	1	1	4	5	1	1	2	3	4	3	2	4	4	3	3	1	1	4
64	2	2	1	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	4
65	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
66	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
67	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2
68	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
69	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
70	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2
71	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
72	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2
73	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2
74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
75	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
76	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1
77	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
78	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
79	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2
80	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1
81	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
82	5	4	5	4	4	3	4	5	4	3	3	3	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4
83	2	3	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	2	3	3	2	2	1	1
84	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2
85	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2
86	3	4	4	3	4	5	3	4	3	3	3	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5	3
87	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2
88	2	3	3	3	2	3	5	2	4	5	5	5	5	4	4	5	3	3	3	2	3	5
89	3	3	3	3	3	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	1	3	3	3	3	1	1
90	1	2	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	3	1	2
91	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4
92	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
93	2	2	3	3	3	2	4	4	1	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	4
94	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2
95	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2
96	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
97	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
98	4	4	3	4	5	4	5	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	5
99	3	3	3	3	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	1	3
100	3	3	3	3	3	1	2	2	5	5	5	5	2	1	1	2	3	3	3	3	1	2
101	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
102	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
103	4	4	5	5	5	3	4	4	4	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	3	4
104	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
105	2	2	2	2	4	2	5	1	3	2	3	1	4	5	1	3	2	2	2	4	2	5
106	1	5	2	2	1	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	1	5	2	2	1	2	2
107	2	1	1	3	2	2	5	5	2	2	5	5	3	2	2	2	1	1	3	2	2	5
108	2	2	2	2	1	2	4	2	2	3	2	4	4	1	5	2	2	2	2	1	2	4
109	1	1	1	1	2	3	3	2	2	4	5	2	4	3	2	2	1	1	1	2	3	3
110	2	2	2	2	4	2	1	5	5	2	2	1	3	2	1	4	2	2	2	4	2	1
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	3	5	4	4	3	5	3	1	2	3	4	5	5	4	5	3	5	4	4	3	5
114	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4
115	3	3	4	3	2	3	4	2	1	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	2	3	4
116	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
120	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
123	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
128	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	3	2	3	2	1	2	4	4	2	2	2	3	4	2	3	3	2	4	4	2	2	2
132	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3	3	4	4
133	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
134	4	4	4	4	4	3	4	1	2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	1	2	4	4
135	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
136	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	1	2	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	3	2	2	3	5	5	2	2	4	2	5	5	3	4	4	5	5	2	2	4	2
139	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	2	4	5
140	4	4	3	4	5	3	4	3	4	3	4	4	5	4	5	5	3	4	3	4	3	4
141	3	3	3	3	4	4	4	3	1	3	3	4	4	4	4	5	4	4	3	1	3	3
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3
143	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4
144	2	2	2	4	4	3	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2
145	2	2	2	4	4	3	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2
146	2	2	2	4	4	3	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	2	4
147	2	2	2	4	4	3	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2
148	3	3	4	4	3	2	2	1	1	3	1	3	4	4	4	4	2	2	1	1	3	1
149	2	3	2	4	4	4	4	5	2	2	4	2	4	3	1	4	4	4	5	2	2	4
150	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4
151	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3	4	4	3	4	5	3	4	1	3	4	3
152	2	4	3	3	4	3	4	1	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	1	3	4	4
153	4	4	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
154	4	4	2	2	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3
155	1	2	2	3	2	3	3	3	4	2	2	2	2	3	3	5	3	3	3	4	2	2
156	3	4	4	2	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4
157	2	4	3	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	5	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3
160	4	4	4	3	3	2	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	2	2	2	2	4	3

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
161	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
162	2	3	2	3	2	1	3	2	2	1	2	2	3	1	2	1	1	3	2	2	1	2
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
164	3	4	3	4	3	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3
165	3	3	3	3	4	3	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	3
166	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5
168	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3
169	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5
170	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4
171	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
172	3	3	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	3	3
173	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
174	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3
175	3	3	1	2	2	3	3	5	2	4	4	2	3	2	2	2	3	3	5	2	4	4
176	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
177	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
178	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	3	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	3	3	3	4	3	5	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4	3
182	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4
183	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4
184	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	4	3	3	4	3
185	3	3	3	3	3	1	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	1	4	4	3	3	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4
190	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
191	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	5	4	4	4	4	5
192	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3
193	4	3	3	4	3	4	4	3	5	4	2	3	3	4	2	4	4	4	3	5	4	2
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
195	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2
196	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2
197	3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
198	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4
199	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
200	4	3	3	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
201	3	3	3	4	3	2	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	2	4	3	4	3	4

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
202	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1	2	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1
203	4	4	3	4	2	2	3	2	3	4	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	4	2
204	5	3	3	4	3	3	2	4	2	3	2	2	4	1	5	1	3	2	4	2	3	2
205	4	5	4	5	4	2	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	2	5	4	4	5	3
206	5	1	5	1	2	5	1	1	4	3	1	3	5	5	1	2	5	1	1	4	3	1
207	3	1	2	1	5	1	1	2	2	1	4	4	5	2	3	1	1	1	2	2	1	4
208	2	1	3	5	1	5	3	4	1	3	5	5	3	1	5	4	5	3	4	1	3	5
209	5	1	3	1	4	1	4	1	3	5	2	2	5	4	1	1	1	4	1	3	5	2
210	2	3	1	5	1	2	5	1	2	2	4	1	5	5	1	3	2	5	1	2	2	4
211	3	1	4	5	1	1	5	1	3	1	5	3	5	4	1	2	1	5	1	3	1	5
212	4	1	3	2	5	1	4	1	3	3	4	1	2	4	1	3	1	4	1	3	3	4
213	3	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	4	4	2	3	3	2
214	3	5	1	5	1	1	1	2	5	3	2	2	1	5	4	3	1	1	2	5	3	2
215	5	1	2	4	3	1	2	5	3	5	2	4	3	3	1	3	5	2	4	3	3	1
216	5	1	2	5	1	2	3	1	5	4	2	3	2	3	5	1	4	2	3	2	3	5
217	4	5	5	4	4	3	4	5	4	3	5	5	5	4	4	3	3	5	5	5	4	4
218	4	3	4	5	4	3	4	5	5	4	3	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4
219	4	3	4	3	5	2	4	4	3	3	5	4	5	4	4	5	3	5	4	5	4	4
220	4	4	2	5	3	3	5	3	5	4	3	5	4	5	5	4	4	3	5	4	5	5
221	3	3	2	3	2	3	3	4	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2
222	1	3	5	3	1	3	2	5	1	2	1	5	1	3	5	1	2	1	5	1	3	5
223	3	3	3	3	3	1	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
224	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
225	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
226	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
227	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
228	2	2	2	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
229	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
230	2	2	3	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
231	2	2	2	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
232	2	2	2	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
233	2	2	2	2	2	2	4	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4
234	4	4	4	3	4	5	5	1	1	5	4	1	4	4	4	5	5	4	1	4	4	4
235	4	4	4	3	4	5	5	1	1	5	4	1	4	4	4	5	5	4	1	4	4	4
236	4	4	4	3	4	5	5	1	1	5	4	1	4	4	4	5	5	4	1	4	4	4
237	4	4	4	3	4	5	5	1	1	5	4	1	4	4	4	5	5	4	1	4	4	4
238	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4
239	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4
240	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4
241	4	4	4	4	5	5	4	1	1	5	4	1	2	4	4	5	5	4	1	2	4	4
242	4	4	4	4	5	5	4	1	1	5	4	1	2	4	4	5	5	4	1	2	4	4

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
243	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	5	5	3	4	3	4	3	5
244	4	4	3	4	5	4	5	4	3	5	3	5	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4
245	2	2	3	4	4	3	4	3	3	2	1	3	3	4	4	4	2	1	3	3	4	4
246	2	2	3	4	4	3	4	3	3	2	1	3	3	4	4	4	2	1	3	3	4	4
247	2	3	3	2	1	1	4	5	2	2	2	2	5	3	2	3	2	2	2	5	3	2
248	4	4	3	4	5	4	5	4	3	5	3	5	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4
249	2	2	2	2	4	2	5	1	4	3	1	3	4	2	2	3	3	1	3	4	2	2
250	2	4	4	3	4	3	2	3	2	3	2	4	4	5	5	5	3	2	4	4	5	5
251	2	2	2	2	2	5	1	2	3	4	5	1	2	5	1	4	4	5	1	2	5	1
252	2	2	2	2	2	1	1	3	5	2	4	1	5	1	2	1	2	4	1	5	1	2
253	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
254	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
255	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2
256	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2
257	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2
258	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1
259	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
260	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2
261	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1
262	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1
263	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
264	2	2	2	2	4	5	1	3	2	4	3	1	4	1	3	1	4	3	1	4	1	3
265	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
266	2	2	4	4	4	2	5	2	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
267	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	2	5	3	3	3	5	5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
269	3	3	3	3	4	5	5	3	1	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4
270	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	1	3	2	2	2	3	3	1
271	4	4	3	4	4	4	3	1	3	3	3	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	5
272	4	2	4	3	4	4	3	3	3	4	2	4	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4
273	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
274	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	3	3	1
275	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
276	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	5	5	4	4	3
277	4	4	4	4	2	2	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
278	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	5	5	4	4	3
279	3	3	3	3	2	3	4	1	1	4	3	3	5	2	5	5	4	3	3	5	2	5
280	2	4	4	2	3	2	2	1	1	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4
281	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
282	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
283	3	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
284	4	3	2	4	3	2	5	3	1	3	2	4	2	2	2	1	3	2	4	2	2	2
285	2	4	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	5
286	2	4	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	5
287	2	2	3	3	3	3	4	4	2	3	2	3	2	4	3	3	3	2	3	2	4	3
288	2	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	3	5	4	4	3
289	3	3	2	4	2	2	4	2	3	3	2	2	4	2	2	3	3	2	2	4	2	2
290	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4
291	3	2	2	4	4	3	4	4	2	2	2	4	4	5	3	4	2	2	4	4	5	3
292	3	3	3	3	2	4	4	3	2	4	3	4	5	4	5	5	4	3	4	5	4	5
293	4	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	4	3	2	1	2	1	2	4
294	2	2	4	2	2	3	2	2	3	4	5	3	4	4	2	2	4	5	3	4	4	2
295	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	4	1	2	3	2	2	1	4	1	2
296	1	1	3	3	2	2	2	3	1	1	3	2	4	1	2	2	1	3	2	4	1	2
297	2	3	4	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	2	2	2	2	3	4
298	2	2	2	2	3	2	3	3	4	4	2	2	2	2	1	2	4	2	2	2	2	1
299	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4
300	1	2	3	3	1	1	1	2	4	3	2	2	5	1	2	1	3	2	2	5	1	2
301	3	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3	2	2	3	1	1	3	3	2	2	3	1
302	1	2	1	3	2	3	3	2	2	3	1	2	1	3	1	3	3	1	2	1	3	1
303	4	3	4	4	1	3	1	2	5	3	2	4	3	4	3	1	3	2	4	3	4	3
304	2	4	1	3	2	2	4	1	2	3	3	2	4	1	1	1	3	3	2	4	1	1
305	2	3	3	3	2	1	3	4	5	3	3	2	4	4	2	2	3	3	2	4	4	2
306	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	3	1	2	2	1	2	2	3	1
307	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
308	1	2	3	2	2	1	3	3	3	3	4	5	5	3	3	1	3	4	5	5	3	3
309	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
310	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
311	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	4
312	1	4	2	5	3	3	5	3	4	2	3	1	3	2	4	4	2	3	1	3	2	4
313	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
314	1	1	1	1	2	1	4	4	2	1	1	3	4	3	5	3	1	1	3	4	3	5
315	4	4	4	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	5	5
316	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1
317	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
318	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
319	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
320	1	4	2	3	5	1	2	3	2	4	2	1	3	5	5	4	4	2	1	3	5	5
321	2	2	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3
322	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
323	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
324	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
325	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
326	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
327	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
328	4	3	3	1	5	5	4	1	3	4	2	2	3	2	3	1	4	2	2	3	2	3
329	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5
330	1	1	1	1	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
331	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
332	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
333	4	4	4	4	5	5	5	5	4	1	4	1	1	4	5	5	1	4	1	1	4	5
334	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
335	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
336	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5
337	4	4	4	4	5	5	4	4	2	4	2	2	4	4	5	5	4	2	2	4	4	5
338	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4
339	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
340	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
341	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4
342	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
343	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	5	5	2	4	2	2	4	5
344	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	5	1	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5
345	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	5	5	2	4	2	2	4	5
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4
347	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5
348	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	5	5	2	4	2	2	4	5
349	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
350	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
351	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
352	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1
353	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
354	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
355	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
356	4	3	3	1	5	5	4	1	3	4	2	2	3	2	3	1	4	2	2	3	2	3
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5
358	1	1	1	1	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
359	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
361	4	4	4	4	5	5	5	5	4	1	4	1	1	4	5	5	1	4	1	1	4	5
362	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
363	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
364	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5
365	4	4	4	4	5	5	4	4	2	4	2	2	4	4	5	5	4	2	2	4	4	5

No Res	Jawaban Responden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
366	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4
367	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
368	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
369	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4
370	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5	2	2	5	5	5	2	5	2	2	5	5
371	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	5	5	2	4	2	2	4	5
372	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	5	1	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5
373	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	5	5	2	4	2	2	4	5
374	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
375	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	3	3	1
376	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
377	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	5	5	4	4	3
378	4	4	4	4	2	2	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
379	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	5	5	4	4	3
380	3	3	3	3	2	3	4	1	1	4	3	3	5	2	5	5	4	3	3	5	2	5
381	2	4	4	2	3	2	2	1	1	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4
382	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
383	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
384	3	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
385	4	3	2	4	3	2	5	3	1	3	2	4	2	2	2	1	3	2	4	2	2	2
386	2	4	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	5
387	2	4	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	5
388	2	2	3	3	3	3	4	4	2	3	2	3	2	4	3	3	3	2	3	2	4	3
389	2	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	3	5	4	4	3
390	3	3	2	4	2	2	4	2	3	3	2	2	4	2	2	3	3	2	2	4	2	2
391	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4
392	3	2	2	4	4	3	4	4	2	2	2	4	4	5	3	4	2	2	4	4	5	3
393	3	3	3	3	2	4	4	3	2	4	3	4	5	4	5	5	4	3	4	5	4	5
394	4	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	4	3	2	1	2	1	2	4
395	2	2	4	2	2	3	2	2	3	4	5	3	4	4	2	2	4	5	3	4	4	2
396	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	4	1	2	3	2	2	1	4	1	2
397	1	1	3	3	2	2	2	3	1	1	3	2	4	1	2	2	1	3	2	4	1	2
398	2	3	4	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	2	2	2	2	3	4
399	2	2	2	2	3	2	3	3	4	4	2	2	2	2	1	2	4	2	2	2	2	1
400	1	1	3	3	2	2	2	3	1	1	3	2	4	1	2	2	1	3	2	4	1	2

Tabel Lampiran 4.

Tranformasi Data Ordinal Distribusi Jawaban Responden ke Data Interval

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	3.484	3.474	3.312	2.396	3.971	2.566	4.223	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	4.138
3.465	3.484	2.654	2.503	3.056	3.971	3.239	4.223	2.607	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.914	3.868	2.643	2.558	2.619	2.590	3.122	4.138
2.003	3.484	1.940	3.312	3.056	3.068	3.239	1.000	3.339	1.937	2.000	3.317	3.611	1.852	3.990	3.868	1.979	3.217	3.316	1.949	4.269	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	1.000	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.264	2.173	2.643	3.217	3.316	2.590	2.353	2.383
2.003	1.969	1.940	2.503	1.888	1.936	2.566	1.941	1.000	1.937	2.000	2.638	2.797	3.188	1.815	2.173	1.979	2.558	2.619	3.371	1.830	2.383
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	2.566	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.979	1.965	3.316	1.949	1.830	1.858
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	1.000	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	2.566	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	2.590	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	3.990	3.868	2.643	2.558	2.619	2.590	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	2.587	1.963	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	3.371	3.122	3.061
3.465	4.660	4.571	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	3.339	3.394	3.352	1.988	2.037	3.188	2.914	3.868	3.380	1.965	1.970	3.371	3.122	4.138
1.000	1.969	3.474	2.503	2.396	2.510	1.000	1.000	2.607	3.394	2.670	4.325	2.797	1.000	1.815	2.807	2.643	4.266	2.619	1.000	1.830	3.061
3.465	3.484	1.940	2.503	4.130	3.068	2.566	1.000	2.607	3.394	2.670	3.317	2.797	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	2.619	4.524	3.122	3.061
2.675	3.484	1.000	4.416	2.396	1.936	2.566	3.261	1.963	1.000	2.670	2.638	2.037	1.852	1.000	2.173	2.643	2.558	1.000	1.000	1.000	2.383
2.675	2.662	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	3.394	3.352	4.325	2.797	1.852	2.264	2.807	3.380	4.266	2.619	1.949	2.353	3.061
4.660	2.662	1.940	2.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.394	1.000	1.988	2.797	1.852	2.264	2.807	1.000	1.965	2.619	1.949	2.353	3.061
2.003	1.969	4.571	4.416	2.396	1.936	2.566	3.261	2.607	2.602	1.000	1.000	2.797	1.000	1.815	1.000	1.000	1.000	2.619	1.000	1.830	1.000
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	1.941	1.963	3.394	2.000	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	1.979	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	4.360	4.223	1.963	2.602	2.000	1.988	2.797	1.852	3.990	3.868	1.979	1.965	2.619	1.949	4.269	4.138
2.003	1.000	2.654	1.863	2.396	1.000	2.566	4.223	1.000	2.602	2.670	4.325	4.730	2.394	1.000	1.000	2.643	4.266	1.000	1.000	1.000	1.000
3.465	1.969	2.654	1.000	2.396	3.971	1.992	1.941	2.607	3.394	2.000	1.000	4.730	2.394	1.815	1.000	1.979	1.000	4.308	2.590	1.830	1.000
2.003	2.662	1.000	4.416	4.130	3.971	2.566	2.587	1.963	1.000	1.000	3.317	3.611	1.852	2.264	3.868	1.000	3.217	3.316	1.949	2.353	4.138
3.465	1.969	3.474	4.416	1.000	1.936	1.992	2.587	1.963	2.602	4.366	3.317	3.611	1.852	2.264	3.868	4.457	3.217	3.316	1.949	2.353	4.138
4.660	1.000	1.940	1.863	2.396	1.000	2.566	2.587	1.000	1.937	2.670	1.000	1.000	1.000	1.000	2.173	2.643	1.000	1.000	3.371	1.000	2.383

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
1.000	4.660	1.000	2.503	2.396	1.000	1.992	2.587	1.963	2.602	4.366	1.000	2.797	2.394	3.990	1.000	4.457	1.000	2.619	2.590	4.269	1.000
2.003	4.660	1.000	1.863	2.396	2.510	2.566	1.000	1.000	4.511	1.000	1.988	2.797	1.000	1.000	3.868	1.000	1.965	2.619	1.000	1.000	4.138
2.675	1.000	1.940	1.863	4.130	1.936	3.239	3.261	3.339	4.511	4.366	4.325	2.797	4.380	3.990	3.868	4.457	4.266	2.619	2.590	4.269	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	1.000	2.670	3.317	4.730	2.394	2.914	2.807	2.643	3.217	4.308	3.371	3.122	3.061
1.000	1.000	1.000	1.863	1.000	1.936	1.000	1.000	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.000	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	1.000	1.000	1.000
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	1.000	1.000	1.000
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.759	1.979	1.000	1.970	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.970	1.949	1.000	1.000
2.003	1.969	1.940	1.863	1.000	1.000	1.992	1.000	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.970	1.949	1.000	1.000
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	1.936	1.992	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	1.992	3.261	2.607	2.602	2.000	1.988	2.797	3.188	1.815	1.000	1.979	1.965	2.619	3.371	1.830	1.000
2.675	3.484	3.474	2.503	1.888	2.510	3.239	3.261	3.339	1.937	3.352	3.317	2.797	3.188	2.264	2.807	3.380	3.217	2.619	3.371	2.353	3.061
3.465	2.662	3.474	3.312	2.396	3.971	2.566	3.261	3.339	2.602	3.352	3.317	2.797	2.394	2.914	2.173	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	2.383
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	2.602	3.352	2.638	3.611	2.394	1.815	2.173	3.380	2.558	3.316	2.590	1.830	2.383
2.675	3.484	2.654	3.312	2.396	2.510	2.566	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
2.003	2.662	2.654	2.503	3.056	2.510	4.360	3.261	2.607	1.937	2.670	3.317	3.611	3.188	2.914	2.173	2.643	3.217	3.316	3.371	3.122	2.383
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	2.607	3.394	2.670	3.317	2.797	2.394	2.264	2.807	3.380	2.558	3.316	3.371	2.353	3.061
2.675	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	2.587	3.339	3.394	2.670	4.325	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	2.503	2.396	3.971	2.566	2.587	3.339	3.394	3.352	2.638	2.797	3.188	2.264	2.173	3.380	3.217	2.619	2.590	4.269	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	2.566	1.941	1.000	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	1.949	1.830	2.383
2.003	1.000	1.000	1.863	1.888	2.510	2.566	1.941	3.339	3.394	2.000	1.000	3.611	1.000	1.000	3.868	1.000	1.000	1.970	1.949	2.353	2.383
3.465	3.484	1.940	3.312	1.888	1.000	1.992	1.941	1.963	1.000	2.000	1.988	3.611	3.188	2.264	2.173	3.380	1.965	3.316	1.949	1.000	1.858
3.465	3.484	1.940	3.312	1.888	1.000	1.992	1.941	1.963	1.000	2.670	1.988	3.611	2.394	3.990	3.868	3.380	1.965	3.316	1.949	1.000	1.858
2.675	2.662	2.654	2.503	1.000	1.000	2.566	1.941	1.963	1.937	2.000	4.325	4.730	4.380	3.990	3.868	2.643	2.558	2.619	1.000	1.000	2.383
3.465	3.484	4.571	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	4.511	4.366	4.325	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	4.266	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	1.000	3.239	4.223	3.339	3.394	3.352	3.317	4.730	4.380	3.990	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	1.000	3.061
2.003	1.000	1.940	1.000	1.000	1.936	1.992	1.000	1.000	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	2.173	1.000	1.965	1.000	1.000	1.830	1.858
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.360	1.000	1.000	1.937	2.670	1.988	2.797	1.852	2.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.138
2.003	1.000	4.571	3.312	4.130	1.936	4.360	4.223	1.000	2.602	2.000	4.325	3.611	2.394	1.815	2.173	1.000	4.266	3.316	4.524	1.830	4.138
3.465	2.662	3.474	2.503	3.056	3.971	2.566	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	2.797	3.188	2.264	2.807	2.643	3.217	2.619	3.371	4.269	2.383

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	2.662	3.474	4.416	2.396	3.068	4.360	2.587	2.607	3.394	2.670	3.317	2.797	2.394	2.914	2.173	2.643	3.217	4.308	2.590	3.122	4.138
3.465	2.662	1.940	3.312	3.056	3.068	2.566	2.587	3.339	3.394	2.000	3.317	3.611	1.852	1.815	1.759	2.643	1.965	3.316	3.371	3.122	2.383
2.003	2.662	2.654	1.863	3.056	2.510	3.239	3.261	2.607	2.602	3.352	3.317	3.611	2.394	2.264	2.807	2.643	2.558	1.970	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	1.940	3.312	3.056	1.000	2.566	2.587	2.607	3.394	3.352	4.325	1.000	2.394	2.914	2.807	2.643	1.965	3.316	3.371	1.000	2.383
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.465	3.484	3.474	2.503	4.130	3.068	4.360	3.261	2.607	4.511	3.352	3.317	2.797	3.188	3.990	2.807	3.380	3.217	2.619	4.524	3.122	4.138
1.000	1.969	1.940	1.863	2.396	2.510	2.566	2.587	2.607	3.394	2.000	3.317	2.037	1.852	2.914	2.807	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	2.383
1.000	3.484	2.654	2.503	1.000	1.000	3.239	4.223	1.000	1.000	2.000	2.638	3.611	2.394	1.815	2.807	3.380	2.558	2.619	1.000	1.000	3.061
2.003	1.969	1.000	2.503	2.396	2.510	3.239	2.587	3.339	3.394	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	1.000	2.619	2.590	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	3.239	3.261	3.339	3.394	2.670	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	3.061
2.003	1.000	1.000	1.000	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.988	2.037	1.000	1.000	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.759	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.000	1.888	1.000	1.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.815	1.759	1.979	1.965	1.000	1.949	1.000	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.000	1.815	1.759	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.936	1.992	1.000	1.963	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.759	1.979	1.000	1.000	1.000	1.830	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.000	1.815	1.759	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.000	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.988	2.037	1.000	1.815	1.000	1.000	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.003	1.000	1.000	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.970	1.949	1.830	1.858
1.000	1.000	1.940	1.863	1.000	1.936	1.000	1.941	1.963	1.937	1.000	1.988	1.000	1.852	1.815	1.759	1.000	1.965	1.970	1.000	1.830	1.000
2.003	1.000	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.963	1.000	1.000	1.988	2.037	1.000	1.000	1.759	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.000	1.000	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.759	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.000	1.815	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000
4.660	3.484	4.571	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	2.602	2.670	2.638	4.730	3.188	2.914	2.173	3.380	4.266	3.316	3.371	2.353	3.061
2.003	2.662	2.654	1.863	1.888	1.000	1.000	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.797	1.000	1.000	1.759	2.643	2.558	1.970	1.949	1.000	1.000
2.003	1.969	1.000	1.863	1.000	1.000	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.000	1.979	1.000	1.970	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.000	1.863	1.000	1.936	1.992	1.941	1.963	1.000	1.000	1.988	1.000	1.000	1.815	1.759	1.979	1.000	1.970	1.000	1.830	1.858

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
2.675	3.484	3.474	2.503	3.056	3.971	2.566	3.261	2.607	2.602	2.670	3.317	2.797	2.394	2.914	3.868	3.380	3.217	2.619	3.371	4.269	2.383
2.003	1.969	1.000	1.863	1.000	1.936	1.992	1.000	1.963	1.000	2.000	1.988	1.000	1.000	1.815	1.000	1.979	1.000	1.970	1.000	1.830	1.858
2.003	2.662	2.654	2.503	1.888	2.510	4.360	1.941	3.339	4.511	4.366	4.325	4.730	3.188	2.914	3.868	2.643	2.558	2.619	1.949	2.353	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	1.000	1.941	1.963	2.602	2.000	1.000	2.037	1.852	1.815	1.000	2.643	2.558	2.619	2.590	1.000	1.000
1.000	1.969	1.940	1.000	2.396	1.000	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.759	1.979	1.965	1.000	2.590	1.000	1.858
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.068	3.239	4.223	4.396	4.511	4.366	4.325	4.730	4.380	3.990	2.807	4.457	4.266	4.308	4.524	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	1.000	1.000	1.000	1.759	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	2.654	2.503	2.396	1.936	3.239	3.261	1.000	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.914	2.807	1.979	2.558	2.619	2.590	1.830	3.061
2.003	1.969	1.000	1.000	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.000	1.000	1.949	1.830	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.936	1.992	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.815	1.000	1.979	1.000	1.000	1.000	1.830	1.858
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.000	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.941	1.000	1.000	2.000	1.988	1.000	1.000	1.815	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000
3.465	3.484	2.654	3.312	4.130	3.068	4.360	3.261	2.607	4.511	2.670	4.325	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	2.558	3.316	4.524	3.122	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	2.566	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.000	2.643	2.558	2.619	2.590	1.000	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	1.992	1.941	4.396	4.511	4.366	4.325	2.037	1.000	1.000	1.759	2.643	2.558	2.619	2.590	1.000	1.858
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	2.566	3.261	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.807	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	2.566	3.261	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.807	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
3.465	3.484	4.571	4.416	4.130	2.510	3.239	3.261	3.339	4.511	3.352	4.325	4.730	3.188	2.264	3.868	3.380	4.266	4.308	4.524	2.353	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	2.670	2.638	2.797	1.000	1.815	1.000	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
2.003	1.969	1.940	1.863	3.056	1.936	4.360	1.000	2.607	1.937	2.670	1.000	3.611	4.380	1.000	2.173	1.979	1.965	1.970	3.371	1.830	4.138
1.000	4.660	1.940	1.863	1.000	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	3.352	3.317	3.611	1.852	1.000	1.000	4.457	1.965	1.970	1.000	1.830	1.858
2.003	1.000	1.000	2.503	1.888	1.936	4.360	4.223	1.963	1.937	4.366	4.325	2.797	1.852	1.815	1.759	1.000	1.000	2.619	1.949	1.830	4.138
2.003	1.969	1.940	1.863	1.000	1.936	3.239	1.941	1.963	2.602	2.000	3.317	3.611	1.000	3.990	1.759	1.979	1.965	1.970	1.000	1.830	3.061
1.000	1.000	1.000	1.000	1.888	2.510	2.566	1.941	1.963	3.394	4.366	1.988	3.611	2.394	1.815	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	2.353	2.383
2.003	1.969	1.940	1.863	3.056	1.936	1.000	4.223	4.396	1.937	2.000	1.000	2.797	1.852	1.000	2.807	1.979	1.965	1.970	3.371	1.830	1.000
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	2.638	2.797	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	2.662	4.571	3.312	3.056	2.510	4.360	2.587	1.000	1.937	2.670	3.317	4.730	4.380	2.914	3.868	2.643	4.266	3.316	3.371	2.353	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	3.474	2.503	1.888	2.510	3.239	1.941	1.000	2.602	2.000	2.638	2.797	2.394	2.914	2.807	2.643	3.217	2.619	1.949	2.353	3.061

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	2.566	2.587	2.607	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	2.558	2.619	2.590	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.264	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	2.566	2.587	3.339	3.394	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	2.607	2.602	3.352	2.638	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	2.590	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	1.969	2.654	1.863	1.000	1.936	3.239	3.261	1.963	1.937	2.000	2.638	3.611	1.852	2.264	2.173	1.979	3.217	3.316	1.949	1.830	1.858
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	2.643	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	1.000	1.963	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	2.807	2.643	3.217	1.000	1.949	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	1.000	1.941	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	2.807	3.380	1.000	1.970	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	2.662	1.940	1.863	2.396	3.971	4.360	1.941	1.963	3.394	2.000	4.325	4.730	2.394	2.914	2.807	4.457	4.266	1.970	1.949	3.122	1.858
4.660	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	1.963	3.394	4.366	2.638	4.730	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	1.949	3.122	4.138
3.465	3.484	2.654	3.312	4.130	2.510	3.239	2.587	3.339	2.602	3.352	3.317	4.730	3.188	3.990	3.868	2.643	3.217	2.619	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	1.000	2.602	2.670	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	3.217	2.619	1.000	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	2.670	2.638	2.797	3.188	2.264	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	3.239	2.587	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	4.457	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	3.394	2.000	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	4.308	3.371	3.122	1.858
2.003	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	3.394	2.000	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	4.308	3.371	3.122	1.858

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
2.003	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	1.937	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	4.308	3.371	1.830	3.061
2.003	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	3.394	2.000	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	4.308	3.371	3.122	1.858
2.675	2.662	3.474	3.312	2.396	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	1.000	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	1.979	1.965	1.000	1.000	2.353	1.000
2.003	2.662	1.940	3.312	3.056	3.068	3.239	4.223	1.963	1.937	3.352	1.988	3.611	2.394	1.000	2.807	3.380	3.217	4.308	1.949	1.830	3.061
3.465	3.484	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	1.963	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	1.949	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	3.239	1.000	2.607	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	3.868	2.643	3.217	1.000	2.590	3.122	2.383
2.003	3.484	2.654	2.503	3.056	2.510	3.239	1.000	2.607	3.394	3.352	3.317	2.797	3.188	2.264	2.173	2.643	3.217	1.000	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	1.940	1.863	1.888	1.936	3.239	1.941	3.339	1.937	3.352	3.317	3.611	1.852	2.914	2.807	1.979	3.217	1.970	3.371	1.830	3.061
3.465	3.484	1.940	1.863	3.056	2.510	3.239	3.261	3.339	3.394	2.670	3.317	2.797	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	3.316	3.371	3.122	2.383
1.000	1.969	1.940	2.503	1.888	2.510	2.566	2.587	3.339	1.937	2.000	1.988	2.037	2.394	2.264	3.868	2.643	2.558	2.619	3.371	1.830	1.858
2.675	3.484	3.474	1.863	3.056	3.971	2.566	3.261	3.339	3.394	3.352	2.638	3.611	3.188	3.990	3.868	4.457	2.558	3.316	3.371	3.122	3.061
2.003	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	1.941	3.339	4.511	3.352	3.317	3.611	3.188	1.815	2.807	3.380	3.217	1.970	3.371	4.269	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	2.607	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	2.590	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	2.503	2.396	1.936	1.992	1.941	1.963	3.394	2.670	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	1.979	1.965	1.970	1.949	3.122	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	1.992	1.941	2.607	2.602	2.670	2.638	2.037	1.852	1.815	1.759	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	2.383
2.003	2.662	1.940	2.503	1.888	1.000	2.566	1.941	1.963	1.000	2.000	1.988	2.797	1.000	1.815	1.000	1.000	2.558	1.970	1.949	1.000	1.858
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	4.730	4.380	3.990	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	3.484	2.654	3.312	2.396	1.000	1.992	1.941	1.963	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.000	1.965	1.970	1.949	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	2.510	1.992	1.000	1.000	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	1.965	1.000	1.000	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	4.325	4.730	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	4.223	3.339	3.394	4.366	4.325	3.611	3.188	3.990	2.807	3.380	3.217	4.308	3.371	3.122	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.000	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	1.965	1.970	1.949	1.000	2.383
3.465	3.484	4.571	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	4.366	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	2.566	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	2.558	2.619	2.590	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	2.566	1.941	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	2.558	1.970	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	1.000	1.941	1.963	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.000	1.000	1.970	1.949	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	4.396	3.394	3.352	4.325	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	3.217	3.316	4.524	3.122	3.061
2.675	3.484	3.474	2.503	3.056	3.068	3.239	3.261	2.607	2.602	2.670	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	3.380	3.217	3.316	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	1.000	1.863	1.888	2.510	2.566	4.223	1.963	3.394	3.352	1.988	2.797	1.852	1.815	1.759	2.643	2.558	4.308	1.949	3.122	3.061

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	2.566	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	2.590	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	4.360	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	4.457	4.266	3.316	3.371	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	1.988	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	3.312	2.396	3.971	3.239	3.261	3.339	3.394	2.670	1.988	2.037	3.188	2.914	2.807	4.457	3.217	3.316	3.371	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	4.457	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	4.457	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	3.868	3.380	3.217	2.619	2.590	3.122	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	3.239	3.261	2.607	2.602	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	1.000	3.217	3.316	2.590	2.353	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.971	4.360	4.223	4.396	4.511	3.352	3.317	4.730	3.188	3.990	2.807	4.457	4.266	4.308	4.524	4.269	3.061
2.003	2.662	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	4.416	3.056	3.971	3.239	3.261	3.339	3.394	4.366	3.317	2.797	3.188	2.264	2.173	4.457	3.217	3.316	3.371	3.122	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	2.566	1.941	1.963	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	2.558	1.970	1.949	2.353	2.383
3.465	2.662	2.654	3.312	2.396	3.068	3.239	2.587	4.396	3.394	2.000	2.638	2.797	3.188	1.815	2.807	3.380	3.217	2.619	4.524	3.122	1.858
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	4.325	4.730	4.380	3.990	3.868	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	1.992	2.587	2.607	1.937	2.000	1.988	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	1.965	2.619	2.590	1.830	1.858
2.675	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	2.607	2.602	2.000	1.988	3.611	1.852	1.815	1.759	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	1.858
2.675	2.662	2.654	3.312	4.130	3.068	4.360	4.223	4.396	4.511	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	3.380	4.266	4.308	4.524	4.269	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.068	4.360	4.223	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	3.380	4.266	4.308	3.371	3.122	3.061
3.465	4.660	4.571	4.416	3.056	3.068	3.239	4.223	4.396	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	4.308	4.524	3.122	3.061
3.465	2.662	2.654	2.503	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	4.457	4.266	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	3.312	2.396	1.936	3.239	2.587	3.339	2.602	3.352	4.325	4.730	4.380	3.990	3.868	1.979	3.217	2.619	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.000	1.963	1.937	1.000	1.988	2.797	2.394	2.264	1.759	1.979	1.965	1.000	1.949	1.830	1.000
3.465	3.484	2.654	3.312	1.888	1.936	2.566	1.941	2.607	3.394	2.000	2.638	2.037	1.852	1.815	1.759	1.979	2.558	1.970	2.590	3.122	1.858
4.660	2.662	2.654	3.312	2.396	2.510	1.992	3.261	1.963	2.602	2.000	1.988	3.611	1.000	3.990	1.000	2.643	1.965	3.316	1.949	2.353	1.858
3.465	4.660	3.474	4.416	3.056	1.936	4.360	3.261	3.339	4.511	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	1.979	4.266	3.316	3.371	4.269	2.383

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
4.660	1.000	4.571	1.000	1.888	3.971	1.000	1.000	3.339	2.602	1.000	2.638	4.730	4.380	1.000	1.759	4.457	1.000	1.000	3.371	2.353	1.000
2.675	1.000	1.940	1.000	4.130	1.000	1.000	1.941	1.963	1.000	3.352	3.317	4.730	1.852	2.264	1.000	1.000	1.000	1.970	1.949	1.000	3.061
2.003	1.000	2.654	4.416	1.000	3.971	2.566	3.261	1.000	2.602	4.366	4.325	2.797	1.000	3.990	2.807	4.457	2.558	3.316	1.000	2.353	4.138
4.660	1.000	2.654	1.000	3.056	1.000	3.239	1.000	2.607	4.511	2.000	1.988	4.730	3.188	1.000	1.000	1.000	3.217	1.000	2.590	4.269	1.858
2.003	2.662	1.000	4.416	1.000	1.936	4.360	1.000	1.963	1.937	3.352	1.000	4.730	4.380	1.000	2.173	1.979	4.266	1.000	1.949	1.830	3.061
2.675	1.000	3.474	4.416	1.000	1.000	4.360	1.000	2.607	1.000	4.366	2.638	4.730	3.188	1.000	1.759	1.000	4.266	1.000	2.590	1.000	4.138
3.465	1.000	2.654	1.863	4.130	1.000	3.239	1.000	2.607	2.602	3.352	1.000	2.037	3.188	1.000	2.173	1.000	3.217	1.000	2.590	2.353	3.061
2.675	1.969	1.940	1.863	1.888	3.068	3.239	1.941	2.607	2.602	2.000	2.638	2.797	1.852	2.264	1.759	3.380	3.217	1.970	2.590	2.353	1.858
2.675	4.660	1.000	4.416	1.000	1.000	1.000	1.941	4.396	2.602	2.000	1.988	1.000	4.380	2.914	2.173	1.000	1.000	1.970	4.524	2.353	1.858
4.660	1.000	1.940	3.312	2.396	1.000	1.992	4.223	2.607	4.511	2.000	3.317	2.797	2.394	1.000	2.173	4.457	1.965	3.316	2.590	2.353	1.000
4.660	1.000	1.940	4.416	1.000	1.936	2.566	1.000	4.396	3.394	2.000	2.638	2.037	2.394	3.990	1.000	3.380	1.965	2.619	1.949	2.353	4.138
3.465	4.660	4.571	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	2.602	4.366	4.325	4.730	3.188	2.914	2.173	2.643	4.266	4.308	4.524	3.122	3.061
3.465	2.662	3.474	4.416	3.056	2.510	3.239	4.223	4.396	3.394	2.670	3.317	4.730	3.188	2.914	3.868	3.380	2.558	3.316	4.524	3.122	3.061
3.465	2.662	3.474	2.503	4.130	1.936	3.239	3.261	2.607	2.602	4.366	3.317	4.730	3.188	2.914	3.868	2.643	4.266	3.316	4.524	3.122	3.061
3.465	3.484	1.940	4.416	2.396	2.510	4.360	2.587	4.396	3.394	2.670	4.325	3.611	4.380	3.990	2.807	3.380	2.558	4.308	3.371	4.269	4.138
2.675	2.662	1.940	2.503	1.888	2.510	2.566	3.261	1.963	2.602	2.000	1.988	2.797	1.852	1.815	2.173	2.643	1.965	1.970	2.590	1.830	1.858
1.000	2.662	4.571	2.503	1.000	2.510	1.992	4.223	1.000	1.937	1.000	4.325	1.000	2.394	3.990	1.000	1.979	1.000	4.308	1.000	2.353	4.138
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.000	2.566	1.000	1.963	1.937	2.000	1.988	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	2.383
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	3.239	2.587	1.963	3.394	2.000	1.988	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	1.970	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	3.971	4.360	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	3.971	4.360	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	3.371	3.122	3.061

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	3.971	4.360	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	3.971	4.360	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	1.963	2.602	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	3.868	2.643	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	1.963	2.602	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	3.868	2.643	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	1.963	2.602	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	3.868	2.643	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	2.037	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	1.949	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	1.000	1.000	4.511	3.352	1.000	2.037	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	1.000	1.949	3.122	3.061
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	1.963	2.602	3.352	2.638	3.611	2.394	3.990	3.868	2.643	3.217	2.619	3.371	2.353	4.138
3.465	3.484	2.654	3.312	4.130	3.068	4.360	3.261	2.607	4.511	2.670	4.325	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	2.558	4.308	3.371	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	3.312	3.056	2.510	3.239	2.587	2.607	1.937	1.000	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	1.979	1.000	2.619	2.590	3.122	3.061
2.003	1.969	2.654	3.312	3.056	2.510	3.239	2.587	2.607	1.937	1.000	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	1.979	1.000	2.619	2.590	3.122	3.061
2.003	2.662	2.654	1.863	1.000	1.000	3.239	4.223	1.963	1.937	2.000	1.988	4.730	2.394	1.815	2.173	1.979	1.965	1.970	4.524	2.353	1.858
3.465	3.484	2.654	3.312	4.130	3.068	4.360	3.261	2.607	4.511	2.670	4.325	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	2.558	4.308	3.371	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	3.056	1.936	4.360	1.000	3.339	2.602	1.000	2.638	3.611	1.852	1.815	2.173	2.643	1.000	2.619	3.371	1.830	1.858
2.003	3.484	3.474	2.503	3.056	2.510	1.992	2.587	1.963	2.602	2.000	3.317	3.611	4.380	3.990	3.868	2.643	1.965	3.316	3.371	4.269	4.138
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	3.971	1.000	1.941	2.607	3.394	4.366	1.000	2.037	4.380	1.000	2.807	3.380	4.266	1.000	1.949	4.269	1.000
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.000	1.000	2.587	4.396	1.937	3.352	1.000	4.730	1.000	1.815	1.000	1.979	3.217	1.000	4.524	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.936	1.000	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.815	1.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.000	1.000	1.000	1.888	1.936	1.000	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.815	1.759	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.000	1.000	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	2.037	1.000	1.815	1.759	1.979	1.965	1.000	1.949	1.000	1.858
1.000	1.000	1.000	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	2.037	1.000	1.815	1.759	1.979	1.965	1.000	1.949	1.000	1.858
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	1.937	1.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.000	1.970	1.949	1.830	1.000
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.815	1.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.858
1.000	1.969	1.000	1.863	1.888	1.000	1.000	1.000	1.963	1.000	2.000	1.000	2.037	1.852	1.815	1.000	1.000	1.965	1.000	1.949	1.830	1.858
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	1.000
1.000	1.000	1.000	1.863	1.888	1.936	1.000	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.000
2.003	1.969	1.940	1.863	3.056	3.971	1.000	2.587	1.963	3.394	2.670	1.000	3.611	1.000	2.264	1.000	3.380	2.558	1.000	3.371	1.000	2.383
1.000	1.000	1.000	1.863	1.888	1.936	1.000	1.941	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.000

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
2.003	1.969	3.474	3.312	3.056	1.936	4.360	1.941	1.000	3.394	3.352	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.003	4.660	2.654	2.503	2.396	3.971	4.360	2.587	1.000	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.971	4.360	2.587	1.000	3.394	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	3.380	2.558	3.316	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.941	2.607	1.937	2.000	1.988	2.797	2.394	1.000	2.173	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	1.000
3.465	3.484	2.654	3.312	3.056	3.068	2.566	1.000	2.607	2.602	2.670	3.317	3.611	3.188	3.990	3.868	2.643	2.558	3.316	3.371	3.122	4.138
3.465	1.969	3.474	2.503	3.056	3.068	2.566	2.587	2.607	3.394	2.000	3.317	2.797	3.188	2.914	2.807	3.380	1.965	3.316	2.590	3.122	3.061
3.465	3.484	4.571	4.416	4.130	3.971	3.239	4.223	4.396	4.511	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	1.992	2.587	2.607	1.937	2.000	1.988	2.797	2.394	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	1.000
2.003	1.000	1.940	1.000	1.888	1.000	1.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	1.000	1.000
3.465	1.969	3.474	3.312	3.056	3.068	4.360	4.223	3.339	3.394	4.366	4.325	3.611	3.188	2.264	2.173	3.380	4.266	4.308	3.371	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	1.888	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	1.969	3.474	3.312	3.056	3.068	4.360	4.223	3.339	3.394	4.366	4.325	3.611	3.188	2.264	2.173	3.380	4.266	4.308	3.371	3.122	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	2.510	3.239	1.000	1.000	3.394	2.670	2.638	4.730	1.852	3.990	3.868	3.380	2.558	2.619	4.524	1.830	4.138
2.003	3.484	3.474	1.863	2.396	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	2.643	2.558	3.316	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	1.992	1.941	2.607	1.937	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	2.602	2.000	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	1.965	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	3.484	3.474	2.503	3.056	1.936	1.992	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	2.662	1.940	3.312	2.396	1.936	4.360	2.587	1.000	2.602	2.000	3.317	2.037	1.852	1.815	1.000	2.643	1.965	3.316	1.949	1.830	1.858
2.003	3.484	1.940	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	3.990	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	4.138
2.003	3.484	1.940	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	3.990	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	4.138
2.003	1.969	2.654	2.503	2.396	2.510	3.239	3.261	1.963	2.602	2.000	2.638	2.037	3.188	2.264	2.173	2.643	1.965	2.619	1.949	3.122	2.383
2.003	2.662	3.474	3.312	2.396	2.510	3.239	3.261	2.607	3.394	2.670	4.325	3.611	3.188	2.264	2.807	3.380	2.558	4.308	3.371	3.122	2.383
2.675	2.662	1.940	3.312	1.888	1.936	3.239	1.941	2.607	2.602	2.000	1.988	3.611	1.852	1.815	2.173	2.643	1.965	1.970	3.371	1.830	1.858
3.465	2.662	3.474	1.863	1.888	2.510	2.566	2.587	2.607	2.602	3.352	3.317	2.797	3.188	2.914	2.173	2.643	3.217	3.316	2.590	3.122	3.061
2.675	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	1.963	1.937	2.000	3.317	3.611	4.380	2.264	2.807	1.979	1.965	3.316	3.371	4.269	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	3.068	3.239	2.587	1.963	3.394	2.670	3.317	4.730	3.188	3.990	3.868	3.380	2.558	3.316	4.524	3.122	4.138
3.465	1.969	2.654	2.503	1.000	1.936	1.000	1.941	1.000	1.937	1.000	1.988	1.000	1.852	2.914	2.173	1.979	1.000	1.970	1.000	1.830	3.061
2.003	1.969	3.474	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	2.607	3.394	4.366	2.638	3.611	3.188	1.815	1.759	3.380	4.266	2.619	3.371	3.122	1.858
1.000	1.969	1.940	1.000	1.000	1.936	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.000	3.611	1.000	1.815	2.173	1.979	1.965	1.000	3.371	1.000	1.858

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
1.000	1.000	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	2.587	1.000	1.000	2.670	1.988	3.611	1.000	1.815	1.759	1.000	2.558	1.970	3.371	1.000	1.858
2.003	2.662	3.474	4.416	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	2.394	2.914	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	2.353	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	2.396	1.936	2.566	2.587	3.339	3.394	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.759	3.380	1.965	1.970	1.949	1.830	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.936	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	3.611	3.188	2.914	2.807	1.979	1.965	1.970	3.371	3.122	3.061
1.000	1.969	2.654	2.503	1.000	1.000	1.000	1.941	3.339	2.602	2.000	1.988	4.730	1.000	1.815	1.000	2.643	1.965	1.970	4.524	1.000	1.858
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	3.239	2.587	1.963	2.602	2.670	1.988	2.037	2.394	1.000	1.000	2.643	2.558	1.970	1.949	2.353	1.000
1.000	1.969	1.000	2.503	1.888	2.510	2.566	1.941	1.963	2.602	1.000	1.988	1.000	2.394	1.000	2.173	2.643	1.000	1.970	1.000	2.353	1.000
3.465	2.662	3.474	3.312	1.000	2.510	1.000	1.941	4.396	2.602	2.000	3.317	2.797	3.188	2.264	1.000	2.643	1.965	3.316	2.590	3.122	2.383
2.003	3.484	1.000	2.503	1.888	1.936	3.239	1.000	1.963	2.602	2.670	1.988	3.611	1.000	1.000	1.000	2.643	2.558	1.970	3.371	1.000	1.000
2.003	2.662	2.654	2.503	1.888	1.000	2.566	3.261	4.396	2.602	2.670	1.988	3.611	3.188	1.815	1.759	2.643	2.558	1.970	3.371	3.122	1.858
2.003	1.000	1.940	1.000	1.000	1.936	1.000	1.941	1.000	1.937	1.000	1.988	2.037	2.394	1.000	1.759	1.979	1.000	1.970	1.949	2.353	1.000
2.675	2.662	2.654	2.503	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
1.000	1.969	2.654	1.863	1.888	1.000	2.566	2.587	2.607	2.602	3.352	4.325	4.730	2.394	2.264	1.000	2.643	3.217	4.308	4.524	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	1.936	1.992	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	1.888	1.000	1.000	1.000	1.963	1.937	1.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.000	1.979	1.000	1.970	1.949	1.830	1.858
2.675	1.969	1.940	2.503	2.396	2.510	3.239	2.587	3.339	2.602	2.000	1.988	2.037	1.852	2.914	2.807	2.643	1.965	1.970	1.949	1.830	3.061
1.000	3.484	1.940	4.416	2.396	2.510	4.360	2.587	3.339	1.937	2.670	1.000	2.797	1.852	2.914	2.807	1.979	2.558	1.000	2.590	1.830	3.061
1.000	1.969	1.940	1.863	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.858
1.000	1.000	1.000	1.000	1.888	1.000	3.239	3.261	1.963	1.000	1.000	2.638	3.611	2.394	3.990	2.173	1.000	1.000	2.619	3.371	2.353	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	1.000	1.000	1.000	4.269	4.138
1.000	1.969	1.940	1.863	1.000	1.000	1.000	1.941	1.000	1.937	2.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.000	1.979	1.965	1.000	1.949	1.830	1.000
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.000	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.000	1.000	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	2.607	3.394	2.670	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	2.558	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	2.503	3.056	1.936	1.992	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
1.000	3.484	1.940	2.503	4.130	1.000	1.992	2.587	1.963	3.394	2.000	1.000	2.797	4.380	3.990	2.807	3.380	1.965	1.000	2.590	4.269	4.138
2.003	1.969	3.474	3.312	3.056	2.510	2.566	3.261	3.339	2.602	3.352	3.317	3.611	2.394	2.264	2.807	2.643	3.217	3.316	3.371	2.353	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	3.394	3.352	3.317	4.730	4.380	3.990	2.807	3.380	3.217	3.316	4.524	4.269	4.138
2.003	1.000	1.940	1.863	1.000	1.936	1.992	1.000	1.963	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.000	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
1.000	1.969	1.940	1.863	1.888	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.000	1.979	1.000	1.000	1.949	1.000	1.000
1.000	1.969	1.940	1.863	1.000	1.000	1.992	1.000	1.000	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.000	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.000
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000
3.465	2.662	2.654	1.000	4.130	3.971	3.239	1.000	2.607	3.394	2.000	1.988	2.797	1.852	2.264	1.000	3.380	1.965	1.970	2.590	1.830	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	4.511	4.366	3.317	3.611	4.380	3.990	3.868	4.457	4.266	3.316	3.371	4.269	4.138
1.000	1.000	1.000	1.000	2.396	2.510	3.239	4.223	4.396	4.511	4.366	4.325	4.730	4.380	3.990	3.868	4.457	4.266	4.308	4.524	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	4.223	3.339	1.000	3.352	1.000	1.000	3.188	3.990	3.868	1.000	3.217	1.000	1.000	3.122	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.000	4.366	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	4.266	1.000	1.000	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	3.261	1.963	3.394	2.000	1.988	3.611	3.188	3.990	3.868	3.380	1.965	1.970	3.371	3.122	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	2.914	2.807	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	3.061
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	3.990	3.868	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.000	4.366	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	4.266	1.000	1.000	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	3.990	3.868	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	2.914	2.807	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	3.061
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.000	4.366	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	4.266	1.000	1.000	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	3.990	3.868	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	2.510	3.239	4.223	3.339	3.394	3.352	3.317	4.730	4.380	3.990	2.807	3.380	3.217	3.316	4.524	4.269	4.138
2.003	1.000	1.940	1.863	1.000	1.936	1.992	1.000	1.963	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.000	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
1.000	1.969	1.940	1.863	1.888	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.000	1.979	1.000	1.000	1.949	1.000	1.000
1.000	1.969	1.940	1.863	1.000	1.000	1.992	1.000	1.000	1.000	2.000	1.988	2.037	1.852	1.815	1.759	1.000	1.965	1.970	1.949	1.830	1.858
2.003	1.969	1.940	1.000	1.000	1.000	1.992	1.000	1.963	1.000	1.000	1.000	2.037	1.852	1.000	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	1.830	1.000
2.003	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.979	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
3.465	2.662	2.654	1.000	4.130	3.971	3.239	1.000	2.607	3.394	2.000	1.988	2.797	1.852	2.264	1.000	3.380	1.965	1.970	2.590	1.830	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	4.511	4.366	3.317	3.611	4.380	3.990	3.868	4.457	4.266	3.316	3.371	4.269	4.138
1.000	1.000	1.000	1.000	2.396	2.510	3.239	4.223	4.396	4.511	4.366	4.325	4.730	4.380	3.990	3.868	4.457	4.266	4.308	4.524	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	2.587	2.607	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	3.394	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	3.380	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	4.223	3.339	1.000	3.352	1.000	1.000	3.188	3.990	3.868	1.000	3.217	1.000	1.000	3.122	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	4.396	1.000	4.366	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	4.266	1.000	1.000	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	3.239	3.261	1.963	3.394	2.000	1.988	3.611	3.188	3.990	3.868	3.380	1.965	1.970	3.371	3.122	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	3.056	3.068	3.239	3.261	3.339	2.602	3.352	2.638	2.797	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	2.619	2.590	3.122	3.061
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	4.223	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	2.914	2.807	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	3.061
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	4.366	1.988	2.037	4.380	3.990	3.868	1.979	4.266	1.970	1.949	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	3.990	3.868	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	4.138
4.660	4.660	4.571	4.416	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.000	4.366	1.000	1.000	4.380	3.990	3.868	1.000	4.266	1.000	1.000	4.269	4.138
3.465	3.484	3.474	3.312	4.130	3.971	4.360	3.261	3.339	1.937	3.352	1.988	2.037	3.188	3.990	3.868	1.979	3.217	1.970	1.949	3.122	4.138
3.465	3.484	4.571	4.416	4.130	3.971	3.239	4.223	4.396	4.511	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	3.868	4.457	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	1.936	1.992	2.587	2.607	1.937	2.000	1.988	2.797	2.394	1.000	1.000	1.979	1.965	1.970	2.590	2.353	1.000
2.003	1.000	1.940	1.000	1.888	1.000	1.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.037	1.000	1.000	1.759	1.000	1.000	1.000	1.949	1.000	1.000
3.465	1.969	3.474	3.312	3.056	3.068	4.360	4.223	3.339	3.394	4.366	4.325	3.611	3.188	2.264	2.173	3.380	4.266	4.308	3.371	3.122	2.383
3.465	3.484	3.474	3.312	1.888	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	3.352	3.317	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	3.217	3.316	3.371	3.122	3.061
3.465	1.969	3.474	3.312	3.056	3.068	4.360	4.223	3.339	3.394	4.366	4.325	3.611	3.188	2.264	2.173	3.380	4.266	4.308	3.371	3.122	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	2.510	3.239	1.000	1.000	3.394	2.670	2.638	4.730	1.852	3.990	3.868	3.380	2.558	2.619	4.524	1.830	4.138
2.003	3.484	3.474	1.863	2.396	1.936	1.992	1.000	1.000	2.602	2.670	3.317	3.611	2.394	2.914	2.807	2.643	2.558	3.316	3.371	2.353	3.061
2.675	2.662	2.654	2.503	2.396	2.510	1.992	1.941	2.607	1.937	2.670	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	1.979	2.558	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	1.941	1.000	2.602	2.000	2.638	2.797	2.394	2.264	2.173	2.643	1.965	2.619	2.590	2.353	2.383
2.675	3.484	3.474	2.503	3.056	1.936	1.992	2.587	2.607	2.602	2.670	2.638	3.611	3.188	2.914	2.807	2.643	2.558	2.619	3.371	3.122	3.061
3.465	2.662	1.940	3.312	2.396	1.936	4.360	2.587	1.000	2.602	2.000	3.317	2.037	1.852	1.815	1.000	2.643	1.965	3.316	1.949	1.830	1.858

Legislasi Nasional (X1)				Aktor Pemeran Serta (X2)					Nilai-nilai (X3)					Konteks (X4)		Perda APBD (Y)					
Kuis 1	Kuis 2	Kuis 3	Kuis 4	Kuis 5	Kuis 6	Kuis 7	Kuis 8	Kuis 9	Kuis 10	Kuis 11	Kuis 12	Kuis 13	Kuis 14	Kuis 15	Kuis 16	Kuis 17	Kuis 18	Kuis 19	Kuis 20	Kuis 21	Kuis 22
2.003	3.484	1.940	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	3.990	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	4.138
2.003	3.484	1.940	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.988	2.037	1.852	3.990	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	1.830	4.138
2.003	1.969	2.654	2.503	2.396	2.510	3.239	3.261	1.963	2.602	2.000	2.638	2.037	3.188	2.264	2.173	2.643	1.965	2.619	1.949	3.122	2.383
2.003	2.662	3.474	3.312	2.396	2.510	3.239	3.261	2.607	3.394	2.670	4.325	3.611	3.188	2.264	2.807	3.380	2.558	4.308	3.371	3.122	2.383
2.675	2.662	1.940	3.312	1.888	1.936	3.239	1.941	2.607	2.602	2.000	1.988	3.611	1.852	1.815	2.173	2.643	1.965	1.970	3.371	1.830	1.858
3.465	2.662	3.474	1.863	1.888	2.510	2.566	2.587	2.607	2.602	3.352	3.317	2.797	3.188	2.914	2.173	2.643	3.217	3.316	2.590	3.122	3.061
2.675	1.969	1.940	3.312	3.056	2.510	3.239	3.261	1.963	1.937	2.000	3.317	3.611	4.380	2.264	2.807	1.979	1.965	3.316	3.371	4.269	2.383
2.675	2.662	2.654	2.503	1.888	3.068	3.239	2.587	1.963	3.394	2.670	3.317	4.730	3.188	3.990	3.868	3.380	2.558	3.316	4.524	3.122	4.138
3.465	1.969	2.654	2.503	1.000	1.936	1.000	1.941	1.000	1.937	1.000	1.988	1.000	1.852	2.914	2.173	1.979	1.000	1.970	1.000	1.830	3.061
2.003	1.969	3.474	1.863	1.888	2.510	1.992	1.941	2.607	3.394	4.366	2.638	3.611	3.188	1.815	1.759	3.380	4.266	2.619	3.371	3.122	1.858
1.000	1.969	1.940	1.000	1.000	1.936	1.992	1.941	1.000	1.937	2.000	1.000	3.611	1.000	1.815	2.173	1.979	1.965	1.000	3.371	1.000	1.858
1.000	1.000	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	2.587	1.000	1.000	2.670	1.988	3.611	1.000	1.815	1.759	1.000	2.558	1.970	3.371	1.000	1.858
2.003	2.662	3.474	4.416	1.000	1.000	1.992	1.941	1.963	1.937	2.000	1.988	2.037	2.394	2.914	3.868	1.979	1.965	1.970	1.949	2.353	3.061
2.003	1.969	1.940	1.863	2.396	1.936	2.566	2.587	3.339	3.394	2.000	1.988	2.037	1.852	1.000	1.759	3.380	1.965	1.970	1.949	1.830	1.000
1.000	1.000	2.654	2.503	1.888	1.936	1.992	2.587	1.000	1.000	2.670	1.988	3.611	1.000	1.815	1.759	1.000	2.558	1.970	3.371	1.000	1.858

Lampiran Tabel 5.

Uji Validitas Instrumen Penelitian

		Pertanyaan
Pertanyaan1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.332* .036 40
Pertanyaan2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.360* .022 40
Pertanyaan3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.371* .291 40
Pertanyaan4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.321* .044 40
Pertanyaan5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.371* .018 40
Pertanyaan6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.373* .004 40
Pertanyaan7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.451 .393* 40
Pertanyaan8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.239* .061 40
Pertanyaan9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.399* .030 40
Pertanyaan10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.344* .075 40
Pertanyaan11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.385* .075 40
Pertanyaan12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.496** .001 40
Pertanyaan13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.344* .108 40
Pertanyaan14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.358* .375 40
Pertanyaan15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.592** .108 40

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

Reliability Statistics

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan1	52.81507	135.361	.377	.908
Pertanyaan2	52.81422	133.265	.423	.908
Pertanyaan 3	53.02600	133.115	.444	.907
Pertanyaan 4	52.93387	134.342	.395	.908
Pertanyaan 5	53.05865	129.689	.610	.903
Pertanyaan 6	53.06195	128.462	.604	.903
Pertanyaan 7	52.97845	134.908	.498	.906
Pertanyaan 8	53.01987	134.408	.370	.909
Pertanyaan 9	53.35167	133.655	.509	.906
Pertanyaan 10	52.95052	134.304	.413	.908
Pertanyaan 11	52.96620	130.135	.593	.904
Pertanyaan 12	52.93840	129.844	.558	.905
Pertanyaan 13	52.60670	136.103	.367	.908
Pertanyaan 14	53.21205	130.867	.655	.903
Pertanyaan 15	53.20412	126.602	.748	.900
Pertanyaan 16	53.04010	128.255	.624	.903
Pertanyaan 17	52.96505	129.854	.590	.904
Pertanyaan 18	52.99547	130.446	.550	.905
Pertanyaan 19	52.87320	136.256	.394	.908
Pertanyaan 20	53.10547	130.894	.558	.905
Pertanyaan 21	53.08865	124.865	.746	.900
Pertanyaan 22	52.82817	125.702	.652	.902

Tabel Lampiran 7.

Pengujian Asumsi Klasik**(1) Uji Normalitas Data****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Legnas_X1	.101	400	.069
Aktor_X2	.069	400	.073
Nilai2_X3	.090	400	.067
Konteks_X4	.156	400	.066
P_APB_D	.103	400	.065

a. Lilliefors Significance Correction

(2) Uji Asumsi Multikolinieritas**Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Legnas_X1	.391	2.557
	Aktor_X2	.351	2.852
	Nilai2_X3	.519	1.928
	Konteks_X4	.480	2.082

a. Dependent Variable: P. APBD_Y

(3) Uji Asumsi Heterokedastisitas**Correlations**

		Legnas_X1	Aktor_X2	Nilai2_X3	Konteks_X4	P_APB_D_Y
Legnas_X1	Pearson Correlation	1	.746**	.590**	.655**	.676**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	400	400	400	400	400
Aktor_X2	Pearson Correlation	.746**	1	.657**	.659**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	400	400	400	400	400
Nilai2_X3	Pearson Correlation	.590**	.657**	1	.587**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	400	400	400	400	400
Konteks_X4	Pearson Correlation	.655**	.659**	.587**	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	400	400	400	400	400
P_APB_D_Y	Pearson Correlation	.676**	.768**	.894**	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	400	400	400	400	400

Uji F dan t: Pengaruh Legislasi Nasional (X_1), Aktor Pemeran Serta (X_2), Nilai-Nilai (X_3), Konteks/Lingkungan (X_4) terhadap Pembuatan Perda APBD (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.876	.875	1.456126	1.654

b. Dependent Variable: P_APBD_Y

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5932.019	4	1483.005	699.431	.000
Residual	837.520	395	2.120		
Total	6769.538	399			

b. Dependent Variable: P_APBD_Y

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.068	.304		.223	.824		
	Legnas_X1	.026	.036	.021	.726	.468	.391	2.557
	Aktor_X2	.235	.033	.213	7.134	.000	.351	2.852
	Nilai2_X3	.733	.029	.629	25.595	.000	.519	1.928
	Konteks_X4	.448	.060	.191	7.487	.000	.480	2.082

a. Dependent Variable: P_APBD_Y

Analisa/Uji Regresi Linier Ganda (Uji t/Parsial) Pengaruh Sub-variabel Bebas (X_1 s.d X_4) pada Variabel Terikat (Y)

a. Dependent Variable: P_APBD_Y

Tabel Lampiran 10.

Informan Penelitian

1. Jenis Kelamin Informan		
Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	6	100,00
Perempuan	0	0,00
Jumlah	6	100,00
2. Tingkat Pendidikan Informan		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sarjana (S1)	3	50,00
Magister (S2)	2	33,33
Doktor (S3)	1	16,67
Jumlah	6	100,00
3. Pekerjaan Informan		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS/TNI/Polri	1	16,67
DPRD	2	33,33
Dosen	1	16,67
LSM	1	16,67
Pengurus Partai Politik	1	16,67
Jumlah	6	100,00

Tabel Lampiran 11.

Pedoman Wawancara Mendalam

1	Waktu Wawancara		
	Hari/tanggal	:	
	Waktu mulai dan selesai	:	
2	Identitas Informan		
	Jenis kelamin	:	
	Pendidikan	:	
	Pekerjaan	:	
3	Fokus/tema pertanyaan		
	Pertanyaan		Jawaban
	1. Pengaruh legislasi nasional (UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	:	
	2. Pengaruh aktor pemeran (gubernur, TAPD, DPRD, aktivis parpol, dan masyarakat) serta terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	:	
	3. Pengaruh nilai-nilai (nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	:	
	4. Pengaruh konteks/lingungan (kondisi budaya-politik dan sosial-ekonomi) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur	:	

Lampiran Tabel 12.

Instrumen Strategi Triangulasi

Strategi Triangulasi	Isi Wawancara (Rangkuman)	Subtansi Data
Fokus/tema 1: Pengaruh legislasi nasional (UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur		
1. Narasumber	Isi wawancara informan kalangan pemerintah (Andi, Suhandoyo, dan Rofik) tentang pengaruh legislasi nasional terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Legislasi nasional berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim
2. Teori	Pandangan normatif kesesuaian proses pembuatan Perda APBD Jatim dengan legislasi nasional (UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen)	Teori dan praktek sudah/harus artikulatif/paralel
3. Metode	Wawancara mendalam dan observasi	Verbal/kualitatif
Pembandingan		
(1) Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan non-pemerintah (Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi) tentang pengaruh legislasi nasional terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Pada kasus tertentu legislasi nasional belum/tidak berpengaruh pada pembuatan Perda APBD Jatim
(2) Teori	Pandangan kritis terkait kesesuaian proses pembuatan Perda APBD Jatim dengan legislasi nasional (UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen)	Teori dan praktek, pada kasus tertentu tidak artikulatif/paralel
(3) Metode	Wawancara mendalam dan observasi pada waktu yang berbeda	Verbal/kualitatif
Fokus/tema 2: Pengaruh aktor pemeran Serta terhadap proses Pembuatan Perda APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		
1. Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan kalangan pemerintah (Andi,	Aktor pemeran serta berpengaruh pada

Strategi Triangulasi	Isi Wawancara (Rangkuman)	Subtansi Data
	Suhandoyo, dan Rofik) tentang pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda APBD Jatim	proses pembuatan Perda APBD Jatim
2. Teori	Pandangan normatif dari informan pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Joko Widodo pengaruh aktor pemeran serta terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Teori dan praktek, artikulatif/paralel
3. Metode	Wawancara mendalam dan observasi	Verbal/kualitatif
<i>Pembandingan</i>		
(1) Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan non-pemerintah (Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi) tentang pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda APBD Jatim	Pada kasus tertentu aktor pemeran serta belum berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim, kecuali aktor dari kalangan pemerintah
(2) Teori	Pandangan kritis dari informan non pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Joko Widodo pengaruh aktor pemeran serta terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Teori dan praktek, pada kasus tertentu tidak artikulatif/paralel
(3) Metode	Wawancara mendalam dan observasi pada waktu yang beda	Verbal/kualitatif
Fokus/tema 3: Pengaruh nilai-nilai (nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur		
1. Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan kalangan pemerintah (Andi, Suhandoyo, dan Rofik) tentang pengaruh nilai-nilai terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Nilai-nilai berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim
2. Teori	Pandangan normatif dari	Teori dan praktek,

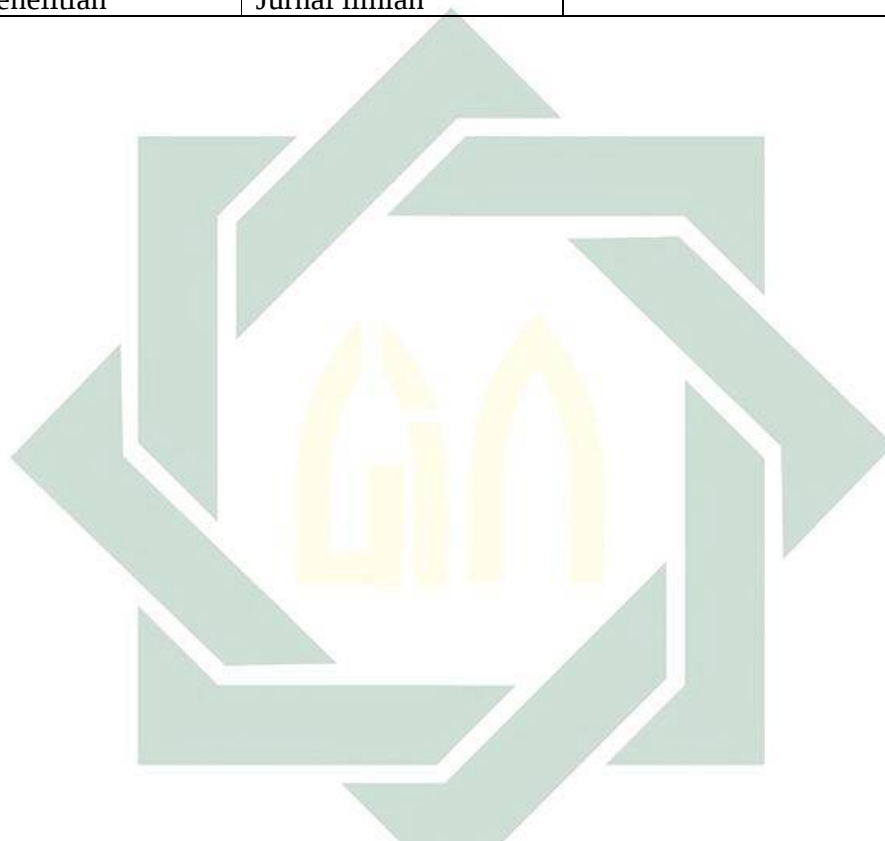
Strategi Triangulasi	Isi Wawancara (Rangkuman)	Subtansi Data
	informan pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Norman Flynn pengaruh nilai-nilai terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	artikulatif/paralel
3. Metode	Wawancara mendalam dan observasi	Verbal/kualitatif
<i>Pembandingan</i>		
(1) Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan kalangan non pemerintah (Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi) tentang pengaruh nilai-nilai terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Pada kasus tertentu nilai-nilai belum/tidak berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim
(2) Teori	Pandangan kritis dari informan non pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Norman Flynn pengaruh nilai-nilai terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Teori dan praktek, pada kasus tertentu tidak artikulatif/paralel
(3) Metode	Wawancara mendalam dan observasi pada waktu yang beda	Verbal/kualitatif
Fokus/tema 4: Pengaruh konteks/lingkungan (kondisi budaya-politik dan sosial-ekonomi) terhadap proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur		
1. Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan kalangan pemerintah (Andi, Suhandoyo, dan Rofik) tentang pengaruh konteks/lingkungan terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Konteks/lingkungan berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim
2. Teori	Pandangan normatif dari informan pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Charles F. Andrain pengaruh konteks/lingkungan	Teori dan praktek, artikulatif/paralel

Strategi Triangulasi	Isi Wawancara (Rangkuman)	Subtansi Data
	terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	
3. Metode	Wawancara mendalam dan observasi	Verbal/kualitatif
<i>Pembandingan</i>		
(1) Narasumber/pengamat	Isi wawancara informan kalangan non pemerintah (Agus Miftahussurur, Mathur Khusairi, dan Norman Zein Nahdi) tentang pengaruh konteks/lingkungan terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Konteks/lingkungan berpengaruh pada proses pembuatan Perda APBD Jatim
(2) Teori	Pandangan kritis dari informan non pemerintah tentang teori kebijakan publik Budi Winarno, Suharno, dan Charles F. Andrain pengaruh konteks/lingkungan terhadap pembuatan Perda APBD Jatim	Teori dan praktek artikulatif/paralel
(3) Metode	Wawancara mendalam dan observasi pada waktu yang beda	Verbal/kualitatif

Lampiran Tabel 14.

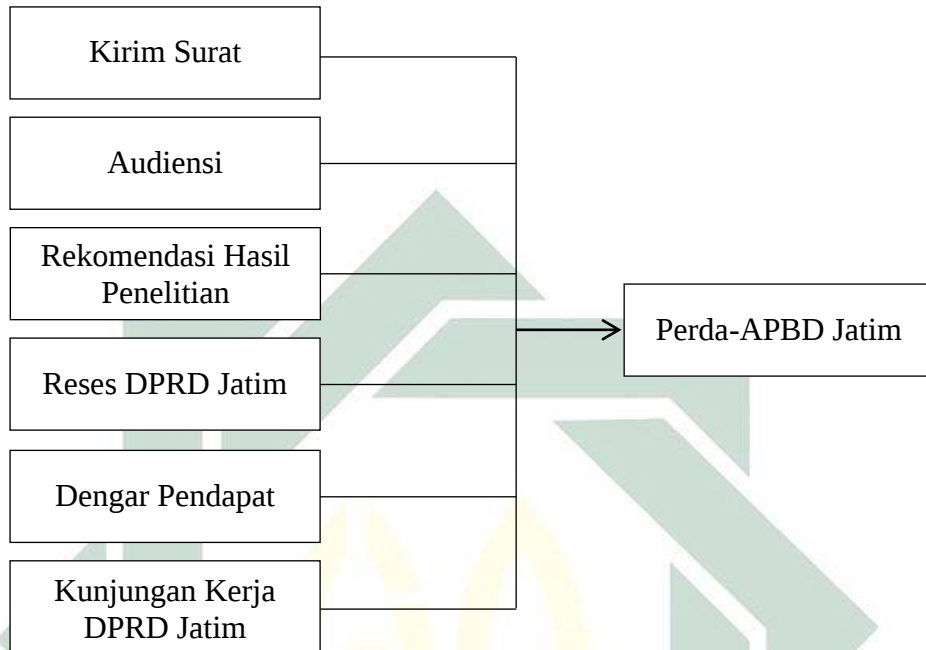
Pedoman Dokumentasi

Jenis Dokumen	Sumber	Subtansi Isi
Data kelembagaan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	
Konsep/teori	Buku/literature	
Penelitian	Jurnal ilmiah	



Lampiran Gambar 2.

**Jalur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Perda
tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur**



EXECUTIVE SUMMARY

Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Proses Pembuatan Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur

Abstract

Mukhlisin Sa'ad

This research aims to explain and describe the influence of national legislation, values, actors, and context/environment variables (independent variable) to the process of making Local Regulation on Regional Government Budget (dependent variable) in East Java Provincial Government. This research method uses quantitative-qualitative methods and data analysis uses multiple linier regression model and deep understanding of subjective data.

Based on this research data, the results of multiple regression F-test of these research variables, it is known that: $F_{\text{count}} (821,263) > F_{\text{table}} (2,394)$ and probability value of $\text{Sig.}_{(0,000)} < \alpha_{(0,05)}$, which means the influence independent variable to the dependent variable is significant. Based on the results on t-test, the partial influence of independent variable to the dependent variable is also significant, except in sub-variable testing national legislation had no significant effect.

This data findings—although in certain case the data shows opposite facts—generally parallel with qualitative data obtained from in-depth interviews with informants. Thus, it can be concluded the data of this research findings articulates with the conceptual-theoretical some scientists of public policy which says that the independent variable effect on the dependent variable that is described in this research.

Keywords : actors, context/environment, Local Regulation, national legislation, Regional Government Budget, and values

A. Latar Belakang Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda tentang APBD (Perda APBD) di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat krusial untuk diidentifikasi. Dengan teridentifikasikannya, Pemerintah Daerah, DPRD-Komisi Legislasi dan kalangan terkait lain di Provinsi Jawa Timur, pertama, dapat mengetahui kisaran pandangan pelbagai kalangan terkait mengenai isu dan opini tentang seputar proses pembuatan Perda APBD. Kedua, bisa

mengevaluasi secara deskriptif-eksplanatif terhadap proses dan hasil Perda APBD, yang mana bisa saja seperti halnya perda-perda lain tentang ekonomi di beberapa daerah lain, melahirkan proses dan hasil yang bertentangan dengan semangat filosofi pemberlakuan otonomi daerah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dapat dikatakan menjadi suatu keharusan sebagai masukan dalam proses pembuatan Perda APBD pada periode berikutnya. Mengadaptasi pendapat Akmal Boedianto dan Budi Winarno faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembuatan Perda APBD sangat banyak dan beragam.¹

Proses pembuatan Perda APBD merupakan tahap kedua dari lima dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni, tahap perumusan kebijakan publik (*public policy formulation*). Pada tahap ini masalah yang masuk dibahas dan kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Dalam studi kebijakan publik, ketika proses pembuatan Perda APBD diletakkan sebagai variabel terikat (*dependent variable*)—bukan sebagai variabel bebas (*independent variable*)—pemaparan dan penjelasan yang dapat membantu mengurai proses pembuatannya bukan terfokus pada dampak yang diakibatkannya tetapi pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya.²

Proses pembuatan Perda APBD dapat dilakukan pemerintah daerah karena pemerintahan pusat menetapkan kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan 1 Januari 2001. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan politik dan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur

¹Akmal Boedianto, "Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, h. 36-37; Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), h. 123-142.

²Winarno, *ibid.*, h. 25; Joko Widodo, *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Strategik Kontemporer Administrasi Publik* (Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag, 2003), h. 98-100.

pemerintahan sendiri (*self government*) berdasarkan preferensi masyarakat sesuai dengan undang-undang dan mengelola pendanaan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, artinya pembahasan dan praktik desentralisasi tidak dapat dilakukan secara parsial antara desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah yang desentralistik membutuhkan sejumlah transfer kewenangan formal untuk perencanaan, manajemen, dan peningkatan dan alokasi sumber daya serta pendanaan yang memadai.³

Namun demikian, praktik desentralisasi politik dan administratif/fiskal yang dilakukan secara komprehensif tidak menjadi jaminan keberhasilan ketercapaian tujuan pemberlakuan desentralisasi. Pemberlakuan desentralisasi secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat—melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan varian-variannya—tetapi sebaliknya dipelbagai daerah melahirkan pelbagai kebijakan yang bias kepentingan ekonomi daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah ini kemudian oleh pemerintah pusat dibatalkan. Menurut data penelitian Soekarwo, selama tahun 2003 pemerintah pusat membatalkan 7.000 Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan pemerintah pusat membatalkan perda-perda tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memberatkan publik.⁴

³Abdullah Zainie, “Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 265. Lihat juga, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 17 dan 65; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65.

⁴Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 1.

B. Signifikansi dan Fokus Penelitian

⁶Nanda Pratama Sukoco, "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur," *Jejaring Administrasi Publik* II, No. 8 (2012): 99-102.

menunjukkan bagaimana nilai-nilai akan diwujudkan. Nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik ialah nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Konteks atau lingkungan (*context or environment*) ialah sistem politik (lingkungan) yang terdiri dari sub-sistem di dalamnya yang melatar belakangi atau menjadi tempat beroperasinya proses pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem ini terdapat interaksi antarsub-sistem yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan publik. Sub-sistem-sub-sistem tersebut yang terpenting memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan adalah budaya politik dan kondisi sosial-ekonomi. Peraturan Daerah (Perda) (*local regulation*) adalah alat aturan sah pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal. Sedangkan APBD (*regional government budget*) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Perda.⁹

Berdasarkan deskripsi data empirik dan teoritis tersebut, hipotesis penelitian ini sebagai berikut: (1) hipotesis inti “diduga legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur”, (2) hipotesis pokok “diduga legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap proses

⁹Boedianto, *op. cit.*, h. 29-39; Widodo, *op. cit.*, h. 98-100; Winarno, *op. cit.*, h. 16-17; Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 16-17; Norman Flynn, “Explaining the New Public Management: the Importance of Context,” in Kate McLaughlin *et al.* (eds.), *New Public Management: Current Trends and Future Prospects* (New York: Roudledge, 2002), h. 67-71; Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 76-77 dan 110; UU No. 10 Tahun 2004 yang pada perkembangannya diganti/dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 240-242; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2).

pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur”, dan (3) hipotesis khusus “diduga sub-variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur”.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan gabungan penelitian eksplanasi-kuantitatif (*explanative quantitative*) dan deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative*) dan pengambilan datanya dilakukan secara cross-seksional (*cross-sectional research*).¹⁰

Variabel penelitian ini, Perda APBD sebagai variabel terikat dan legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan sebagai variabel bebas. Unit analisis dan pengamatan penelitian adalah semua *stakeholders* dan individu *stakeholders* proses pembuatan Perda APBD Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian mencakup semua pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi anggota perancang Perda APBD, anggota DPRD pembahas Perda APBD, dan masyarakat. Sampel penelitian ditarik dari populasi melalui dua tahap: (1) sampel pejabat yang menjadi anggota panitia perancang dan pembahas Perda APBD Provinsi Jawa Timur, dan (2) sampel populasi masyarakat. Penarikan sampelnya menggunakan rumus Slovin.¹¹

¹⁰Earl R. Babbie, *The Practices of Social Research*, second edition (Belmont, California: Wardsworth Publishing Company, 1979), h. 205-206; Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods*, Fourth Edition (Boston: Allyn and Bacon, 2000), h. 22 dan 30; Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 34.

¹¹Ida Bagoes Mantra dan Kasto, “Penentuan Sampel,” dalam Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 166-167.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan instrumen pengumpulan datanya adalah wawancara terstruktur (kuesioner), wawancara mendalam, dan observasi partisipasi terbatas. Teknik pengolahan data penelitian menggunakan metode pengolahan data penelitian: (1) kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS Statistics for Windows versi 17.0, dan (2) pengolahan data penelitian kualitatif.¹²

Instrumen penelitian tersebut sebelum digunakan diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan komputer program SPSS. Uji validitas instrumen penelitian menggunakan rumus Product Moment dan uji reliabilitas (*reliability*)-nya menggunakan Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dari kuesioner ini dengan skala ordinal tersebut ditransformasikan (dirubah) peneliti ke dalam skala interval menggunakan metode suksesif interval (*method successive interval*) dengan menggunakan komputer program XLSTAT (Win) versi 2015.1. Tujuan transformasi data ini agar sesuai dengan persyaratan prosedur operasional analisis model regresi berganda (*multiple regression model*). Untuk memperkuat kesimpulan analisis dilakukan tes statistik asumsi klasik, tes regresi linier berganda, uji F, dan uji t dengan menggunakan komputer program SPSS.¹³

Lihat juga Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65.

¹²Neuman, *op. cit.*, h. 420; Vredendregt, *op. cit.*, h. 79 dan 92; Nigel Fielding, "Qualitative Interviewing," in Nigel Gilbert (ed.), *Researching Social Life* (London: Sage Publications, 1996), h. 151; Sofian Effendi dan Chris Manning, "Prinsip-prinsip Analisa Data," dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 272-276.

¹³Djamaludin Ancok, "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian," dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 124-140; Vredendregt, *op. cit.*, h. 15; Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 216; Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 178-196; Asdar and Badrullah, "Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematics Education Studies)," *International Journal of Social Science and Humanities Research* 4, Issue. 2 (April-June, 2016): 358-361; Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi* (Yogyakarta: BPFE. 2000), h. 57 dan 128.

Pengujian asumsi klasik (*classical assumption test*) menggunakan model persamaan regresi ganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares: OLS*). Asumsi klasik yang dilihat adalah asumsi kesalahan penelitian menggunakan uji: (1) asumsi distribusi normal (normalitas), (2) asumsi bebas kolinieritas, dan (3) asumsi bebas heteroskedastisitas. Uji normalitas (*normality test*) residu menggunakan uji *goodness of fit test* tipe Kolmogorov-Smirnov dan regresi linier ganda model analisis *plot*. Uji asumsi multikolinieritas (*multicollinearity assumption test*) menggunakan *OLS*. Sedangkan uji asumsi heteroskedastisitas (*heteroscedasticity assumption test*) menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan regresi linier berganda metode *scatter-plot* (alur sebaran). Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan penelitian ini. Penggunaan uji F (*F-test*) untuk menjelaskan pengaruh simultan/serentak variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t (*t-test*) untuk menjelaskan pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data kualitatif menggunakan metode analisis penelitian kualitatif. Pengolahan dan analisa data dilakukan bersamaan dalam proses penelitian. Mekanisme teknisnya: (1) pengumpulan data, (2) pengolahan data, dan (3) kemudian dilanjutkan dengan analisa data. Tujuan penggunaan mekanisme ini agar data penelitian mendapatkan derajat keabsahan (*trustworthiness*). Pencapaian derajat keabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan data dengan kriteria: (1) derajat kredibilitas, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) kepastian.¹⁴

¹⁴Neuman, *op. cit.*, h. 420; Sotirios Saratankos, *Social Research* (South Yanna: Macmillan Publishers Australia PTY LTD, 1998), h. 82; J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 173.

D. Analisis dan Pembahasan Data Penelitian

Tabel 1
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Keterangan: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{p-1} = 0$ = H_0 diterima, H_a ditolak
 $H_a: \beta_k \neq 0$, untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$ = H_a diterima, H_0 ditolak

¹⁵Isadora Newman and Caroly R. Benz, *Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum* (Southern Illinois University Press, 1998), h. 83; Robert E. Stake, "Case Studies," in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: Sage, 1994), h. 241; Neuman, *op. cit.*, h. 12 dan 124-125; Moleong, *op. cit.*, h. 183-184.

Tabel 2
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Keterangan: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{p-1} = 0$ = H_0 diterima, H_a ditolak
 $H_a: \beta_k \neq 0$, untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$ = H_a diterima, H_0 ditolak

[illegible]

Pada uji hipotesis khusus ditemukan hipotesis khusus ke-1 sampai dengan ke-5, ke-7, dan ke-9: pengaruh parsial/individual variabel UU, Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan. Rentang pengaruhnya variabel UU dan gubernur dan TAPD negatif yakni -0,089 dan -0,079 dan Perpu, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen, kelompok penekan, dan masyarakat sangat rendah yakni 0,146, 0,117, dan 0,127. Sedangkan hipotesis khusus ke-6, ke-8, dan ke-10 sampai dengan ke-16: pengaruh parsial variabel DPRD, partai politik, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, ideologi, budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan. Rentang pengaruhnya variabel DPRD, partai politik, nilai-nilai organisasi, ideologi, dan budaya politik cukup tinggi yakni sebesar 0,495, 0,531, 0,518, 0,589, dan 0,596, nilai-nilai pribadi dan kebijakan tinggi yakni sebesar 0,664 dan 0,731, dan kondisi sosial-ekonomi rendah yakni hanya 0,290.

Data temuan hipotesis pokok ke-1 tersebut, kontradiksi dengan pandangan informan penelitian kalangan pemerintah, yang berpendapat bahwa proses pembuatan Perda APBD secara normatif sesuai dengan legislasi nasional. Contohnya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 terlihat: (1) landasan peraturan perundang-undangnya adalah UU, PP, Perpres, dan Permen, (2) LHP atas LK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 mendapatkan penilaian WTP dari BPK, dan (3) pandangan gubernur dan anggota DPRD bahwa perda tersebut wajar dan disetujui semua fraksi di DPRD, sesuai dengan yang disampaikan Badan

Anggaran DPRD Jawa Timur bahwa LPJ APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil, dan teknis.¹⁶ Sedangkan menurut informan non-pemerintah, terdapat isi/materi perda yang tidak sesuai dengan semangat legislasi nasional. Faktor penyebabnya kepentingan kalangan terkait dan tekanan dari pihak lain. Namun demikian, secara umum proses pembuatan Perda tentang APBD sesuai dengan legislasi nasional.¹⁷

Proses pembuatan perda tersebut menurut informan kalangan pemerintah, pemerintah, DPRD, kelompok penekan, partai politik, masyarakat, pandangan politik, organisasi, subjektif/pribadi, kebijakan, ideologi, budaya-politik dan sosial-ekonomi sangat berperan. Aktor yang paling berperan adalah DPRD dan pemerintah daerah. Peran pemerintah dan DPRD sebagai penyusun dan pengabsah perda sangat dominan dan memungkinkan terjalin hubungan manajerial-birokrasi, politik, dan yurisdiksi. Sedangkan peran masyarakat partisipan dilakukan melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, berkirim surat, penelitian, reses anggota DPRD, dan kunjungan kerja anggota DPRD. Selain itu, terdapat persaingan kepentingan politik, organisasi, pribadi, dan kebijakan antara pemerintah dan DPRD dalam proses pembentukannya, tetapi tetap dalam koridor peraturan-perundang-undangan. Budaya-politik dan sosial-ekonomi berpengaruh dalam

¹⁶Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015*, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2015*, tersedia di <http://www.bpk.go.id> (diakses pada 28 Agustus 2016); dan Berita Lima, "Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015", *Beritalima*, tersedia di <http://www.beritalima.com> (diakses pada 28 Agustus 2016).

¹⁷Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada 7 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Soekarwo, *op. cit.*, h. 49-50.

proses pembentukan perda tersebut dibuktikan dengan pandangan politik yang saling berkompetisi antara pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan argumentasi teoritis, norma hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.¹⁸

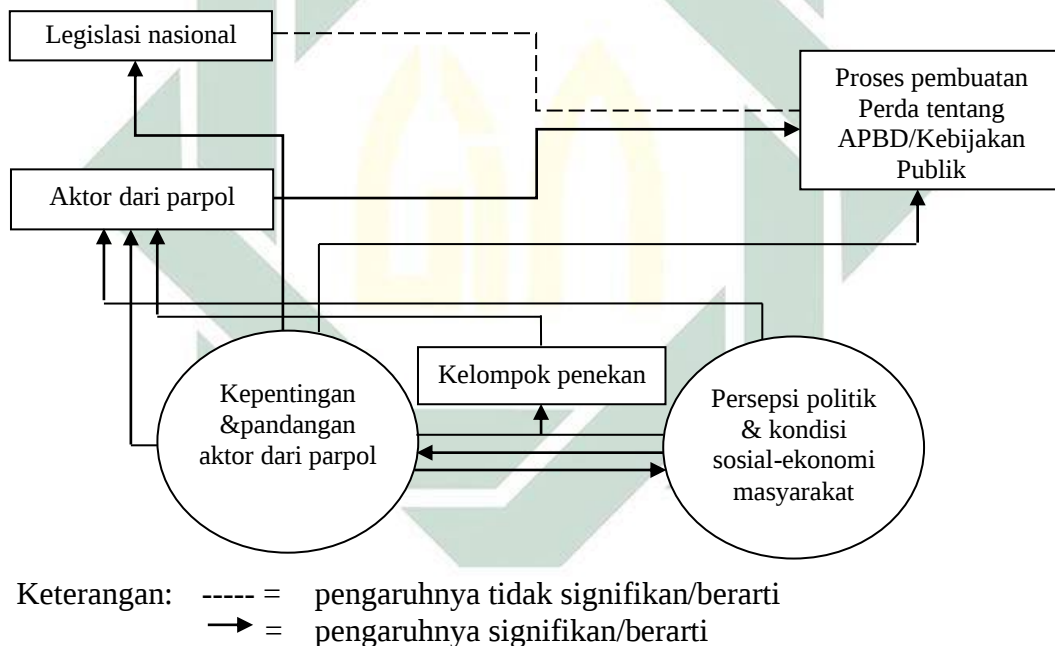
Berbeda dengan pendapat tersebut menurut informan dari kalangan non-pemerintah, masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam proses pembuatan Perda APBD, yang dibuktikan dengan belum diaturnya mekanisme keterlibatan masyarakat pada proses pembuatan perda dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan masyarakat, pandangan pelaku pembuat perda dan budaya politik serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pembuatan Perda APBD. Buktinya terlihat pada saat pembahasan perda seringkali terjadi negosiasi kepentingan untuk tujuan kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, untuk membuktikannya secara empirik sulit, tetapi gejala-gejalanya terasa di kalangan masyarakat Jawa Timur. Budaya-politik yang paling berpengaruh adalah pandangan para birokrasi senior (TAPD), gubernur, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dimana pandangan ini bisa bias subjektif, kelompok, dan faktor lain. Sedangkan pandangan masyarakat hanya berpengaruh kecil sekali—yakni diakomodir melalui mekanisme audiensi, dengar pendapat, pertemuan langsung dengan masyarakat, dan reses—termasuk dalam hal ini protes melalui demonstrasi dan keluar dari pelayanan pemerintah pengaruhnya juga demikian.¹⁹

¹⁸Wawancara mendalam dengan Andi, Suhandoyo, dan Rofik pada hari Minggu tanggal 21 dan 14 Agustus 2016 di Surabaya. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010* tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

¹⁹Wawancara mendalam dengan Agus Miftahussurur pada hari Minggu tanggal 14 dan 21 Agustus 2016 di Sidoarjo dan Mathur Khusairi dan Norman Zein Nahdi pada hari Senin tanggal 15 dan 22 Agustus 2016 di Bangkalan dan Surabaya. Lihat juga, Ilham Cendikia *et al.*, *Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*

Data temuan penelitian tersebut, secara empirik artikulatif dengan penelitian Nanda Pratama Sukoco dan Kalpie Astragina, desain normativitas, dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik yang digunakan penelitian ini. Namun, data temuan hasil uji parsial dan pendapat sebagian informan, data penelitian artikulatif dengan penelitian Habib Adjie *et al.*, dan Dewie Tri Wijayanti, dan artikulasinya dengan desain normativitas regulasi Indonesia dan konseptual-teoritis pelbagai ilmuwan kebijakan publik tersebut bervariasi.

Gambar 1
Variabel Paling Berpengaruh terhadap Proses Pembuatan
Perda tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan temuan penelitian tersebut—menurut perspektif argumentasi ilmiah proses pembuatan kebijakan publik—secara umum dapat dikonstruksikan konseptual-teoritis penelitian bahwa proses pembuatan Perda APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur merepresentasikan sebagai proses birokratis-administratif (bukan proses profesional dan politik) dan individual aktor

(Jakarta: PATTIRO dan ACCESS, 2007), h. 14; Albert O. Hirschman, *Strategi Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970), h. 39; dan Sukoco, *op. cit.*, h. 101.

pemeran serta resmi di internal organisasi pemerintahan daerah. Dalam proses pembuatan perda tersebut: (1) asal-muasalnya inisiatif dari pemerintah daerah (*executive heavy*), kemudian (2) dibahas dan disahkan di DPRD, dimana faktor yang berpengaruh positif adalah: (a) aktor pemeran serta resmi dari kalangan partai politik, (b) pandangan (nilai-nilai) politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi, dan (3) persepsi politik (budaya politik) dan kondisi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (kondisi sosial-ekonomi).

G. Kesimpulan

Temuan data penelitian tersebut dapat disimpulkan: pertama, pengaruh simultan variabel legislasi nasional, aktor pemeran serta, nilai-nilai, dan konteks/lingkungan terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat tinggi. Kedua, pengaruh variabel legislasi nasional terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel legislasi nasional: UU, Perpu, Perpres/Kepres, dan Permen/Kepmen terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya negatif dan sangat rendah. Data ini sesuai dengan pendapat informan non-pemerintah dan berbeda dengan pendapat informan kalangan pemerintah.

Ketiga, pengaruh aktor pemeran serta terhadap proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya sangat rendah. Pengaruh sub-variabel aktor pemeran serta: gubernur dan TAPD, kelompok penekan, dan masyarakat terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD tidak signifikan dengan rentang pengaruhnya negatif dan sangat rendah. Sedangkan pengaruh sub-

variabel aktor pemeran serta: DPRD dan partai politik terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah dan berbeda dengan pendapat informan kalangan non-pemerintah.

Keempat, pengaruh nilai-nilai terhadap proses pembuatan Perda APBD adalah signifikan dengan rentang pengaruhnya tinggi. Pengaruh sub-variabel nilai-nilai: politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah dan berbeda dengan pendapat informan non-pemerintah.

Kelima, pengaruh konteks/lingkungan terhadap proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya cukup tinggi. Pengaruh sub-variabel konteks/lingkungan: budaya politik, dan kondisi sosial-ekonomi terhadap variabel proses pembuatan Perda APBD signifikan dengan rentang pengaruhnya rendah dan cukup tinggi. Data ini sesuai dengan pendapat informan kalangan pemerintah dan non-pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib *et al.* 2012. *Ketidakberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sejak Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya.
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ancok, Djamaludin. 1989. "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, h. 122-146, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asdar and Badrullah. 2016. "Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematics Education Studies)." *International Journal of Social Science and Humanities Research* 4, Issue. 2 (April-June): 356-363.
- Astragina, Kalpie. 2012. *Analisis Faktor-faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur*, tersedia di <http://www.unesa.ac.id> (diakses pada 16 Nopember 2015).
- Babbie, Earl R. 1979. *The Practics of Social Research*, second edition. Belmont, California: Wardsworth Publishing Company.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2015. *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2015*, tersedia di <http://www.bpk.go.id> (diakses pada 28 Agustus 2016).
- Boedianto, Akmal. 2008. "Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Cendikia, Ilham, *et al.* 2007. *Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: PATTIRO dan ACCESS.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Effendi, Sofian dan Chris Manning. 1989. "Prinsip-Prinsip Analisa Data." Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, h. 263-264, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Fielding, Nigel. 1996. "Qualitative Interviewing." Nigel Gilbert (ed.). *Researching Social Life*, pp. 135-153. London: Sage Publications.
- Flynn, Norman. 2002. "Explaining the New Public Management: the Importance of Context." Kate McLaughlin *et al.* (eds.), *New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, pp. 57-76. New York: Roudledge.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hirschman, Albert O. 1970. *Strategi Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Dian Rakjat, 1970.

- Lima, Berita. 2016. “Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2015”, *Beritalima*, tersedia di <http://www.beritalima.com> (diakses pada 28 Agusturs 2016).
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto. 1989. “Penentuan Sampel.” Masri Singarinbun dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, h. 149-174, edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, Lawrence W. 2000. *Social Research Methods*. Fourth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Newman, Isadora and Caroly R. Benz. 1998. *Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum*. Southern Illinois University Press.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03, Seri A, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Republik Indonesia. 2004. *UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Sekretariat Negara Jakarta.
- _____. 2011. *UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Sekretariat Negara Jakarta.
- _____. 2014. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sekretariat Negara Jakarta.
- _____. 2015. *UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Sekretariat Negara Jakarta.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.

- Saratankos, Sotirios. 1998. *Social Research*. South Yanna: Macmillan Publishers Australia PTY LTD.
- Soekarwo, 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stake, Robert E. 1994. "Case Studies." Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, pp. 236-247. Thousand Oaks, California: Sage.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukoco, Nanda Pratama. 2012. "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur," *Jejaring Administrasi Publik* II, No. 8: 91-103.
- Vredembregt, J. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Widodo, Joko. 2003. *Modul Teori Administrasi: Bunga Rampai Teori, Konsep dan Isue Strategik Kontemporer Administrasi Publik*. Surabaya: Program Magister Ilmu Administrasi-Program Pasca Sarjana Untag.
- Wijayanti, Dewie Tri. 2009. "Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan Jawa Timur: Sebuah Pendekatan "Fish Schale Multiscience"," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7, No. 4: 803-811.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainie, Abdullah. 2007. "Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah." Syamsuddin Haris (ed.). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, h. 265-276. Jakarta: LIPI Press.



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR : Un.07/1/TL.00/SK/368/P/ 2016

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF,
MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER,
UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;
b. bahwa nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF, MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER, UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut Keputusan terlampir sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
2. Pencairan tahap ke II (dua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
3. Pencairan dana penelitian Internasional tahap I (pertama) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan tahap 2 (dua) 20% (dua puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
4. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh. Ps 21) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 025.04.2.423770/2016, tanggal 7 Desember 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Mei 2016

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTOR PUSAT,



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NOMOR : Un.07/1/TL.00./SK / /P/ 2016

TANGGAL

Mei 2016

TENTANG

: PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMULA
INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF, MADYA INDIVIDUAL, MADYA
KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER, UNGGULAN
INTERNASIONAL, DAN UNGGULAN MULTI YEARS TAHUN 2016

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN MADYA INDIVIDUAL UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2016

NO	NAMA	FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH
1	Dr. H. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag NIP 197207111996031001	Tarbiyah dan Keguruan	WACANA RADIKALISME DALAM MATERI PELAJARAN PAI DI SMA	Rp.17.500.000
2	Drs. Taufiq Subty, M.Pd.I NIP 195506041983031015	Tarbiyah dan Keguruan	TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA DAN PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Komparasi Kurikulum CBSA tahun 1984, KBK Tahun 2004, KTSP Tahun 2006 dan K-13 Tahun 2013)	Rp.17.500.000
3	Drs Sutikno, M.Pd.I NIP.196808061994031003	Tarbiyah dan Keguruan	EFEKTIFITAS PENILAIAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR ASPEK AFEKTIF MATA PELAJARAN PAI DI SMP MA'ARIF 4 MANTUP LAMONGAN	Rp.17.500.000
4	Dr. Mohamad Salik M.Ag NIP. 196712121994031002	Tarbiyah dan Keguruan	DERADIKALISASI PENDIDIKAN ISLAM (Studi pada Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang)	Rp.17.500.000
5	Lukman Fahmi, S.Ag, M.Pd NIP 197311212005011002	Dakwah dan Komunikasi	EKSPRESI ESTETIK SASTRA DAKWAH DALAM NOVEL KARYA ASMA NADIA (Studi Multi Kasus Atas Novel Assalamualaikum Beijing, Surga Yang Tak Dirindukan, dan Jilbab in Love)	Rp.17.500.000
6	Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I NIP 196902081996032003	Ushuluddin dan Filsafat	KONFORMITAS AGAMA DAN KEBUDAYAAN (Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Multikultural di Desa Mojowarno Jombang)	Rp.17.500.000
7	Amirullah, S.Ag, MH NIP 197201012003121002	Syaria, dan Hukum	BATAS-BATAS HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ DAN KEMUNGKINAN SANKSI PIDANANYA PERSPEKTIF YURIDIS	Rp.17.500.000
8	Husnul Muttaqin, S.Sos, M.S.I NIP 197801202006041003	Dakwah dan Komunikasi	HOAX DAN KEMATIAN NALAR KRITIS (Sebuah Penelusuran Sosiologis Atas Beberapa Kasus Penyebaran Berita Bohong di Dunia Maya)	Rp.17.500.000
9	Dra. Hj. Mihmidaty Ya'cub, M.Pd.I NIP 195909111986032001	Tarbiyah dan Keguruan	MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI DOSEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (Studi Kasus Pada Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)	Rp.17.500.000
10	Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag NIP 196912121993031003	Tarbiyah dan Keguruan	KEBERADAAN BUKU AJAR FIKIH KURIKULUM 2013 DAN RELEVANSINYA DENGAN PENINGKATAN KREATIFITAS SISWA (Studi pada Siswa Kelas VII MTS Ma'arif 22 Mojosari Mantup Lamongan)	Rp.17.500.000

11	H. Abdul Djalal, M.Ag NIP 197009202009011003	Ushuluddin dan Filsafat	CARE OF ENVIRONMENT DALAM PRESPEKTIF RELIGIO-FILSOFIS	Rp.17.500.000	
12	Dr. Shaoudin, M.Pd.I NIP 197702202005011003	Tarbiyah dan Keguruan	TINGKAT MOTIVASI BERPRESTASI, MODALITAS BELAJAR, DAN TINGKAT INTERNAL LOCUS of CONTROL MAHASISWA PRODI PGMI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp.17.500.000	
13	Drs. Syamsuddin, M.Ag NIP 196709121996031003	Tarbiyah dan Keguruan	EPISTIMOLOGI PENDIDIKAN ANAK PRESPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW. DAN RELEVANSINYA DENGAN STRATEGI PENDIDIKAN ANAK MASA KINI	Rp.17.500.000	
14	Dra. Irma Soraya, M.Pd NIP 196709301993032004	Tarbiyah dan Keguruan	PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI MATERI BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM INTENSIF BAHASA INGGRIS, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp.17.500.000	
15	Muhammad Afdillah, S.Th.I, M.Si NIP. 198204212009011013	Ushuluddin dan Filsafat	REGULASI AHMADIYAH DI INDONESIA (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI Jawa Timur))	Rp.17.500.000	
16	Dr. H. Masyhudi Ahmad, M.Pd.I NIP 195606221986031002	Tarbiyah dan Keguruan	UJI COBA PRODUK KONSELING PSIKOTERAPI KEILMUAN DAN SHALAT (Studi Pengembangan Model Konseling dan Psikoterapi Islami Dasar Mengatasi Siswa Bermasalah Pada Sekolah Menengah di Surabaya)	Rp.17.500.000	
17	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag NIP 197110212001121002	Syariah dan Hukum	METODE INDUKTIF DALAM PENEMUAN MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Pengembangan Usul Fiqh Kontemporer)	Rp.17.500.000	
18	Dra. Arba'iyah YS, MA NIP 196405031991032002	Tarbiyah dan Keguruan	STUDI TENTANG PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HOLISTIC EDUCATION DI MUHAMMADIYAH OUTSTANDING SCHOOL: SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH DUA SIDOARJO	Rp.17.500.000	
19	Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag NIP 197307262005011001	Syariah dan Hukum	PEMBATASAN HAJI BAGI YANG SUDAH HAJI PRESPEKTIF SADZ AL-DZARI'AH	Rp.17.500.000	✓
20	Dr. Muzayyanah Mu'tashim Hasan, MA NIP 195812311997032001	Ushuluddin dan Filsafat	ISLAM dan TRADISI LOKAL (Makna Tindakan Aktor Terhadap Tradisi Lokal di Jember Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)	Rp.17.500.000	✓
21	Budi Ichwayudi, M.Fil.I NIP 197604162005011004	Ushuluddin dan Filsafat	PARADIGMA AGAMA DAN KHILAFAH DALAM PRESPEKTIF ABDURRAHMAN IBN KHALDUN	Rp.17.500.000	✓
22	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag NIP 197908012011012003	Syariah dan Hukum	FATWA DAN KETIDAKADILAN GENDER (Analisis Wacana Kritis Terhadap Keputusan Bahtsui Masa'il Tentang Perempuan)	Rp.17.500.000	✓
23	Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag NIP 196303271999032001	Syariah dan Hukum	TAFSIR MAQASID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA	Rp.17.500.000	✓
24	Dra. Hj. Nur Mazidah, M.Si NIP 195306131992032001	Ilmu Sosial dan Politik	PERAN KELUARGA DAN ANCAMAN TERORISME (Studi Deskriptif Tentang Pengetahuan dan Partisipasi Keluarga - Mahasiswa - Sebagai Tindakan Pencegahan Atas Terorisme)	Rp.17.500.000	✓

25	Suyikno, S.Ag, MH NIP 197307052011011001	Syari'ah dan Hukum	SYARIATISASI LEMBAGA PERBANKAN (Dalam Perspektif Teori Economic Analysis of Law dan Maqasid al Syari'ah)	Rp.17.500.000
26	Dr. Andi Syakur, M.Ag NIP 196607042003021001	Dakwah dan Komunikasi	TELAH FENOMENOLOGIS ATAS RITUAL ISLAM (Memahami Nilai-Nilai Moral Etik Dalam RitusSalat dan Haji/Umrah Dalam Rangka Pembentukan Pribadi Muslim yang Mulia)	Rp.17.500.000
27	Muh. Sholihuddin, MHI NIP 197707252008011009	Syari'ah dan Hukum	SERTIFIKASI HALAL MUI TERHADAP PRODUK SANDANG PERSPEKTIF MAQASID AL-SAHRI'AH DAN MADZHAB NEGARA	Rp.17.500.000
28	Muhammad Thoriqussu'ud, M.Pd NIP 198011182009121002	Adab dan Humaniora	PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR ILMU LUGHAH MAHASISWA YANG DIBELAJARKAN MENGGUNAKAN STRATEGI ADVANCE ORGANIZER JENIS MIND MAP DAN CONCEPT MAP YANG MEMILIKI GAYA KOGNITIF YANG BERBEDA	Rp.17.500.000
29	Moh. Hatta, S.Ag, MHI NIP 197110262007011012	Syari'ah dan Hukum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RATIO DECIDENDI DIKABULKANNYA PERMOHONAN IZIN POLIGINI OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA (DILUAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG)	Rp.17.500.000
30	A. Mufti Khazin, MHI NIP 197303132009011004	Syari'ah dan Hukum	STUDI KOMTEMPORER HUKUM PIDANA MURTAD (Kajian Antara Nilai Universalitas dan Partikulasi Hukum Islam Untuk Konteks Indonesia)	Rp.17.500.000
31	Purwanto, MHI NIP 197804172009011009	Ushuluddin dan Filsafat	MODEL INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT BEDA AGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERUKUNAN (Studi Konstruksi Sosial Muslim - Buddhis di Maha Vihara Majapahit, Mojokerto)	Rp.17.500.000
32	Drs. H. Muntaha, MA NIP 195907121990031002	Adab dan Humaniora	PEREMPUAN DALAM AL-MAKKIYAH DAN AL-MADANIYYAH DALAM "THE SECOND MESSAGE OF ISLAM"	Rp.17.500.000
33	Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI NIP 197209062007101003	Syari'ah dan Hukum	RELASI POLITICAL WILL dan PROGRESIFITAS REGULASI KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA	Rp.17.500.000
34	Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I NIP 197706232007101006	Dakwah dan Komunikasi	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN PERBAIKAN KEHIDUPAN PADA MAJELIS TA'LIM DI PONDOK PESANTREN JAWAAHIRUL HIKMAH III DESA TUMPAK, BESUKI, KAB. TULUNGAGUNG	Rp.17.500.000
35	Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, MA NIP 197511032005011005	Ekonomi dan Bisnis Islam	IJTIHAD MUHAMMAD SAYYID TANTAWI (Kajian Metodologi Fatwa Hukum Perbankan Modern)	Rp.17.500.000
36	Dra. Liliek Channa AW, M.Ag NIP 195712181982032002	Tarbiyah dan Keguruan	RELEVANSI HADIS-HADIS TARBAWI DENGAN TEORI PENDIDIKAN MODERN (Telaah Tentang Validitas dan Relevansi Hadis dengan Teori Kependidikan)	Rp.17.500.000
37	Mohamad Thohir, M.Pd.I NIP 197905172009011007	Dakwah dan Komunikasi	MEMBANGUN SOFT SKILL MAHASISWA MELALUI KELAS (Pembentukan Karakter Smart, Pious and Honourable Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Rational Emotif Behaviour Therapy di UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp.17.500.000

38	Moh. Anshori, S.Ag, M.Fil.I NIP 197508182000031002	Dakwah dan Komunikasi	ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PRESPEKTIF ERROR ANALYSIS	Rp.17.500.000
39	Mahir, M.Fil.I NIP 197212042007011027	Syariat,ah dan Hukum	FIKIH MADHAB NEGARA, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM INDONESIA (Studi Kajian Legislasi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia)	Rp.17.500.000
40	Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA NIP 197008201994031001	Syariat,ah dan Hukum	MAQASID SHARI'AH SEBAGAI SUMBER PENETAPAN HUKUM ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PEMBAHARUAN FIQH PERNIKAHAN DI INDONESIA	Rp.17.500.000
41	Moh.Faizin, M.Pd.I NIP. 197208152005011004	Tarbiyah dan Keguruan	DERADIKALISASI MATERI PAI DI SEKOLAH (Studi Kasus di SMP Pawiyatan Surabaya)	Rp.17.500.000
42	Drs. Zainal Arifin, M. Pd NIP 195206011985031001	Ushuluddin dan Filsafat	AKTUALISASI BUDAYA DAN AGAMA (Suatu Tinjauan Antropologi Terhadap Praktik Keagamaan Islam Nusantara)	Rp.17.500.000
43	M. Anis Bachtiar, M.Fil.I NIP 196912192009011002	Dakwah dan Komunikasi	SELF-HEALING SEBAGAI METODE ANGER MANAGEMENT (Studi Pelatihan Self-Healing Pagar Nusa di Lembaga-Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Jombang Jawa Timur)	Rp.17.500.000
44	Dr. Muhammad Afifudin Dimyathi, MA NIP 197905072005011002	Tarbiyah dan Keguruan	IMPLEMENTASI LEARNING BY RESEARCH DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA (Studi Multi Kasus di SMA Islam Terpadu Misykat Al Anwar Al-Aqobah Kwaron Diwck Jombang dan SMA Awh Tebuireng	Rp.17.500.000
45	Dr. H. Mukhlisin Saad, MA NIP 196109281994031001	Ushuluddin dan Filsafat	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PROSES PEMBUATAN PERDA TENTANG APBD DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	Rp.17.500.000
46	Drs. Abd. Basyid NIP 196009011990031002	Dkwah dan Komunikasi	STUDI KORELASI ANTARA KEPUTUSAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPETENSI DENGAN KINERJA DOSEN DI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp.17.500.000
47	Lilik Rahmawati, MEI NIP 198106062009012008	Syariat,ah dan Hukum	IMPLEMENTASI MATEMATIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN BISNIS WIRAUSAHAWAN (Peran Matematika Untuk Keberhasilan Bisnis Wirausahawan)	Rp 17 500 000
48	Drs.H.Mahfudh Shalahuddin, M.Pd NIP 195406061982031007	Tarbiyah dan Keguruan	MANAJEMEN DZIKIR TORIQOH QODARIYAH WA NAQSABANDIYAH DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING MASYRAKAT (Studi Kasus di Pondok Pesantren Suralaya Korwil Indonesia Timur)	Rp.17.500.000
49	Saoki SHI, MHI NIP 197404042007101004	Syariat,ah dan Hukum	IMPLIKASI YURIDIS MAKNA AHL-KITAB DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)	Rp.17.500.000
50	Drs. H. Achmad Zuhdi, DH, M.Fil.I NIP 196110111991031001	Adab dan Humaniora	SUWUK DAN RUQYAH DALAM PANDANGAN SAINS MODERN	Rp.17.500.000

51	H.AH.Fajruddin Fatwa, SH, MHI NIP 197606132003121002	Syariah dan Hukum	KONFIGURASI SOSIO JURIDIS DELIK KEAGAMAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	Rp.17.500.000 ✓
52	Rizka Safriyani, M.Pd NIP 198409142009122005	Tarbiyah dan Keguruan	PEMBUATAN TES ACADEMIC VOCABULARY BERBASIS KOMPUTER UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MEMAHAMI MAKNA ACADEMIC VOCABULARY	Rp.17.500.000 ✓
53	Ni'matus Sholihah, M.Ag NIP 197308022009012003	Tarbiyah dan Keguruan	IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PENUNJANG PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS X MAN REJOSO PETERONGAN JOMBANG	Rp.17.500.000 ✓
54	Thayib, S.Ag, M.Si NIP 197011161999031001	Dakwah dan Komunikasi	FENOMENA YOUNGPRENEUR DI KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp.17.500.000 ✓

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal Mei 2016



a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR PUSAT,

ZUMROTUL MUKAFFA
NIP 197010151997032001

W



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300 Surabaya 60237
E-Mail : lpkm@uinsby.ac.id Website: www.uinsby.ac.id

Nomor : Un.07/1/TL.00/176/LP2M/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

1. Bappeda Jatim
2. BPS Jatim

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dosen dengan identitas berikut:

Nama/NIP/NIM	: 1.	Dr. H. Mukhlisin Saad, MA	(Ketua Tim)
		196109281994031001	
	2.	Agus Soleh	(Anggota)
		NIM. E04212013	
	3.	Bahrudin	(Anggota)
		NIM. E04212019	
	4.	Harimas Septian	(Anggota)
		Nim. E04212024	
	5.	Badrut Tamam	(Anggota)
		Nim. E04212018	

Akan melakukan penelitian dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PROSES PEMBUATAN PERDA
TENTANG APBD DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Waktu : Bulan Juni s.d September 2016

Oleh karena keperluan di atas, mohon bapak/ibu memberikan ijin pada yang bersangkutan melakukan penelitian pada wilayah yang bapak/ibu pimpin. Sehubungan dengan itu segala sesuatu yang terkait dengan teknis penelitian ini akan diselesaikan oleh dosen peneliti yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 07 Juni 2016

Ketua Tim

Dr. H. Mukhlisin Saad, M. Ag.
NIP. 196109281994031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 24 Juni 2016

Kepada

Nomor : 070 / 8375 / 203.3 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi /Penelitian/
Survey/Kegiatan

Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur,
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tanggal 22 Juni 2016 Nomor : Un.07/1/TL.00/202/LP2M/2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2016 Nomor: 070/8374/203.3/2016 atas nama Dr. H. Mukhlisin Saad, MA, dkk (peserta 4 orang), dengan judul/tema proposal "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Proses Pembuatan Perda Tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya di Surabaya.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 8374 /203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dari Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tanggal 22 Juni 2016 Nomor : Un.07/1/TL.00/202/LP2M/2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama Dr. H. Mukhlisin Saad, MA, dkk (peserta 4 orang)

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Dr. H. Mukhlisin Saad, MA, dkk
b. Alamat : Jl. Ir. H. Juanda RT 01 RW 06 Patokan, Kraksaan, Probolinggo
c. Pekerjaan/Jabatan : Dosen
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Proses Pembuatan Perda Tentang APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur"
b. Tujuan : Permohonan data, kuesioner dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Penelitian Kebijakan
d. Penanggung Jawab : Dr. H. Mukhlisin Saad, MA
e. Anggota/Peserta : 1. Agus Soleh 3. Harimas Septian
2. Bahrudin 4. Badrut Tamam
f. Waktu Penelitian : 6 bulan
g. Lokasi Penelitian : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim dan Badan Pusat Statistik Prov. Jatim

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 24 Juni 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya